



LAPORAN KINERJA DIT. PPIP TA 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran (TA) 2024 dapat diselesaikan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja yang diharapkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa pengukuran kinerja adalah komponen utama penerapan manajemen kinerja guna menjamin ketersediaan layanan publik yang andal dan akuntabel.

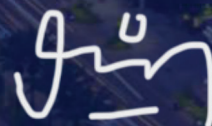
Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja Direktorat PPIP TA 2024 yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis TA 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahunan. Adapun pengukuran kinerja secara umum adalah nilai perbandingan antara kinerja yang diperjanjikan dengan kinerja yang dicapai. Skala pengukuran kinerja yang diterapkan berbasis pada pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berjenjang, mulai dari mingguan, bulanan, hingga tahunan. Analisis pencapaian kinerja menysasar pada hal-hal yang mendukung sasaran kinerja, meliputi: indikator kinerja, permasalahan dalam pelaksanaan tugas, dan analisis *reward-punishment* dalam pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP TA 2024 ini masih akan terus disempurnakan, sehingga membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui mekanisme evaluasi nantinya, diharapkan adanya perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di Direktorat PPIP.

Kami berharap bahwa hal-hal yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran utuh tentang capaian kinerja yang diraih oleh Direktorat PPIP dalam kurun TA 2024 dan menjadi sarana umpan balik guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 14 Januari 2025

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat PPIP adalah Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang ditugasi untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Dalam mengemban tugas penyelenggaraan infrastruktur nasional, Kementerian PUPR telah merumuskan beberapa Sasaran Program (SP) yang salah satunya menjadi tanggung jawab DJPI, yaitu “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”.

Dalam mendukung Sasaran Program tersebut, Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi target kinerja Direktorat PPIP adalah **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”**. Indikator yang digunakan adalah **“Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”**. Pemenuhan indikator capaian kinerja Direktorat PPIP tersebut selanjutnya dipertajam dengan penyusunan rencana lima tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PPIP Tahun Anggaran (TA) 2020–2024. Renstra ini diselaraskan dengan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan target lima tahunan tersebut dan kondisi serta kebijakan nasional, target tahunan kemudian diturunkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (Dirjen PI) dengan Direktorat PPIP. Dalam PK tersebut dicantumkan pula anggaran belanja Direktorat PPIP dalam satu tahun kerja. Pada tahun 2024, besaran awal anggaran belanja Direktorat PPIP yaitu sebesar Rp12.500.000.000.

Direktorat PPIP sebagai Unit Eselon II turut menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR.

Laporan Kinerja adalah salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP dan sebagai wujud akuntabilitas Direktorat PPIP dalam pertanggungjawaban capaian kinerja dalam satu tahun. Laporan ini menyajikan kapasitas organisasi, capaian kinerja, penyerapan anggaran Direktorat PPIP, dan juga analisis terhadap keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi

pada tahun ini. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan SAKIP tahun 2023 berdasarkan catatan-catatan Hasil Evaluasi.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPIP adalah sebanyak 15 paket kegiatan yang terdiri dari 13 paket swakelola dan 2 paket kontraktual. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan data iemon PUPR dan e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp10.621.960.530 (97,10% dari total pagu). Besaran sisa anggaran terdiri dari *self blocking* sebesar Rp310.902.000 (2,84%) dan tidak terserap sebesar Rp6.657.687 (0,06%).

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIP tahun ini adalah sebesar **25,42%** dari target kinerja sebesar **25,00%** (deviasi positif 0,42%). Terdapat output yang terealisasi melebihi dari target, yaitu Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: realisasi pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 6 proyek dari target 5 proyek. Sedangkan output Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan dapat memenuhi 2 kesepakatan dari 2 yang ditargetkan. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2024 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target Output	Target Proyek	Realisasi Output	Realisasi Proyek	Deviasi
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%		25,42%		+0,42%
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	-	3	-	-
	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	5 Proyek	2	6	+1 Proyek
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan		1		
	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan	2 Proyek	2	2	-
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK	-	1	-	-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	-	4	-	-

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Salah satu kendala utama adalah permasalahan dalam mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan untuk finalisasi proyek KPBU. Kendala ini bukanlah hal yang sederhana, mengingat kompleksitas dan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek-proyek KPBU. Para pemangku kepentingan dalam

proyek KPBU meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, hingga lembaga keuangan. Masing-masing aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Direktorat PPIP dalam hal ini mengemban tugas yang tidak mudah untuk mengakomodir setiap kepentingan tersebut agar proyek KPBU dapat berhasil terlaksana.

Pada sisi lain, terdapat potensi skema pembiayaan lain yang dapat dikembangkan. Salah satunya yang sudah berjalan di tahun 2024 ini adalah *Business to Business* (B2B) dalam upaya meningkatkan cakupan layanan dan menurunkan *Non-Revenue Water* (NRW) PDAM. Skema tersebut lebih cepat tahap penyiapan dan transaksinya, sehingga dapat menjadi pendorong dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah dijanjikan serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	8
I.1. LATAR BELAKANG.....	8
I.2. TUGAS DAN FUNGSI	9
I.2.1. <i>Tugas</i>	10
I.2.2. <i>Fungsi</i>	10
I.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
I.4. ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
II.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	15
II.2. PERJANJIAN KINERJA.....	18
II.3. METODE PENGUKURAN	20
II.4. TARGET TAHUN 2024	24
II.4.1. <i>Target Output Kinerja</i>	24
II.4.2. <i>Kerangka Pendanaan</i>	25
BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....	29
III.1. SUMBER DAYA MANUSIA	29
III.1.1. <i>SDM Berdasarkan Status Kepegawaian</i>	30
III.1.2. <i>SDM Berdasarkan Usia</i>	32
III.1.3. <i>SDM Berdasarkan Golongan</i>	35
III.1.4. <i>SDM Berdasarkan Pendidikan</i>	38
III.1.5. <i>SDM Berdasarkan Jabatan</i>	42
III.1.6. <i>Penerapan Rewards dan Punishment</i>	45
III.2. SARANA DAN PRASARANA	47
III.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	51
III.4. ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.....	54
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	56
IV.1. CAPAIAN KINERJA	56

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPIP – DJPI TA 2024

IV.1.1.	Capaian Kinerja Per Indikator Output	66
IV.2.	PERBANDINGAN KINERJA	90
IV.2.1.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	91
IV.2.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target RPJMN	92
IV.2.3.	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan Tahun Lalu	97
IV.2.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Instansi Sejenis	98
IV.3.	REALISASI ANGGARAN	99
IV.4.	EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	104
IV.4.1.	Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP	104
IV.4.2.	Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP	105
IV.4.3.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	110
IV.5.	ANALISIS EFISIENSI	114
IV.5.1.	Efisiensi Metode Kegiatan	114
IV.5.2.	Efisiensi Anggaran	116
IV.5.3.	Efektivitas Kinerja	118
BAB V	PENUTUP	121
V.1.	KESIMPULAN/PERMASALAHAN	121
V.2.	REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	123
LAMPIRAN		124

DAFTAR TABEL

TABEL II.1. PERJANJIAN KINERJA AWAL DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024.....	19
TABEL II.2. REVISI PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024	19
TABEL II.3. KRONOLOGIS REVISI DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024	20
TABEL II.4. MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024.....	20
TABEL II.5. CASCADING KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN..	23
TABEL II.6. TARGET PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TAHUN 2024	24
TABEL II.7. MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN RENSTRA 2020 – 2024.....	26
TABEL III.1. DATA SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT PPIP	48
TABEL III.2. DATA SARANA DAN PRASARANA DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN TAHUN PEROLEHAN.....	49
TABEL IV.1. HASIL CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024.....	57
TABEL IV.2. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	58
TABEL IV.3. TARGET DAN REALISASI KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH MENYIAPKAN DUKUNGAN KERJA SAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	60
TABEL IV.4. TARGET DAN REALISASI KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	61
TABEL IV.5. ISU PROYEK KPBU YANG MENGALAMI PERUBAHAN	62
TABEL IV.6. MATRIKS PERHITUNGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024	64
TABEL IV.7. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	67
TABEL IV.8. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	68
TABEL IV.9. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PENYUSUNAN IDENTIFIKASI PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	71
TABEL IV.10. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PENYUSUNAN IDENTIFIKASI PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	72
TABEL IV.11. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH MENYIAPKAN DUKUNGAN KERJA SAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	75
TABEL IV.12. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH MENYIAPKAN DUKUNGAN KERJA SAMA INVESTASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	75
TABEL IV.13. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PERUMUSAN NSPK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	79
TABEL IV.14. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PERUMUSAN NSPK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	80
TABEL IV.15. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	82

TABEL IV.16. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	82
TABEL IV.17. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	84
TABEL IV.18. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “JUMLAH PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	85
TABEL IV.19. CAPAIAN KINERJA KOMPONEN OUTPUT “PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	87
TABEL IV.20. DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN OUTPUT “PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN”	89
TABEL IV.21. PERBANDINGAN CAPAIAN <i>OUTPUT</i> KINERJA DIREKTORAT PPIP TAHUN 2023 DAN 2024.....	91
TABEL IV.22. PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) RPJMN 2020 – 2024 SEKTOR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN.....	92
TABEL IV.23. REALISASI PROYEK KPBU TAHAP TRANSAKSI SEKTOR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DIREKTORAT PPIP PERIODE 2020 – 2024	94
TABEL IV.24. INDIKATOR DAN TARGET KEGIATAN PRIORITAS (KP) RPJMN 2020 – 2024 SEKTOR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN.....	96
TABEL IV.25. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIT. PPIP.....	98
TABEL IV.26. TARGET KINERJA PUSAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TAHUN 2025.....	99
TABEL IV.28. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN DIREKTORAT PPIP TA 2024 PER KUARTAL	102
TABEL IV.29. PERBANDINGAN TARGET/RENCANA (R) DAN AKTUAL/REALISASI (A).....	103
TABEL IV.30. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2023	105
TABEL IV.31. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN EVALUASI SAKIP TAHUN 2022.....	106
TABEL IV.32. REKOMENDASI EVALUATOR ATAS SAKIP DIREKTORAT PPIP TA 2023.....	109
TABEL IV.33. DISTRIBUSI KEGIATAN DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024	115
TABEL IV.34. PERUBAHAN ANGGARAN BERDASARKAN PAGU DEFINITIF DAN PAGU PER BULAN DESEMBER 2024.....	116

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH MENGGUNAKAN	9
GAMBAR I.2. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	11
GAMBAR II.1. INDIKASI PENDANAAN MAJOR PROJECT 2020 – 2024	16
GAMBAR II.2. IPA SPAM PROVINSI DK JAKARTA	22
GAMBAR II.3. MOBIL PENGOLAHAN AIR PAM JAYA	25
GAMBAR III.1. SESI FOTO BERSAMA PEGAWAI DIREKTORAT PPIP	29
GAMBAR III.2. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN	30
GAMBAR III.3. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN	31
GAMBAR III.4. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN KELOMPOK USIA	33
GAMBAR III.5. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN KELOMPOK USIA DAN JENIS KELAMIN	34
GAMBAR III.6. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN GOLONGAN	36
GAMBAR III.7. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN	38
GAMBAR III.8. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	39
GAMBAR III.9. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN	40
GAMBAR III.10. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN TINGKAT JABATAN	42
GAMBAR III.11. DISTRIBUSI PEGAWAI DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN TINGKAT JABATAN DAN JENIS KELAMIN	43
GAMBAR III.12. JUMLAH PEGAWAI ASN DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN STATUS PENILAIAN SKP PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2023	45
GAMBAR III.13. JUMLAH PEGAWAI ASN DIREKTORAT PPIP BERDASARKAN PREDIKAT PENILAIAN SKP PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2023	46
GAMBAR III.14. METODE RAPAT DARING DENGAN MEMANFAATKAN BMN PERANGKAT KANTOR <i>SUMBER: DOKUMENTASI DIREKTORAT PPIP</i>	50
GAMBAR III.15. DIPA DIREKTORAT PPIP TA 2024 BERDASARKAN UNIT PELAKSANA	51
GAMBAR III.16. DIPA DIREKTORAT PPIP TA 2023 BERDASARKAN RUMPUN OUTPUT	52
GAMBAR III.17. PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA PEGAWAI DJPI	54
GAMBAR IV.1. RAPAT PEMBAHASAN ISU STRATEGIS PENJAMINAN SPAM REGIONAL IR. H. DJUANDA/JATILUHUR II	63
GAMBAR IV.2. INDONESIA WATER, SANITATION, HYGIENE (WASH) AND WATER RESOURCE MANAGEMENT (WRM) INVESTMENT FORUM	71
GAMBAR IV.3. FOCUS GROUP DISCUSSION II PENYUSUNAN PRASTUDI KELAYAKAN KPBU SPAM REGIONAL LOMBOK	74
GAMBAR IV.4. EKSPOSE APLIKASI E-LAHAN KSCS DAN <i>MONITORING</i> HULU-HILIR SPAM REGIONAL KARIAN SERPONG	79

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPIP – DJPI TA 2024

GAMBAR IV.5. <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> KONSEP PANEL BADAN USAHA SEKTOR AIR MINUM PENGADAAN LAHAN E-LAHAN KSCS	81
GAMBAR IV.6. KUNJUNGAN LAPANGAN PROYEK KPBU SPAM KOTA PEKANBARU	87
GAMBAR IV.7. PEMBAHASAN PENYEMPURNAAN REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 DIREKTORAT PPIP	94
GAMBAR IV.8. RAPAT PEMANTAUAN PROGRES KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN DIREKTORAT PPIP TRIWULAN II TA 2024	100
GAMBAR IV.9. RAPAT PEMANTAUAN PROGRES KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN DIREKTORAT PPIP TRIWULAN II TA 2024	101
GAMBAR IV.10. KURVA S DIREKTORAT PPIP TA 2024	103
GAMBAR IV.11. RAPAT PEMBAHASAN TEKNIS INPUT DATA KINERJA ORGANISASI TA 2023 PADA APLIKASI E-SAKIP.....	104
GAMBAR IV.12. PENILAIAN IMPLEMENTASI SAKIP DI DIREKTORAT PPIP	107
GAMBAR IV.13. RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DJPI TRIWULAN I TA 2024...	111
GAMBAR IV.14. RAPAT KAJIAN KEGIATAN DJPI TA 2024 DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN DJPI TA 2023	112
GAMBAR IV.15. DISTRIBUSI KEGIATAN DIREKTORAT PPIP TAHUN 2024	115
GAMBAR IV.16. RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DJPI.....	116

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama, berjudul "Pendahuluan," membuka laporan ini sebagai pijakan integral yang memberikan konteks dan kerangka kerja esensial. Pendahuluan ini dirancang untuk menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi fokus analisis. Melalui pemaparan yang cermat terhadap konteks dan latar belakang subjek laporan, tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi dan relevansi topik yang dibahas. Pendahuluan ini juga memberikan gambaran singkat mengenai struktur dan kronologi laporan secara menyeluruh, memberikan pengantar terhadap setiap bab yang akan diuraikan, serta merinci temuan atau rekomendasi yang mungkin diungkapkan. Dengan demikian, bab pendahuluan berfungsi sebagai titik awal yang kokoh dan formal untuk membimbing pembaca menuju pemahaman yang mendalam terhadap substansi dan nilai informasional yang akan terungkap dalam setiap bab selanjutnya.

I.1. Latar Belakang

Akuntabilitas adalah alat perbaikan sistem manajemen pemerintahan dan agenda penting pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai penyedia layanan sektor publik, Pemerintah harus mampu memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan proses birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang andal. Keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya praktik manajemen pemerintahan yang mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan profesional.

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Salah satu komponen penyelenggaraan SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan informasi kinerja instansi dalam kurun waktu satu tahun. Laporan Kinerja memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang



Gambar I.1. Pengelolaan Air Limbah Menggunakan Mekanisme Oksidasi Kimia

Sumber: tiwa.co.id

bersangkutan dan akuntabilitas keuangan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan publik. Laporan Kinerja (LAKIN) memberikan informasi pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta memuat informasi faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*), dan faktor yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*). Dengan demikian, adanya informasi ini akan membantu instansi dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Direktorat PPIP berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu komponen SAKIP, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Laporan Kinerja yang disusun ini berbasis pada kegiatan Direktorat PPIP pada tahun 2024. Acuan yang digunakan dalam analisis capaian adalah Renstra Kementerian PUPR, Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024, dan Perjanjian Kinerja.

I.2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Direktorat PPIP diatur di dalam pasal 561 dan 562 Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

I.2.1. Tugas

Direktorat PPIP bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

I.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PPIP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

I.3. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Direktorat PPIP didukung oleh struktur organisasi yang setiap bagiannya saling bersinergi mengatur mendistribusikan tugas secara proporsional yang dikelompokkan menjadi:

- a. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi;
- b. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Di samping penugasan secara struktural sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan tugas di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman juga didukung oleh pelaksana tugas jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional lainnya, yaitu

Koordinator Bidang Tugas Dukungan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Uraian Tugas dan Fungsi Penugasan Struktural Direktorat PPIP adalah sebagai berikut:

1) Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

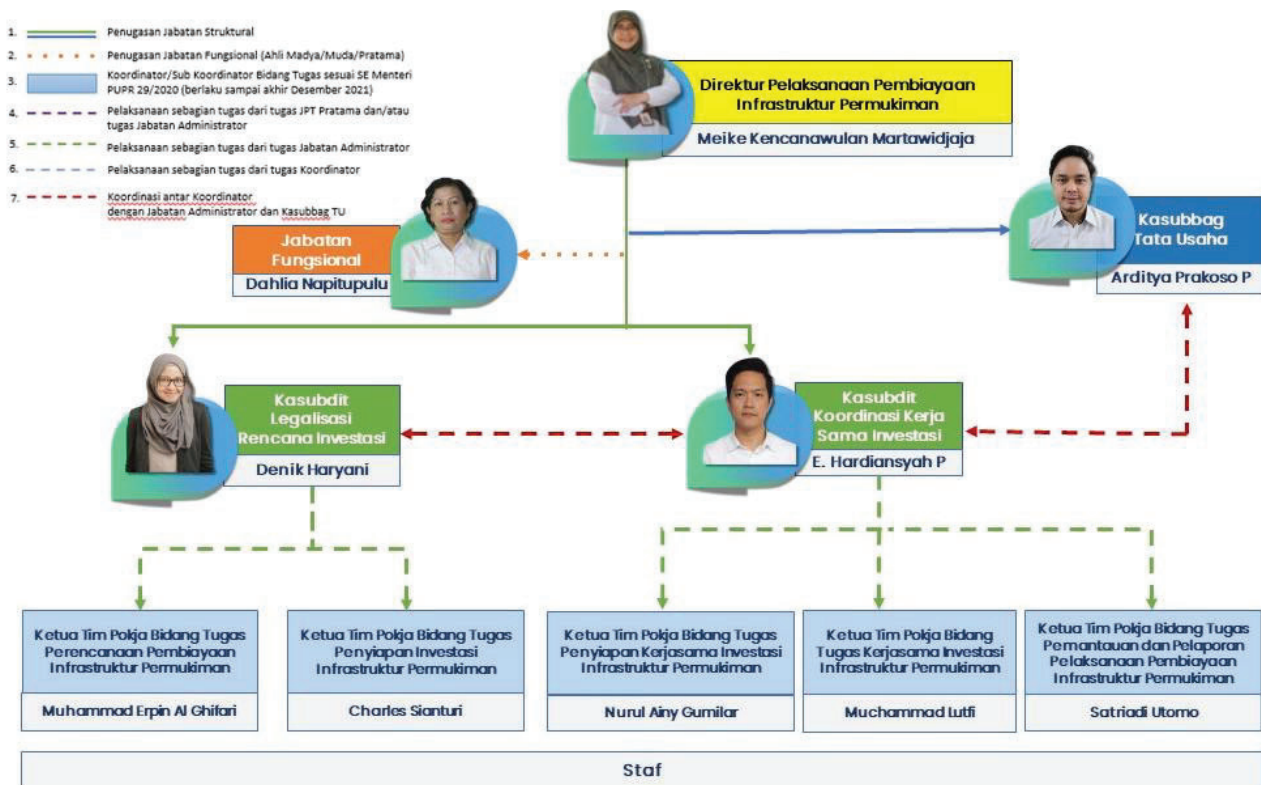
Berdasarkan Pasal 564 – 565 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi membawahi:

- Sub Koordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan
- Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi



Gambar I.2. Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Sumber: SK Penugasan, diolah oleh Direktorat PPIP

2) Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi

Berdasarkan Pasal 566 – 567 Permen PUPR Nomor 13/2020, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi memiliki tugas sebagai berikut.

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan Pembiayaan infrastruktur permukiman.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Investasi membawahi:

- a) Sub Koordinator Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi
- b) Sub Koordinator Bidang Tugas Pelaksanaan Kerjasama Investasi
- c) Sub Koordinator Supervisi Pelaksanaan Investasi

3) Subbagian Tata Usaha

Berdasarkan Pasal 568 Permen 13/2020, Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi penerapan sistem pengendalian intern Direktorat.

Berdasarkan Surat Perintah Sekrertaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2/SPRIN/Ps/2023 tentang Penempatan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelas Jabatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tanggal 2 Mei 2023, terdapat 7 Jabatan Ketua Tim Pokja Bidang Tugas di Direktorat PPIP, yaitu.

1. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Dukungan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
2. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Permukiman;
3. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
4. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Supervisi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
5. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Penyiapan Kerjasama Investasi Infrastruktur Permukiman;
6. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Kerjasama Investasi Infrastruktur Permukiman;
7. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

I.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait potensi dan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh Direktorat PPIP adalah sebagai berikut.

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah terhadap skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Koordinasi antar *stakeholder* terkait pelaksanaan proyek KPBU belum maksimal;
3. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);
4. Ketersediaan lahan yang *clean and clear* untuk proyek KPBU Infrastruktur permukiman masih terbatas; dan
5. Belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU di daerah dalam mendukung pelaksanaan KPBU.

Terkait pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan kegiatan oleh masing-masing Subdit di Direktorat PPIP, beberapa isu strategis spesifik lain yang teridentifikasi dalam beberapa tahun terakhir, di antaranya sebagai berikut.

1. Belum ada kepastian ketersediaan dan kesiapan air baku untuk beberapa proyek KPBU SPAM dengan PJPK daerah yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP.
2. Belum tersedianya dokumen penyiapan SPAM sisi hilir untuk proyek KPBU SPAM regional dengan PJPK pusat dan PJPK daerah.
3. Adanya indikasi perubahan usulan skema pembiayaan pada proyek KPBU yang terdapat dalam *pipeline* proyek KPBU Direktorat PPIP dengan PJPK daerah.
4. Belum adanya pemilihan teknologi pemrosesan sampah yang terjangkau dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah dalam proyek KPBU persampahan.
5. Ketidak-sinkronan perencanaan dan penganggaran proyek KPBU di antara lingkup kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, dan KPBU sehingga pelaksanaan proyek KPBU mengalami penundaan.
6. Belum adanya *best practices* pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman.
7. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai upaya *digital branding* Direktorat PPIP guna meningkatkan akuntabilitas publik dan membangun citra Direktorat PPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan suatu unit kerja didasarkan pada dokumen Renstra yang disusun secara sistematis. Penyusunan Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Renstra merupakan turunan dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan lima tahunan tersebut diuraikan ke dalam perencanaan kinerja melalui penetapan kegiatan tahunan beserta indikatornya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penetapan Perencanaan Kinerja ini adalah dasar pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIP tahun 2024 mengacu pada Renstra DJPI dan Direktorat PPIP tahun 2020 – 2024.

II.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Direktorat PPIP disusun dalam rangka perwujudan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024, dan Renstra DJPI. Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat PPIP yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

Kementerian PUPR menetapkan lima Sasaran Strategis (SS) di dalam Renstra untuk dicapai pada tahun 2020 – 2024. Dari kelima SS tersebut, DJPI mengemban amanat pemenuhan Sasaran Strategis Kelima (SS-5), yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, Kemen PU merevitalisasi organisasi dan mengukuhkan pembentukan Unit Organisasi DJPI pada tahun 2019, yang secara spesifik menangani pembiayaan infrastruktur. Besarnya kebutuhan pembiayaan untuk penyediaan Infrastruktur di tengah keterbatasan APBN Kemen PU menyebabkan *funding gap* dan

membutuhkan alternatif solusi pemenuhan pembiayaan non-APBN, salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR (amandemen Permen PUPR 21/2018), telah diatur bahwa jenis Infrastruktur sektor permukiman yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah Infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.

Kebijakan sektor permukiman telah menargetkan 100% pembangunan hunian cerdas sebagaimana tertuang di dalam Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017. Target *output* utama dari Visium Kementerian PU 2030 tersebut untuk bidang air minum, sanitasi, dan persampahan adalah 100% akses air minum layak dengan 30% jaringan perpipaan; 90% akses sanitasi layak dengan 15% termasuk aman; dan 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan. Semua target ini akan diselesaikan pada tahun 2020 – 2024 dan tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBN per tahunnya, sehingga memerlukan pendanaan non-APBN. Beberapa skema pembiayaan non-APBN yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), *Business to Business* (B to B), pasar modal, dan pembiayaan lainnya sesuai perundang-undangan.

Indikasi infrastruktur sektor permukiman dirumuskan juga dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) berdasarkan RPJMN 2020 – 2024. *Major Project* adalah proyek-proyek yang strategis yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Pada sektor permukiman, dua *Major Project* yang perlu diwujudkan untuk masyarakat yaitu 10 juta Sambungan Rumah melalui akses air minum perpipaan dan 90% Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak dan Aman. Kebutuhan pembiayaan untuk kedua *Major Project* tersebut terindikasi sebesar Rp263,5T, dengan rincian sebagai berikut.

Air Limbah Domestik (Akses Sanitasi Layak 90%) Rp 140 T	Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) Rp 123,5 T
• APBN: Rp 73,5 T • APBD: Rp 1,7 T • Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 T	• APBN: Rp 77,9 T • APBD: Rp 15,6 T • KPBU: Rp 29,9 T

Gambar II.1. Indikasi Pendanaan Major Project 2020 – 2024

Sumber: Renstra 2020 – 2024 Kementerian PUPR

Potensi di sektor permukiman tidak lepas dari berbagai tantangan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemenuhan akses layanan air minum yang layak perlu didukung dengan peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang sehat. Sampai dengan tahun 2023, terdapat penambahan tujuh BUMD Air Minum dari tahun 2022,

sebelumnya berjumlah 389 pada 2022, menjadi 393 pada 2023, dari jumlah tersebut sebanyak 257 BUMD Air Minum (65,39%) berkinerja sehat. Selanjutnya, sampai dengan 2030 subsektor sanitasi diharapkan memadai dan merata bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah nasional. Subsektor persampahan juga diharapkan lebih berupaya intensif untuk mengurangi dampak dari sampah kota.

Sasaran Kegiatan Direktorat PPIP merupakan turunan dari Sasaran Program 01 (SP01) pada Sasaran Kegiatan 03 (SK03) yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Indikator Kinerja Direktorat PPIP adalah Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, yang diukur dari:

- a. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).
- b. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%).

Arah kebijakan Direktorat PPIP sebagaimana Renstra 2020 – 2024 Direktorat PPIP dan disusun berdasarkan target *output* Kementerian PUPR di sektor permukiman adalah sebagai berikut.

- a. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 – 2024 yaitu 100% akses air minum layak;
- b. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 – 2024 yaitu 90% akses sanitasi layak;
- c. Mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman dengan skema KPBU agar tercapai target *output* utama Kementerian PUPR 2020 – 2024 yaitu 100% hunian dengan akses sampah terkelola baik di perkotaan;
- d. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur permukiman dalam mendukung pencapaian Visium PUPR 2020 – 2024 agar dapat menurunkan *funding gap* saat ini yaitu sebesar 56%; dan
- e. Peningkatan tata laksana organisasi yang efektif dan efisien.

Dalam menjalankan arah kebijakan 2020 – 2024 Direktorat PPIP, diperlukan beberapa strategi dalam penentuan kebijakan pembiayaan infrastruktur permukiman, yaitu:

- a. Percepatan proses penyiapan proyek KPBU infrastruktur permukiman *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.

- b. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah untuk proyek KPBU *solicited*.
- c. Percepatan pelaksanaan KPBU infrastruktur permukiman pada masing-masing tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi.
- d. Dukungan terhadap regionalisasi pembangunan SPAM dan pengelolaan sampah di daerah.
- e. Peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan air minum dan pengelolaan sampah antar program dan antar *stakeholder* pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
- f. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi kepada Pemerintah Daerah terkait pembiayaan infrastruktur permukiman melalui dana Non APBN.
- g. Pengembangan sumber alternatif pembiayaan dan pendanaan untuk pengembangan proyek KPBU Permukiman dan skema investasi Badan Usaha.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan melakukan evaluasi untuk proyek KPBU bidang air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
- i. Penyusunan regulasi-regulasi dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan KPBU.

Direktorat PPIP menyiapkan kerangka regulasi pelaksanaan strategi dan pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN khusus subsektor permukiman yang menjadi tugas dan kewenangan Direktorat PPIP. Kerangka regulasi yang dimaksud tercantum dalam Lampiran 1 Laporan Kinerja.

II.2. Perjanjian Kinerja

Sebagai jaminan atas target yang diharapkan, para pihak dalam sistem akuntabilitas harus menandatangani pernyataan komitmen atau sebuah Perjanjian Kinerja (PK). PK adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang membuat perjanjian untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja tertentu. Di dalam PK terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam satu tahun yang dibekali dengan pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur PPIP telah menandatangani dokumen PK / kontrak kinerja Tahun Anggaran (TA) 2024 dengan pagu awal anggaran Rp12.500.000.000 pada bulan Januari 2024. Rincian dokumen PK awal dan perubahannya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Tabel II.2.

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Awal Direktorat PPIP Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,95%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	24,80%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp12.500.000.000	

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024 (Januari 2024)

Tabel II.2. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2023	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,95%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	24,80%	25%
Kegiatan	Anggaran	
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rp10.939.520.000	

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024 (Oktober 2024)

Sepanjang tahun 2024, dokumen PK Direktorat PPIP telah direvisi dua kali, yaitu pada bulan Juli dan Oktober. Perubahan dilakukan dengan merinci lebih detail terkait indikator kinerja yang ditargetkan hingga akhir tahun. Kronologis revisi pagu anggaran Direktorat PPIP Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3. Kronologis Revisi Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024

No	Perjanjian Kinerja	Pagu Anggaran (ribu rupiah)	Tanggal Terbit
1	Awal	12.500.000	Januari 2024
2	Revisi I	11.793.520	Juli 2024
3	Revisi II	10.939.520	Oktober 2024

II.3. Metode Pengukuran

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang hendak dicapai. Indikator Kegiatan (*output*) adalah indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan tercapainya *output* kegiatan tersebut. Penetapan indikator didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang mudah diukur dan mudah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Indikator Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra Tahun 2020 – 2024 Direktorat PPIP, serta cara perhitungannya diuraikan pada Tabel II.4.

Tabel II.4. Manual Indikator Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024

Sasaran (1)	Program/ Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Jenis Indikator (4)	Metode Perhitungan (5)
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur	IKSP2, dihitung penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) berikut: Indikator 1 (30%) <i>Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target.</i> Indikator 2 (35%) <i>Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang masuk Tahap</i>

Sasaran (1)	Program/ Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Jenis Indikator (4)	Metode Perhitungan (5)
		yang Efisien dan Efektif	Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	Perencanaan dan Tahap Penyiapan dengan target dikali 100%. Tahap Perencanaan dan Tahap Penyiapan terdiri dari Studi Pendahuluan/Pra FS, OBC. FBC (FS). Indikator 3 (35%) Dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah paket pembiayaan kreatif Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan (minimal tahap prakualifikasi) dengan target dikali 100%.
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman berikut: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020 – 2024

Metode pengukuran yang dilakukan dalam mengukur capaian kinerja serta *output* kegiatan yang ingin dicapai Direktorat PPIP merupakan turunan dari *cascading* kinerja yang diuraikan dalam Renstra DJPI TA 2020 – 2024.



Gambar II.2. IPA SPAM Provinsi DK Jakarta

Sumber: ANTARA Foto/Aprillio Akbar

Berdasarkan *cascading* kinerja tersebut, target capaian Sasaran Kegiatan di tahun 2024 saling terintegrasi di antara unit kerja yang ada di DJPI sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya, dari 100% menjadi 25% per unit kerja (target 100% dibagi untuk 4 unit kerja). *Cascading* kinerja untuk Direktorat PPIP berdasarkan Renstra diuraikan pada Tabel II.5.

Tabel II.5. *Cascading* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Indikator	Output Kegiatan	Bobot Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target	50%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%
									Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50%
									NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	10%
						Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	50%
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50%

II.4. Target Tahun 2024

II.4.1. Target Output Kinerja

Dalam rangka memenuhi ketercapaian sasaran program dan kegiatan, Direktorat PPIP merencanakan *output* indikator dan menetapkan target per indikator setiap tahunnya, sebagai upaya terselenggaranya pembiayaan infrastruktur permukiman. Rencana dan penetapan tersebut tertuang dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020 – 2024. Target pencapaian sasaran pada tahun 2024 per masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6. Target Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target 2024
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%
<i>Output</i>	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan
	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020 – 2024

II.4.2. Kerangka Pendanaan

Total kebutuhan pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat PPIP tahun 2024 adalah sebesar Rp30,5 Miliar, berdasarkan penetapan anggaran di dalam Renstra Direktorat PPIP TA 2020 – 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel II.7.



Gambar II.3. Mobil Pengolahan Air PAM Jaya

Sumber: KOMPAS/Aaus Susanto

Tabel II.7. Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat PPIP Berdasarkan Renstra 2020 – 2024

No	Kegiatan/Output/Sub Output (Paket)/ Komponen (Sub Paket)		Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	3	3	13	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800	9.007
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	2	2	8	1.207	800	800	800	800	4.407
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	600	1.000	1.000	1.000	1.000	4.600
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	0	4	762	2.000	1.000	1.000	1.000	5.762
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	0	2	8	1.673	5.500	19.000	19.000	16.000	61.173
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	700	4,000	10,000	10.000	10.000	34.700
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	4	973	1.500	9.000	9.000	6.000	26.473
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	5	1	9	900	1.500	1.000	1.000	1.000	5.400
5	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan		Kesepakatan	3	3	3	1	1	15	3.781	6.800	5.100	5.100	5.100	25.881

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPIP – DJPI TA 2024

No	Kegiatan/ <i>Output</i> /Sub <i>Output</i> (Paket)/ Komponen (Sub Paket)		Satuan	Target						Anggaran (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	3	3	3	1	1	11	1.454	2.800	2.500	2.500	2.500	11.754
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	3	4	4	2	2	15	2.326	4.000	2.600	2.600	2.600	14.126
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2.000
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	0	1	1	2	1	5	0	500	500	500	500	2.000
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	4	3	3	4	4	18	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	4	3	3	4	4	18	3.113	2.200	4.800	4.800	4.800	19.713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1.437
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1	0	0	3	237	300	300	300	300	1.437

Sumber: Renstra Direktorat PPIP TA 2020 – 2024

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Bab tiga ini akan menguraikan secara mendalam tentang kapasitas organisasi Direktorat PPIP pada Tahun Anggaran 2024, dengan fokus pada aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penekanan pada kapasitas organisasi menjadi esensial dalam pemahaman struktur yang mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat PPIP. Sumber daya manusia, sebagai komponen kunci akan dikupas secara detail pada bab ini. Selain itu, analisis mendalam mengenai sarana prasarana akan memberikan pemahaman terinci tentang infrastruktur dan fasilitas yang menjadi fondasi pelaksanaan program dan kegiatan.

III.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat PPIP, diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Jumlah pegawai di Direktorat PPIP per tanggal 31 Desember 2024 adalah 51 orang pegawai, sebagaimana yang akan dijelaskan pada subbab berikut ini.



Gambar III.1. Sesi Foto Bersama Pegawai Direktorat PPIP

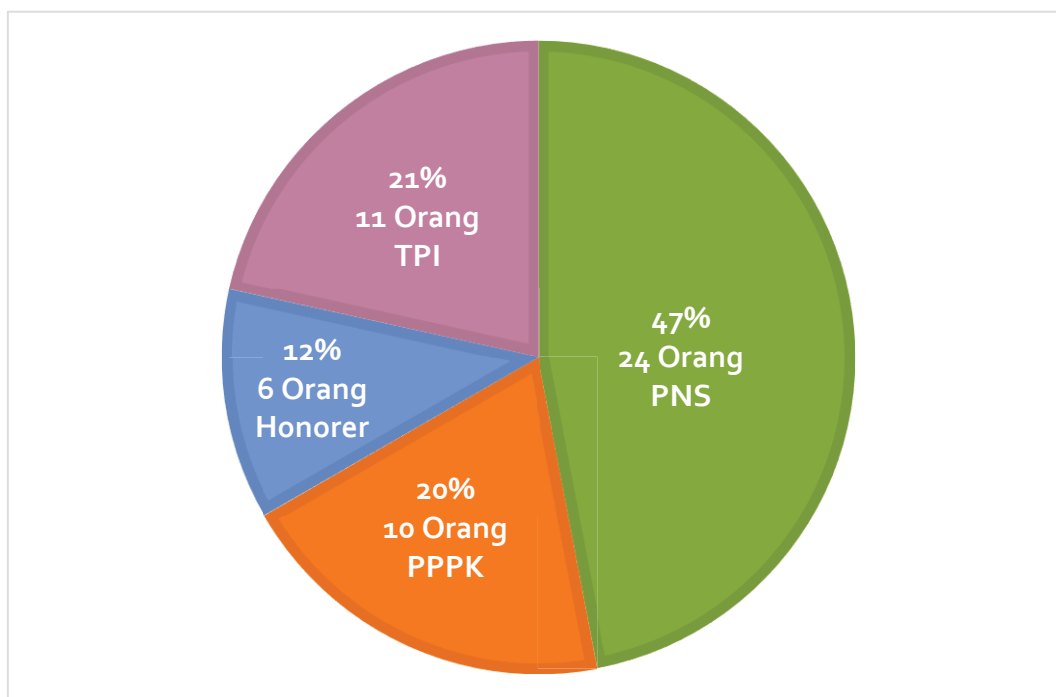
Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

III.1.1. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Direktorat PPIP adalah entitas yang memiliki komposisi karyawan yang beragam, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai honorer, dan Tenaga Pendukung Individu (TPI). Dalam struktur organisasi ini, masing-masing kategori pegawai memainkan peran penting yang mendukung kelancaran dan efektivitas operasional Direktorat PPIP.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendominasi struktur dengan 24 orang atau 47% dari total pegawai. Mereka adalah tulang punggung Direktorat, membawa keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan formal dan pengalaman bertahun-tahun. PNS di Direktorat PPIP bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan strategis, dan memastikan bahwa semua operasi berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah. Kehadiran mereka memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam pelaksanaan tugas-tugas penting Direktorat.

Sebanyak 10 pegawai atau 20% dari total adalah PPPK. Mereka ini menawarkan fleksibilitas yang lebih dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja. PPPK sering kali diberi tugas spesifik yang memerlukan keahlian tertentu, memungkinkan Direktorat PPIP untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dinamis dan berubah cepat. PPPK mampu mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh PNS, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai situasi.

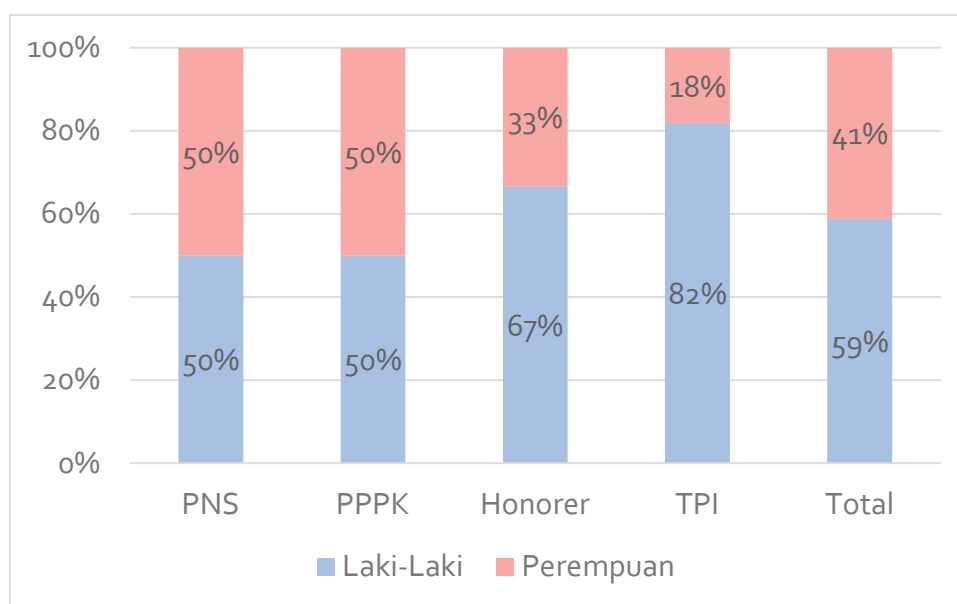


Gambar III.2. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian

Kategori pegawai honorer mencakup 6 orang atau 12% dari keseluruhan. Mereka adalah pekerja yang sangat penting dalam operasional harian Direktorat. Meskipun mereka tidak memiliki status pegawai tetap, kontribusi mereka tidak dapat diabaikan. Dari administrasi kantor hingga dukungan teknis, pegawai honorer memastikan bahwa operasional sehari-hari berjalan lancar. Keberadaan mereka meningkatkan fleksibilitas organisasi dan memungkinkan Direktorat PPIP untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan atau tantangan yang muncul.

Terakhir, ada Tenaga Pendukung Independen (TPI) yang berjumlah 11 orang atau 21%. TPI ini biasanya merupakan ahli yang dipekerjakan pada proyek atau kegiatan tertentu. Mereka membawa keahlian khusus yang diperlukan untuk proyek atau inisiatif spesifik, seringkali dalam bidang yang sangat teknis atau spesialis. Peran mereka krusial dalam mengimplementasikan proyek-proyek yang memerlukan pengetahuan atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh pegawai tetap.

Keseluruhan, total ada 51 pegawai di Direktorat PPIP, dengan masing-masing kategori pegawai berkontribusi secara unik terhadap pencapaian tujuan dan misi Direktorat. Dengan komposisi yang beragam ini, Direktorat PPIP mampu menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas dengan fleksibilitas dan spesialisasi. Hal ini menunjukkan komitmen Direktorat dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif, yang pada akhirnya memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang pembiayaan infrastruktur permukiman. Kombinasi berbagai kategori pegawai ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan adaptif, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di sektor publik.



Gambar III.3. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Analisis lebih lanjut terhadap struktur karyawan di Direktorat PPIP menunjukkan distribusi gender. Perbandingan antara perempuan dan laki-laki di setiap kategori pegawai memberikan wawasan penting tentang keragaman gender dalam organisasi.

Dalam kelompok PNS dan PPPK, distribusi gender seimbang dengan 50% perempuan dan 50% laki-laki. Proporsi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan. Kehadiran perempuan yang signifikan di kalangan PNS dan PPPK menunjukkan bahwa Direktorat PPIP berkomitmen terhadap kebijakan inklusif dan pemberdayaan perempuan.

Sementara itu, pada kategori pegawai honorer, laki-laki memiliki proporsi yang lebih besar, yaitu 67%, sementara perempuan hanya 33%. Hal ini bisa menunjukkan bahwa posisi honorer, yang sering kali menawarkan keamanan pekerjaan yang lebih rendah dan mungkin kurang menarik bagi perempuan, terutama bagi mereka yang mencari stabilitas kerja atau manfaat kerja yang lebih baik.

Untuk TPI, distribusi gender sangat condong ke laki-laki, dengan 82% laki-laki dan hanya 18% perempuan. Ini mungkin mencerminkan tren di industri tertentu atau bidang keahlian teknis yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Kesenjangan ini bisa jadi area yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, terutama di posisi yang membutuhkan keahlian khusus.

Secara keseluruhan, dari total pegawai di Direktorat PPIP, 41% adalah perempuan dan 59% adalah laki-laki. Data ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk kesetaraan gender, masih terdapat ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Situasi ini mendorong Direktorat PPIP untuk terus berupaya menciptakan kesempatan yang setara bagi kedua gender berdasarkan kategori kepegawaian.

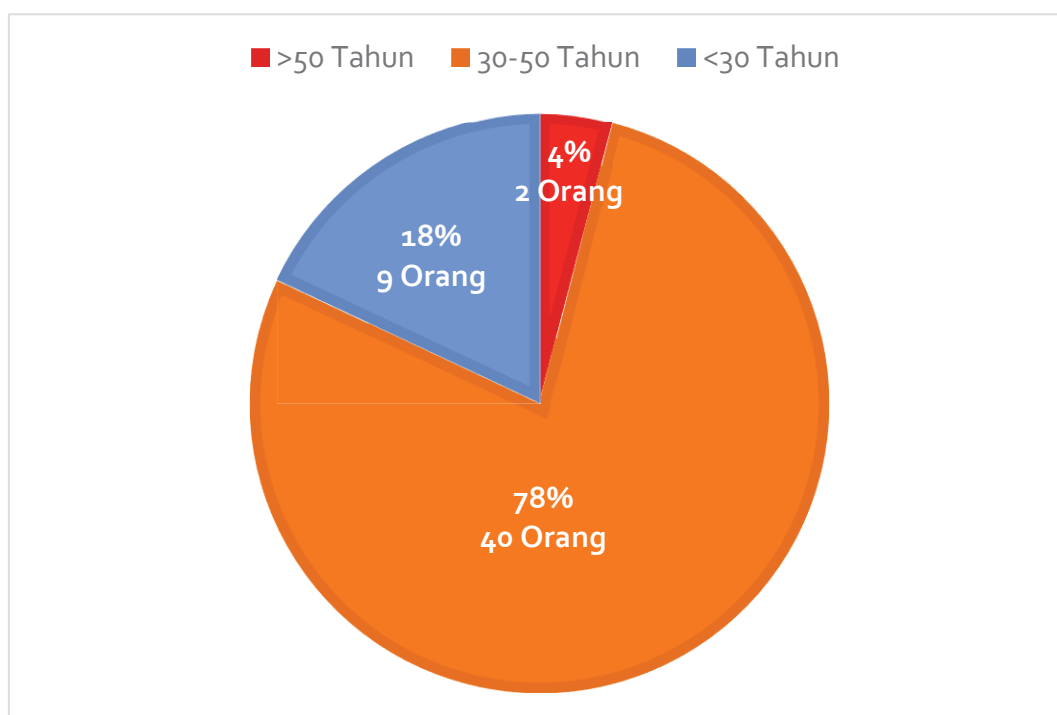
III.1.2. SDM Berdasarkan Usia

Dalam upaya memahami komposisi demografi pegawai di Direktorat PPIP, penting untuk melihat distribusi mereka berdasarkan kelompok usia. Data pegawai dibagi ke dalam tiga kelompok usia utama: di bawah 30 tahun, antara 30 hingga 50 tahun, dan di atas 50 tahun. Analisis ini memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika kerja dan potensi perkembangan organisasi ke depan.

Kelompok usia di bawah 30 tahun mencakup 18% dari total pegawai, yang berjumlah 9 orang. Kehadiran jumlah yang signifikan dari pegawai muda ini menandakan adanya vitalitas dan inovasi dalam lingkungan kerja. Pegawai dalam kelompok usia ini biasanya membawa semangat baru, pendekatan yang berbeda, dan keakraban dengan teknologi terkini. Ini

adalah aset berharga dalam mendorong inovasi dan adaptasi terhadap tren dan tantangan baru di lingkungan kerja yang cepat berubah. Mereka juga menunjukkan potensi untuk pengembangan jangka panjang dalam organisasi, yang dapat dilatih dan dikembangkan untuk memegang peran kunci di masa depan.

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun adalah yang terbesar, dengan 78% atau 40 orang dari total pegawai. Kelompok ini biasanya memiliki pengalaman kerja yang lebih luas, kemampuan kepemimpinan yang matang, dan pengetahuan mendalam tentang operasional organisasi. Mereka seringkali berada di posisi kunci yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Kehadiran mereka di Direktorat PPIP menunjukkan adanya fondasi yang kuat dan stabil. Pegawai dalam kelompok usia ini juga berperan penting dalam membimbing dan mengajar pegawai yang lebih muda, memastikan transfer pengetahuan dan keberlanjutan praktik kerja yang efektif.



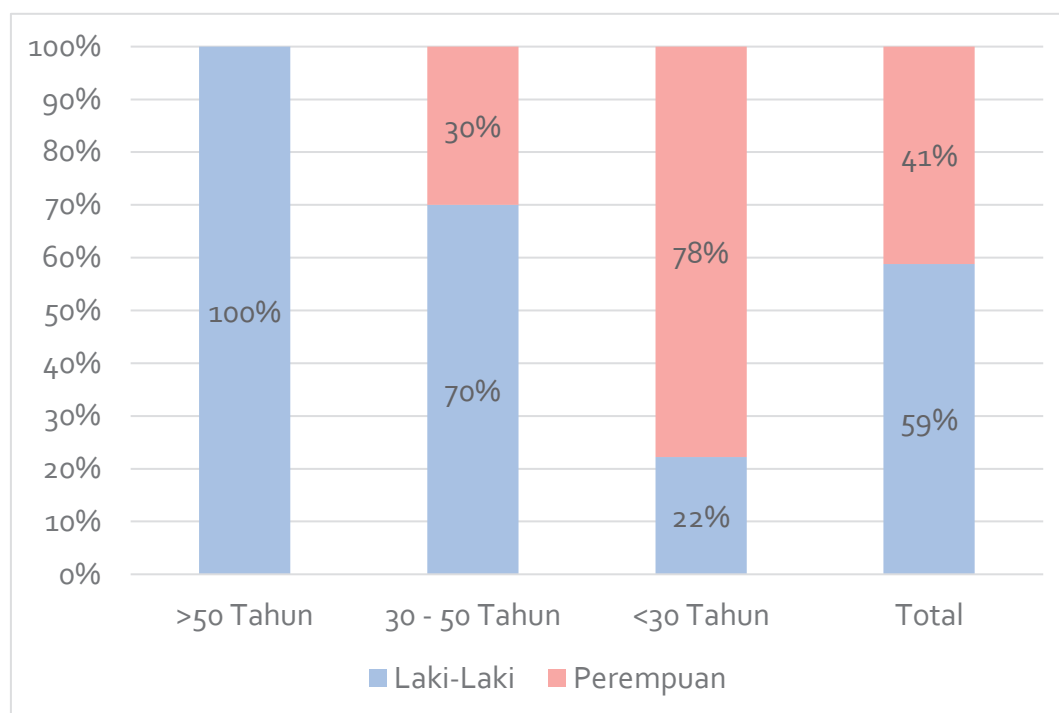
Gambar III.4. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia

Sementara itu, pegawai yang berusia di atas 50 tahun hanya mencakup 4% dari keseluruhan tenaga kerja, berjumlah 2 orang. Meski jumlahnya terbatas, kelompok usia ini membawa pengalaman yang tak ternilai, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang sejarah dan evolusi organisasi. Mereka sering menjadi sumber pengetahuan institusional yang berharga dan berperan sebagai penasihat strategis dalam organisasi. Keterlibatan mereka penting untuk memastikan konsistensi dan stabilitas dalam kebijakan dan praktik organisasi.

Analisis demografis pegawai Direktorat PPIP tidak hanya terbatas pada aspek usia, tetapi juga melibatkan komponen gender. Mengkaji distribusi gender dalam berbagai kelompok usia

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman dan inklusivitas di tempat kerja. Keseimbangan gender, terutama dalam konteks usia, membawa perspektif yang lebih beragam dan dapat meningkatkan dinamika kerja tim serta keputusan organisasi.

Pada kelompok usia di bawah 30 tahun, menunjukkan dominasi perempuan yang signifikan, di mana 78% adalah perempuan dan hanya 22% laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pada level entry atau awal karier, Direktorat PPIP telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perekrutan. Kehadiran perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki di kalangan pegawai muda ini mengindikasikan adanya kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan kerja.



Gambar III.5. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Kelompok usia antara 30 hingga 50 tahun menunjukkan dominasi laki-laki yang signifikan, di mana 70% adalah laki-laki dan hanya 30% perempuan, dengan jumlah absolut 28 laki-laki dan 12 perempuan. Perbedaan ini mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam konteks karier menengah, yang seringkali berkaitan dengan keseimbangan antara tanggung jawab profesional dan pribadi. Meskipun demikian, kehadiran perempuan dalam kelompok ini penting karena mereka membawa perspektif yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi signifikan pada proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Direktorat PPIP dapat meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan inklusif untuk perempuan, khususnya dalam mendukung karier jangka panjang mereka.

Pada kelompok usia di atas 50 tahun, proporsi gender kembali didominasi oleh perempuan, sebanyak 100% perempuan. Ini menunjukkan bahwa, perempuan dalam kelompok usia ini memiliki peran yang cukup kuat dalam organisasi. Hal ini bisa mencerminkan pengalaman dan ketahanan karier yang luar biasa dari perempuan-perempuan senior ini, yang telah berhasil menavigasi berbagai tantangan karier. Kehadiran mereka dapat menjadi sumber inspirasi dan peran model bagi generasi muda, menunjukkan bahwa kesuksesan profesional dan longevitas bisa dicapai oleh perempuan di lingkungan kerja ini.

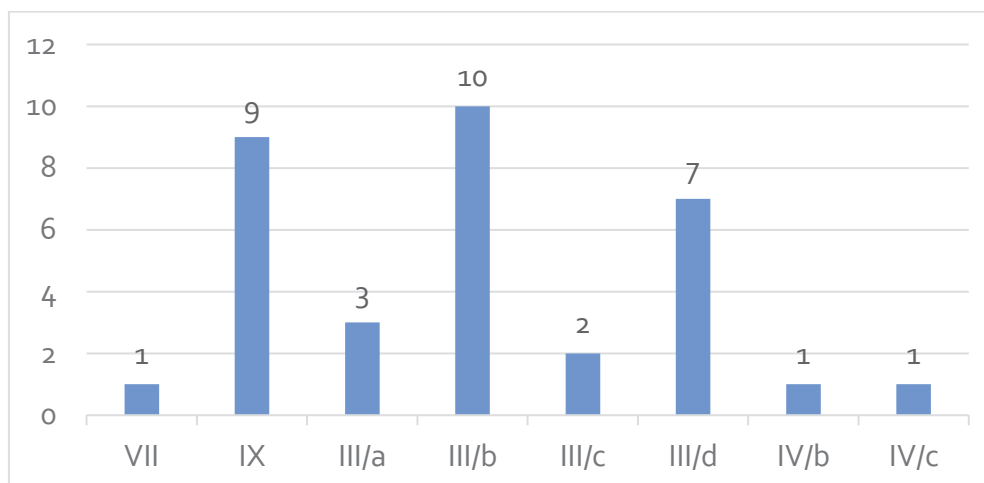
Dari analisis ini, terlihat bahwa Direktorat PPIP memiliki distribusi usia yang beragam. Diversitas usia ini menguntungkan karena setiap kelompok usia membawa perspektif, keterampilan, dan pengalaman yang unik ke dalam organisasi. Untuk memanfaatkan kekuatan dari setiap kelompok, PPIP dapat mengadopsi strategi yang berfokus pada kolaborasi lintas generasi. Misalnya, program mentor-mentee antara pegawai senior dan junior dapat menjadi sarana efektif untuk transfer pengetahuan. Selain itu, pengembangan pelatihan yang disesuaikan untuk setiap kelompok usia akan membantu memaksimalkan potensi mereka.

Kombinasi antara kekuatan, inovasi, dan pengalaman dari semua kelompok usia ini, jika dikelola dengan baik, akan menjadikan Direktorat PPIP sebuah organisasi yang resilien dan adaptif. Dengan memahami dan menghargai kontribusi setiap kelompok usia, PPIP dapat membangun lingkungan kerja yang inklusif dan produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi secara keseluruhan.

III.1.3. SDM Berdasarkan Golongan

Distribusi golongan pegawai pada Direktorat PPIP memberikan gambaran mengenai struktur kepangkatan dan tingkat profesionalisme dalam lingkungan kerja. Menilik klasifikasi golongan pegawai di Direktorat PPIP, terdapat variasi antara pegawai dengan status PPPK dan PNS. Golongan VII dan IX, yang secara eksklusif diperuntukkan bagi PPPK, mencakup 29% dari total ASN, menunjukkan penerimaan dan integrasi tenaga kerja kontrak dalam struktur organisasi yang lebih luas.

Di sisi lain, golongan III/b mendominasi dengan proporsi 29%, diikuti oleh golongan III/d yang mencakup 21%. Kehadiran yang kuat dari pegawai di golongan III menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai PPIP berada pada tingkat menengah dalam hierarki pangkat. Golongan ini umumnya mencakup individu yang telah mengumpulkan pengalaman signifikan dan memiliki keahlian khusus, yang kritikal dalam pelaksanaan dan manajemen proyek infrastruktur.



Gambar III.6. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan

Golongan III/a dan III/c, yang masing-masing menyumbang 9% dan 6%, melengkapi representasi golongan menengah. Keterwakilan yang merata dalam golongan-golongan ini menandakan adanya kesinambungan dalam pengembangan karier dan penerapan keahlian di Direktorat PPIP. Ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mengembangkan potensi pegawainya melalui berbagai tingkatan keahlian dan tanggung jawab.

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada golongan IV (IV/b, dan IV/c), masing-masing dengan kontribusi 3%. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan pegawai di golongan ini sangat penting. Ini mencakup individu-individu yang berada pada posisi senior, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kemungkinan pengambilan keputusan strategis. Kehadiran mereka tidak hanya vital dalam mengarahkan kebijakan dan strategi organisasi, tetapi juga dalam membimbing dan menginspirasi pegawai di golongan yang lebih rendah.

Pada golongan IX, yang khusus untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat proporsi laki-laki yang lebih tinggi, yakni 56%, dengan jumlah lima laki-laki dan empat perempuan. Distribusi ini mencerminkan kecenderungan umum di banyak organisasi, di mana laki-laki lebih mendominasi, terutama di golongan menengah ke atas.

Pada golongan III, yang merupakan kelompok terbesar, perempuan mencakup 45% dengan sepuluh perempuan, sementara laki-laki mendominasi dengan 55%, atau dua belas laki-laki. Sama halnya dengan distribusi pada PPPK, yang mencerminkan kecenderungan umum di banyak organisasi, di mana laki-laki lebih mendominasi, terutama di golongan menengah ke atas. Namun, proporsi perempuan yang signifikan di golongan ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengurangi kesenjangan gender, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

Dalam golongan IV, terdapat keterwakilan perempuan sebesar 100%, dengan dua perempuan dan tanpa kehadiran laki-laki. Kondisi ini langka dan patut dicatat sebagai contoh kemajuan

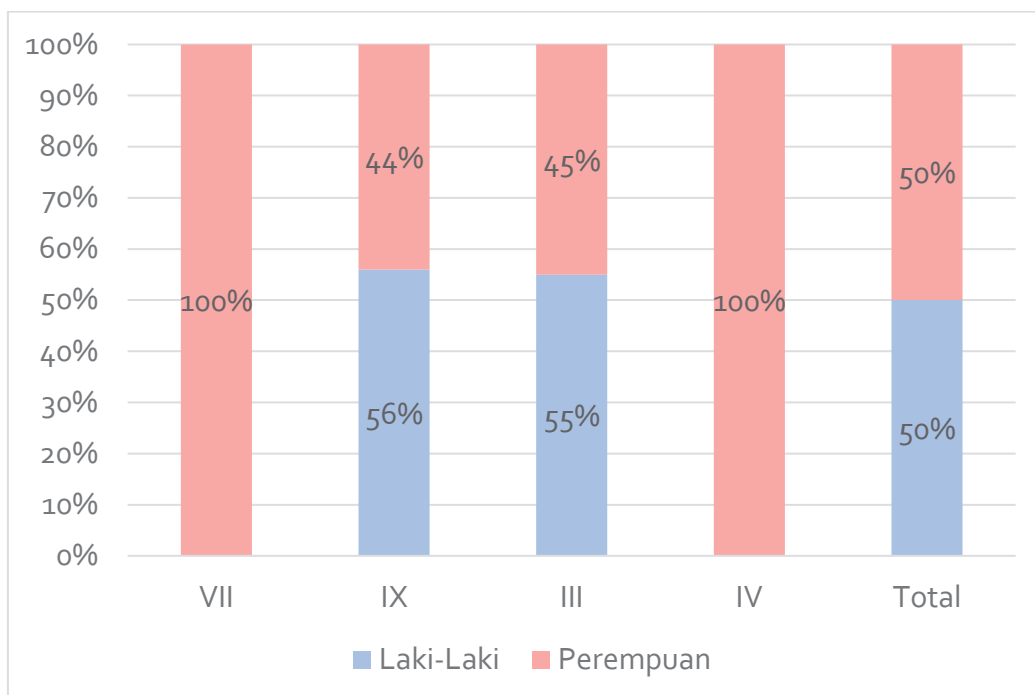
dalam pemberdayaan perempuan, terutama di tingkat senior. Kehadiran perempuan secara eksklusif di golongan ini membuktikan adanya kemajuan nyata dalam mendorong kesetaraan gender, sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki dalam mengisi posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Dari perspektif pengembangan karir, data ini memberikan indikasi bahwa Direktorat PPIP telah berusaha mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Upaya ini penting tidak hanya dalam konteks keadilan sosial, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan kerja yang beragam, di mana berbagai perspektif dan keahlian dapat dikolaborasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, keberadaan kesenjangan gender, terutama di golongan tengah, menunjukkan perlunya strategi yang lebih terfokus untuk mempertahankan talenta perempuan di semua level organisasi. Direktorat PPIP dapat mengembangkan program mentorship, pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, dan inisiatif lain yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam peran kepemimpinan.

Dalam konteks yang lebih luas, kesetaraan gender di tempat kerja bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi penuh sumber daya manusia. Organisasi yang mampu memanfaatkan keahlian dan perspektif kedua gender cenderung lebih inovatif, adaptif, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Untuk Direktorat PPIP, terus mempromosikan kesetaraan gender berarti tidak hanya memenuhi komitmen sosialnya, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasional.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, distribusi golongan pegawai di Direktorat PPIP menunjukkan pola yang sehat. Dengan dominasi golongan menengah, terlihat bahwa ada ruang yang cukup bagi pegawai untuk berkembang dan naik pangkat. Hal ini penting dalam menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Untuk mendukung dinamika ini, Direktorat PPIP dapat melanjutkan dan meningkatkan inisiatifnya dalam pengembangan profesional, seperti pelatihan, seminar, dan program *mentorship*.



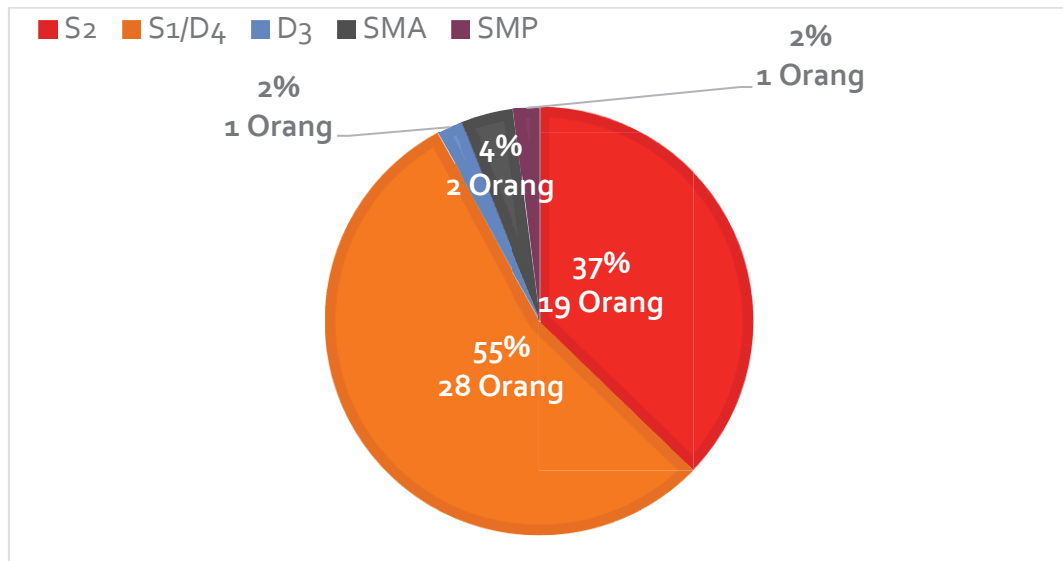
Gambar III.7. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Selain itu, integrasi pegawai PPPK dalam golongan VII dan IX menunjukkan adaptasi organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja yang fleksibel dan dinamis. Keberadaan mereka menambah keanekaragaman dalam struktur kepegawaian, yang dapat memperkaya kolaborasi dan inovasi. Direktorat PPIP dihadapkan pada tugas untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang ada mendukung kinerja dan kesejahteraan semua pegawai, terlepas dari status kepegawaian mereka.

III.1.4. SDM Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh dalam pembentukan sumber daya manusia sebuah organisasi. Di Direktorat PPIP, distribusi tingkat pendidikan pegawainya mencerminkan komitmen organisasi dalam mempertahankan standar kompetensi yang tinggi. Dari data yang tersedia, kita dapat mengamati variasi tingkat pendidikan, mulai dari SMP hingga S2, yang memberikan gambaran mengenai keragaman latar belakang pendidikan dalam organisasi.

Terdapat satu pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP. Meskipun jumlahnya kecil, keberadaan pegawai dengan pendidikan dasar ini menunjukkan inklusivitas dan kesempatan yang diberikan Direktorat PPIP kepada berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMP mungkin berperan dalam tugas-tugas yang lebih praktis, namun tetap penting dalam mendukung operasional organisasi secara keseluruhan.



Gambar III.8. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebanyak satu pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMP dan dua pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP tidak hanya fokus pada tingkat pendidikan tinggi tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kualifikasi menengah untuk berkembang dan memberikan kontribusi. Pegawai dengan pendidikan SMP dan SMA ini mungkin menempati posisi yang membutuhkan keterampilan teknis atau administratif yang solid.

Terdapat satu pegawai dengan latar belakang D3. Pendidikan diploma tiga ini memberikan kemampuan praktis yang membantu kerja organisasi.

Mayoritas pegawai Direktorat PPIP memiliki latar belakang pendidikan S1/D4, dengan total 28 orang. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai di organisasi ini memiliki pendidikan formal yang cukup tinggi. Pendidikan sarjana memberikan dasar pengetahuan yang kuat dan kemampuan analitis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan kompleks dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Kehadiran banyak lulusan S1/D4 juga mencerminkan standar tinggi yang diadopsi Direktorat PPIP dalam merekrut pegawainya, memastikan bahwa organisasi ini dihuni oleh individu yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan.

Lebih lanjut, ada 19 pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan S2. Ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP menaruh nilai tinggi pada pendidikan lanjutan dan spesialisasi. Pegawai dengan pendidikan S2 kemungkinan besar menempati posisi strategis, di mana keahlian khusus dan pengetahuan mendalam sangat diperlukan. Kehadiran pegawai dengan pendidikan S2 menggarisbawahi komitmen Direktorat PPIP dalam menerapkan praktik-praktik terbaik dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

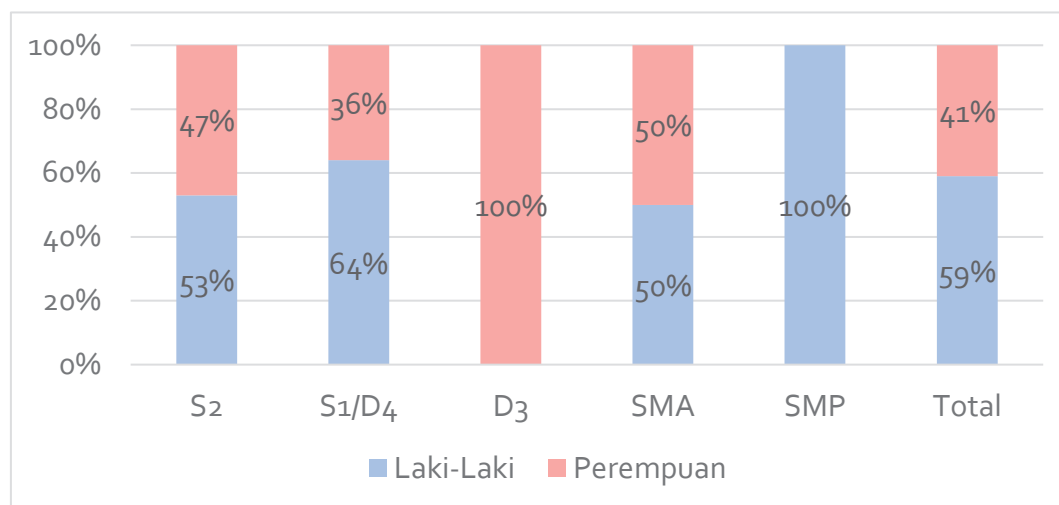
Analisis distribusi gender dalam tingkat pendidikan pegawai di Direktorat PPIP mengungkapkan wawasan tentang kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja. Persebaran ini tidak hanya mencerminkan komposisi tenaga kerja saat ini tetapi juga menyoroti bagaimana pendidikan dan kesempatan berkembang di antara pegawai perempuan dan laki-laki.

Dalam kategori pendidikan SMP, terdapat satu pegawai laki-laki, dan tidak ada pegawai perempuan. Meskipun jumlahnya terbatas, ini menunjukkan bahwa peluang bagi individu dengan pendidikan dasar untuk berkontribusi dalam organisasi terbuka bagi semua gender, meski dalam kasus ini diwakili oleh laki-laki.

Pada tingkat SMA, proporsi gender menunjukkan keseimbangan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan, dimana masing-masing memiliki jumlah satu orang pegawai. Angka ini menunjukkan adanya keseimbangan gender di Direktorat PPIP.

Kategori tingkat D3, memiliki satu pegawai perempuan dimana keberadaan perempuan di tingkat ini menandakan kesediaan Direktorat PPIP untuk memberdayakan perempuan di semua tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Memasuki tingkat S1/D4, terjadi peningkatan proporsi gender, dengan 36% perempuan dan 64% laki-laki. Dari total 28 pegawai S1/D4, 10 di antaranya adalah perempuan. Hal ini menandakan bahwa Direktorat PPIP memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, terutama di tingkat pendidikan sarjana, yang merupakan mayoritas kualifikasi pegawainya. Kehadiran signifikan perempuan dengan pendidikan S1/D4 menunjukkan bahwa mereka memiliki akses yang setara ke posisi-posisi yang memerlukan kualifikasi tinggi, memberikan mereka peluang untuk berkontribusi secara substansial dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.



Gambar III.9. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Di tingkat S2, terjadi dominasi oleh laki-laki, dengan 53% pegawai S2 adalah laki-laki. Dari 19 pegawai dengan pendidikan S2, 9 adalah perempuan dan 10 laki-laki. Ini merupakan indikasi positif mengenai keterwakilan perempuan di posisi-posisi yang memerlukan keahlian dan pengetahuan spesialis, menandakan kemajuan Direktorat PPIP dalam mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja yang lebih tinggi dan spesialis.

Analisis ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah membuat kemajuan signifikan dalam mendorong inklusi dan kesetaraan gender di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mencapai keseimbangan yang lebih adil di tingkat pendidikan yang lebih rendah, tren umumnya positif.

Keberagaman gender di berbagai tingkat pendidikan menciptakan lingkungan kerja yang kaya akan perspektif dan pengalaman. Dengan memiliki pegawai perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, Direktorat PPIP memperkuat kemampuannya dalam menangani isu-isu yang kompleks dengan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Hal ini sangat penting dalam dunia pembiayaan infrastruktur permukiman, di mana keputusan dan strategi yang efektif sering kali memerlukan pemahaman yang luas dan beragam.

Selain itu, keterwakilan perempuan yang meningkat di tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan komitmen Direktorat PPIP dalam mendukung pengembangan karier perempuan. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya memperhatikan rekrutmen perempuan tetapi juga pengembangan karier mereka, termasuk pendidikan lanjutan dan posisi kepemimpinan.

Keragaman tingkat pendidikan di Direktorat PPIP mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan sumber daya manusia. Setiap tingkat pendidikan memberikan perspektif dan keterampilan unik yang, ketika digabungkan, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pegawai dengan pendidikan dasar dan menengah memberikan dukungan penting dalam operasional, sementara mereka dengan pendidikan tinggi memberikan wawasan strategis dan inovatif.

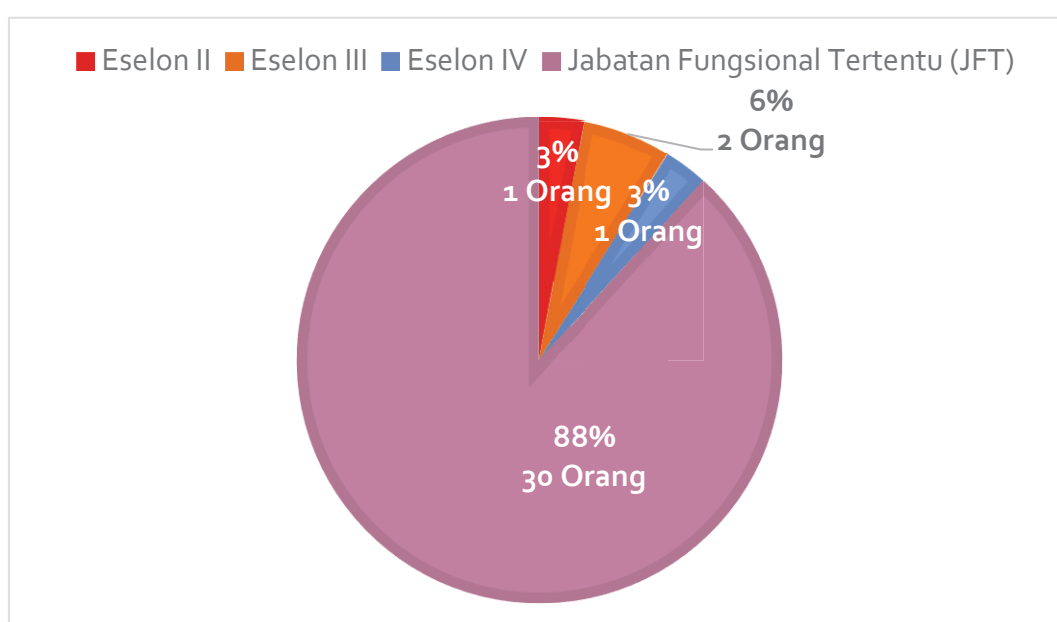
Keberagaman ini juga mencerminkan komitmen Direktorat PPIP terhadap pembangunan yang inklusif. Dengan memberikan kesempatan kepada individu dari berbagai latar belakang pendidikan, organisasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitasnya, tetapi juga memperkaya budaya kerja dengan keberagaman pengalaman dan perspektif. Hal ini penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur permukiman, di mana solusi yang inovatif dan beragam sering kali diperlukan.

Selain itu, keberagaman tingkat pendidikan ini membuka peluang untuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antar pegawai. Pegawai dengan pendidikan formal yang lebih tinggi

dapat berbagi wawasan dan keterampilan mereka, sementara mereka yang memiliki pengalaman praktis memberikan perspektif yang berbeda. Interaksi semacam ini mendorong budaya belajar dan kolaborasi yang kaya, yang sangat penting untuk pertumbuhan organisasi yang dinamis dan adaptif seperti Direktorat PPIP.

Dalam konteks yang lebih luas, distribusi pendidikan pegawai di Direktorat PPIP menggambarkan sebuah organisasi yang menghargai pengetahuan dan pembelajaran. Dengan memastikan bahwa pegawainya memiliki beragam latar belakang pendidikan, Direktorat PPIP tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan

III.1.5. SDM Berdasarkan Jabatan



Gambar III.10. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan

Struktur jabatan dalam sebuah organisasi mencerminkan mekanisme kerja dan hierarki kepemimpinan yang ada.

Di Direktorat PPIP, struktur jabatan yang diadopsi terdiri dari beberapa tingkatan yang mencakup Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta posisi Eselon II, III, dan IV. Distribusi pegawai pada masing-masing jenis jabatan ini memberikan gambaran tentang fokus organisasi dan struktur kepemimpinan yang diterapkannya.

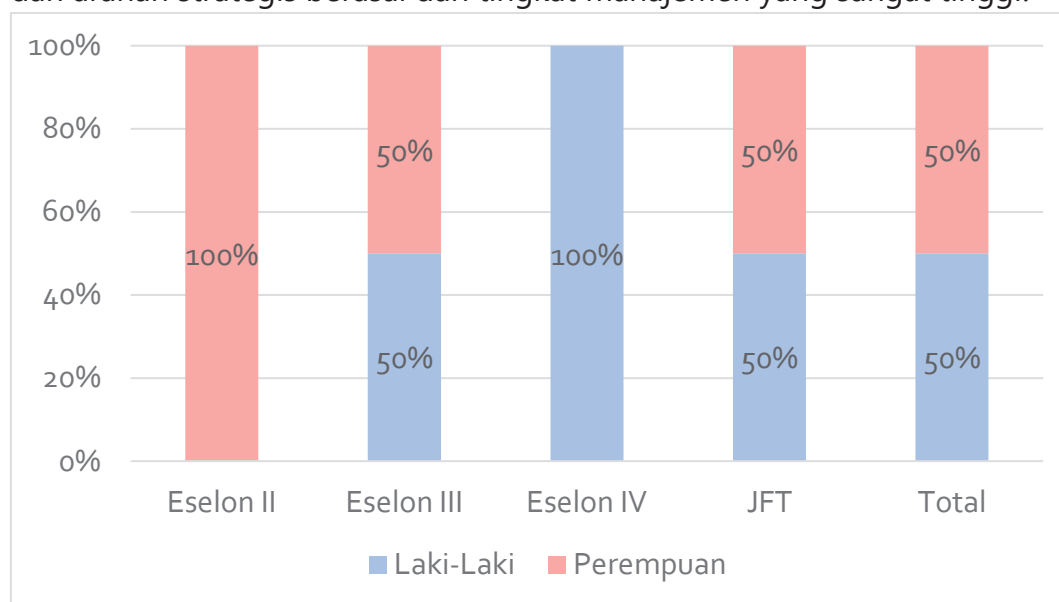
Paling dominan adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diisi oleh 30 pegawai, menyumbang 88% dari total ASN. Kehadiran JFT dalam proporsi yang besar ini menandakan bahwa Direktorat PPIP memberikan penekanan kuat pada spesialisasi dan keahlian teknis. Pegawai pada jabatan fungsional ini mungkin mencakup berbagai spesialisasi yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman, seperti perencanaan kota, teknik

sipil, manajemen keuangan, hingga analisis kebijakan. Dominasi JFT dalam struktur organisasi menunjukkan bahwa Direktorat PPIP mengutamakan kompetensi teknis dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Selanjutnya, pada tingkatan Eselon IV, terdapat 1 pegawai yang mewakili 3% dari total ASN. Posisi ini biasanya diisi oleh individu yang bertanggung jawab atas sub-unit atau seksi dalam sebuah departemen. Kehadiran pegawai Eselon IV, meskipun jumlahnya terbatas, menunjukkan bahwa terdapat tingkat manajerial yang mengawasi operasional sehari-hari dan memastikan bahwa kebijakan dan arahan organisasi diimplementasikan dengan efektif.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, Eselon III diisi oleh 2 pegawai, yang juga mengambil 6% dari total jumlah ASN. Jabatan ini biasanya menempatkan seseorang dalam posisi kepemimpinan yang lebih besar, seringkali dengan tanggung jawab atas satu departemen atau divisi. Individu pada posisi Eselon III memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan sumber daya. Mereka berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan operasional, memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang disusun oleh manajemen puncak dijalankan dengan baik.

Puncak struktur hierarki diisi oleh Eselon II, dengan hanya 1 pegawai yang mewakili 3% dari total ASN. Posisi ini biasanya diisi oleh individu yang memegang peran kunci dalam organisasi, seperti direktur departemen atau divisi. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan besar, penentuan strategi, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Keberadaan hanya satu pegawai pada tingkatan ini menegaskan struktur kepemimpinan yang terpusat di Direktorat PPIP, di mana keputusan penting dan arahan strategis berasal dari tingkat manajemen yang sangat tinggi.



Gambar III.11. Distribusi Pegawai Direktorat PPIP Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin

Analisis distribusi gender dalam struktur jabatan di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) mengungkapkan aspek penting lain dari organisasi ini. Melihat lebih dekat pada perbandingan gender di setiap tingkatan jabatan memberikan wawasan tentang keterwakilan dan keseimbangan gender dalam organisasi ini, yang berperan penting dalam pembentukan budaya kerja dan dinamika organisasi.

Pada tingkatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), terdapat keseimbangan antara pegawai perempuan dan laki-laki. Dari 30 pegawai JFT, 15 adalah perempuan (50%) dan 15 adalah laki-laki (50%). Keseimbangan ini menunjukkan bahwa dalam hal perekrutan dan pengembangan karier di bidang teknis dan spesialisasi, Direktorat PPIP telah menerapkan pendekatan yang relatif egaliter. Keterwakilan perempuan yang signifikan pada jabatan ini menandakan adanya peluang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam aspek teknis dan profesional organisasi. Keterlibatan perempuan dalam JFT juga bisa meningkatkan keragaman perspektif dan pendekatan dalam pengelolaan dan pemecahan masalah, yang penting untuk dinamika inovatif dan adaptif dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

Namun, pola distribusi gender berbeda pada tingkat Eselon. Pada tingkat Eselon IV, jabatan ini diisi sepenuhnya oleh laki-laki (100%). Sementara itu, pada tingkat Eselon III, terdapat keseimbangan gender di mana pegawai perempuan sebanyak satu orang dan pegawai laki-laki sebanyak satu orang, dan Eselon II sepenuhnya diisi oleh perempuan (100%). Kondisi ini mencerminkan adanya divergensi yang mencolok dalam keterwakilan gender pada tingkatan manajerial. Ketidadaan perempuan pada tingkat Eselon IV dan dominasi perempuan pada tingkat Eselon III dan II bisa mencerminkan berbagai dinamika, termasuk pola perekrutan, kesempatan promosi, dan mungkin dinamika sosial budaya yang mempengaruhi pilihan karier.

Dominasi perempuan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi (Eselon II dan III) menunjukkan bahwa di Direktorat PPIP, perempuan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan strategis. Ini adalah indikasi yang positif dari pemberdayaan perempuan dan mungkin menunjukkan sebuah lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karier perempuan. Keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan tinggi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan panutan bagi pegawai perempuan lainnya di organisasi, memperkuat peran mereka dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Distribusi pegawai menurut jenis jabatan di Direktorat PPIP menggambarkan organisasi yang mengedepankan keahlian teknis dan profesional, dengan struktur kepemimpinan yang jelas dan terpusat. Dominasi JFT menunjukkan fokus pada keahlian spesifik, yang sangat penting dalam pengelolaan infrastruktur permukiman. Sementara itu, keberadaan pegawai pada

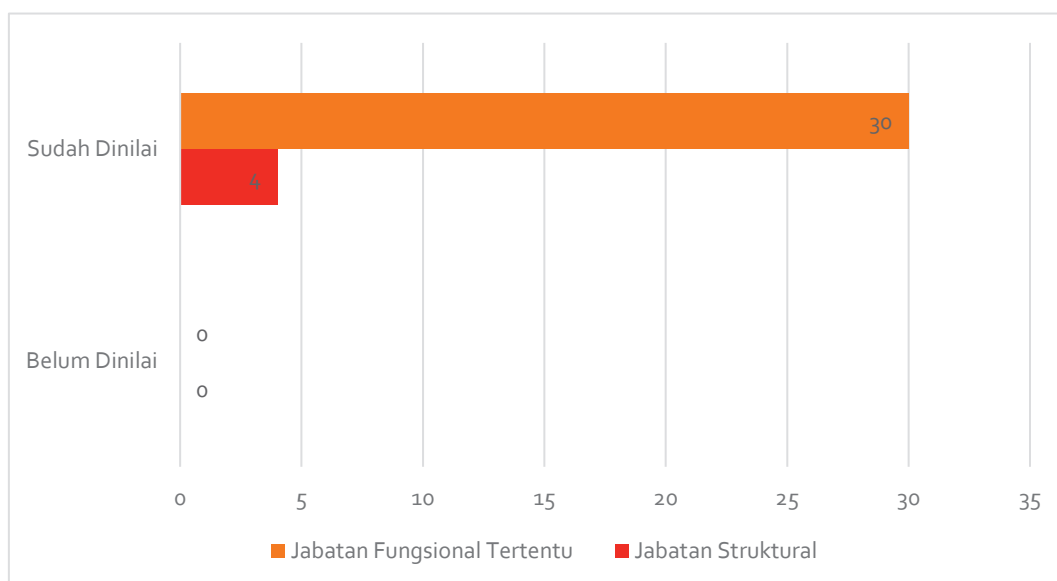
tingkat Eselon II hingga IV, meskipun jumlahnya terbatas, menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan organisasi.

Struktur ini mencerminkan kebutuhan Direktorat PPIP untuk mengintegrasikan keahlian teknis dengan manajemen yang efisien. Sementara mayoritas tenaga kerja berfokus pada tugas-tugas teknis dan spesialis, adanya tingkatan manajerial yang berbeda memastikan bahwa ada koordinasi, supervisi, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan.

Struktur jabatan yang terdapat di Direktorat PPIP juga mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kontrol. Dengan banyaknya JFT, organisasi cenderung lebih fleksibel dan dinamis, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan teknis yang spesifik. Di sisi lain, keberadaan Eselon II hingga IV, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, menjamin bahwa terdapat kontrol dan arahan yang cukup dari tingkat manajerial untuk memastikan keselarasan dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.

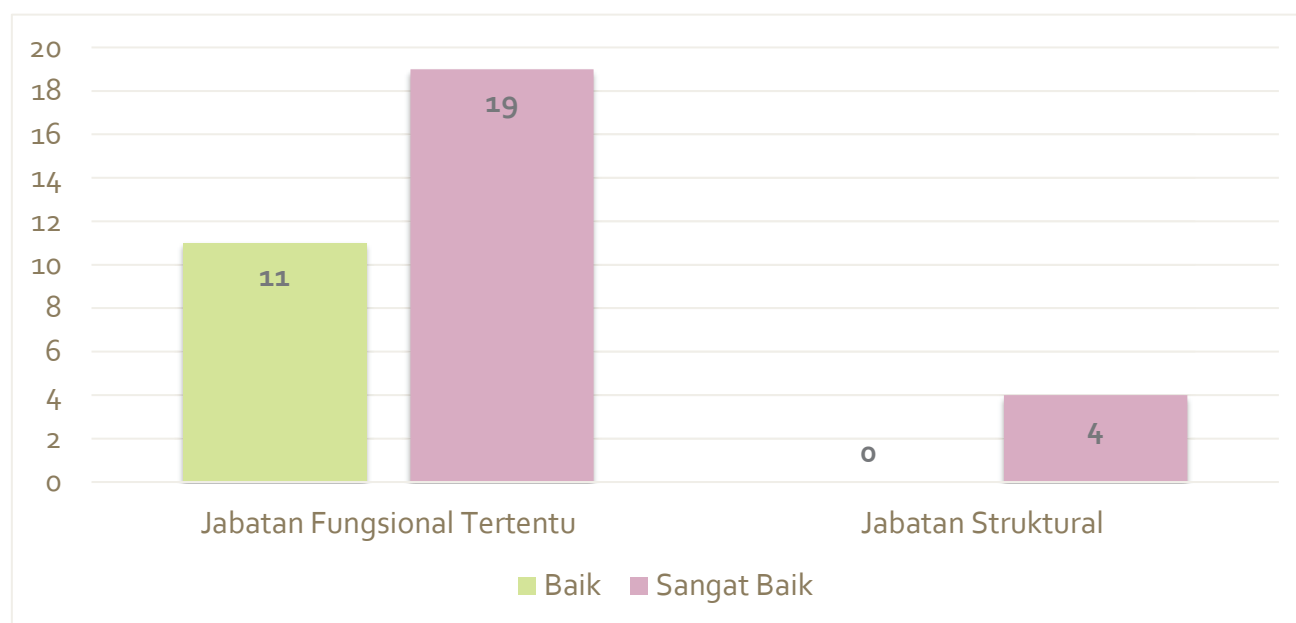
III.1.6. Penerapan *Rewards* dan *Punishment*

Sejak tahun 2024, sebuah langkah penting dalam manajemen sumber daya manusia telah diimplementasikan, yaitu penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang terkait dengan pemberian tunjangan kinerja. Sistem ini telah diberlakukan bagi pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat PPIP.



Gambar III.12. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Status Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023

Penerapan sistem *reward* dan *punishment* ini berlandaskan pada dasar penilaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari periode sebelumnya. SKP menjadi alat ukur yang penting dan objektif dalam menentukan kinerja setiap pegawai. Melalui sistem ini, pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan atau *reward*, sedangkan mereka yang kinerjanya di bawah standar akan menerima *punishment* atau sanksi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka, sekaligus menjadi sarana untuk menilai dan meningkatkan kualitas layanan publik.



Gambar III.13. Jumlah Pegawai ASN Direktorat PPIP Berdasarkan Predikat Penilaian SKP Periode Semester 1 Tahun 2023

Hingga penerbitan laporan kinerja terkini, SKP seluruh ASN Direktorat PPIP untuk periode Triwulan IV tahun 2024 belum dilakukan penilaian. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi sistem penilaian ini, dapat diambil contoh dari penilaian SKP ASN Direktorat PPIP untuk Triwulan III tahun 2024. Dalam periode tersebut, seluruh ASN telah dinilai, sebanyak 11 pegawai mendapatkan predikat "BAIK" dan sebanyak 23 pegawai mendapatkan predikat "SANGAT BAIK". Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dan usaha yang baik dari pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Predikat ini menjadi indikator positif bahwa pegawai Direktorat PPIP memiliki kompetensi dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sistem *reward* dan *punishment* berbasis kinerja ini, jika diterapkan dengan efektif, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas kerja ASN secara keseluruhan. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara umum, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh karena

itu, sangat penting untuk memastikan bahwa proses penilaian SKP dilakukan secara adil, transparan, dan tepat waktu untuk menjamin keberhasilan penerapan sistem ini.

Penerapan sistem *reward* dan *punishment* ini merupakan langkah progresif dalam manajemen sumber daya manusia di lingkungan Direktorat PPIP. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, sistem ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan standar kinerja dan motivasi pegawai, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pada tanggal 28 Agustus 2024, Direktorat PPIP mengusulkan tiga pegawai sebagai Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR.

Arrum Dyah Apriliana, Atika Sisilia dan Rina Erfina adalah Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama di Direktorat PPIP. Mereka merupakan pegawai yang diusulkan sebagai Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR. Para pegawai ini telah menunjukkan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Tugas-tugas yang mereka emban selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, kedisiplinan dalam kehadiran sehari-hari pun selalu dijunjung tinggi oleh para pegawai ini.

Pengusulan Calon Pegawai Muda Teladan Kementerian PUPR kepada ketiga individu ini tidak hanya merupakan pengakuan atas prestasi dan kedisiplinan mereka, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh anggota Direktorat PPIP untuk terus berinovasi, disiplin dan bekerja keras. Ketiga pegawai ini telah menjadi contoh nyata bahwa kerja keras dan komitmen terhadap kualitas dapat membawa pengakuan serta perubahan positif dalam organisasi dan sektor yang mereka layani.

III.2. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi mana pun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus terencana. Direktorat PPIP telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik (*software*). Rekapitulasi Barang Milik Negara (BMN) sarana dan prasarana Direktorat PPIP tersaji pada Tabel III.1.

Berdasarkan inventarisasi terkini, tercatat sejumlah perangkat yang menjadi pusat kegiatan di direktorat. Meja kerja menempati posisi teratas dalam daftar ini, dengan total 29 unit, dengan kondisi baik pada seluruh unit.

Selanjutnya Komputer (PC) menempati posisi kedua dalam daftar ini, dengan total 27 unit. Dari jumlah tersebut, 22 unit berada dalam kondisi baik, menunjukkan keandalan dalam mendukung tugas-tugas harian. Namun, terdapat 4 unit yang mengalami kerusakan ringan dan 1 unit lainnya rusak berat, menandakan perlunya tindakan pemeliharaan yang lebih intensif atau penggantian perangkat untuk memastikan kontinuitas kerja yang efektif.

Sementara itu, laptop yang berjumlah 6 unit, dengan 4 di antaranya dalam kondisi baik, merupakan alat vital bagi mobilitas dan fleksibilitas kerja karyawan. Dua unit yang mengalami kerusakan ringan perlu segera ditangani, mengingat peran mereka yang krusial dalam mendukung tugas di luar kantor atau dalam situasi yang memerlukan portabilitas.

Tabel III.1. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Komputer (PC)	27	22	4	1
2	Laptop	6	4	2	0
3	Printer	15	9	5	1
4	Scanner	2	1	1	0
5	Kamera & Lensa	4	4	0	0
6	Meja Kerja	29	29	0	0

Peralatan pendukung lainnya seperti printer, yang jumlahnya 15 unit, mayoritas dalam kondisi baik (9 unit). Ini menunjukkan keefektifan dalam manajemen aset dan pemeliharaan rutin. Terdapat 5 unit yang mengalami kerusakan ringan dan 1 unit mengalami kerusakan berat, dan ini memerlukan perhatian untuk menjaga efisiensi operasional secara keseluruhan.

Scanner, meskipun jumlahnya tidak sebanyak printer, memiliki peran yang tidak kalah penting. Dari 2 unit yang ada, 1 di antaranya berada dalam kondisi baik, sedangkan 1 unit lainnya mengalami kerusakan ringan. Ini menunjukkan sebuah area yang memerlukan perhatian khusus, mengingat pentingnya scanner dalam digitalisasi dokumen dan pengarsipan data.

Terakhir, kamera dan lensa yang berjumlah 4 unit semuanya dalam kondisi baik. Ini mencerminkan manajemen aset yang efektif dalam menjaga peralatan yang mungkin tidak sering digunakan tapi memiliki peran penting dalam dokumentasi kegiatan direktorat.

Selanjutnya, komputer (PC) memiliki jumlah total 27 unit dengan pola perolehan adanya peningkatan signifikan dalam perolehan baru pada tahun 2020 dan 2021, dengan total 6 unit di tahun 2020 dan 9 unit di tahun 2021. Ini menunjukkan adanya upaya pembaruan perangkat

secara berkala, yang mungkin dilakukan untuk menggantikan unit yang rusak atau untuk menambah kapasitas seiring dengan pertumbuhan kebutuhan operasional direktorat.

Tabel III.2. Data Sarana dan Prasarana Direktorat PPIP Berdasarkan Tahun Perolehan

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Komputer (PC)	27	3	2	1	3	2	6	9	1	0	0
2	Laptop	6	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1
3	Printer	15	4	3	0	5	1	2	0	0	0	0
4	Scanner	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Kamera & Lensa	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
6	Meja Kerja	29	0	0	12	0	14	0	0	3	0	0
Total			9	6	14	8	17	12	9	5	2	1

Sumber: Direktorat PPIP

Sementara itu, laptop, yang jumlah totalnya 6 unit, menunjukkan pola perolehan yang lebih terkonsentrasi di tahun-tahun terkini, yaitu di 2023 dengan 2 unit dan 2024 dengan 1 unit. Hal ini dapat mencerminkan adanya inisiatif untuk menyediakan perangkat yang lebih portabel bagi staf, sesuai dengan tren kerja yang lebih dinamis dan *mobile*.

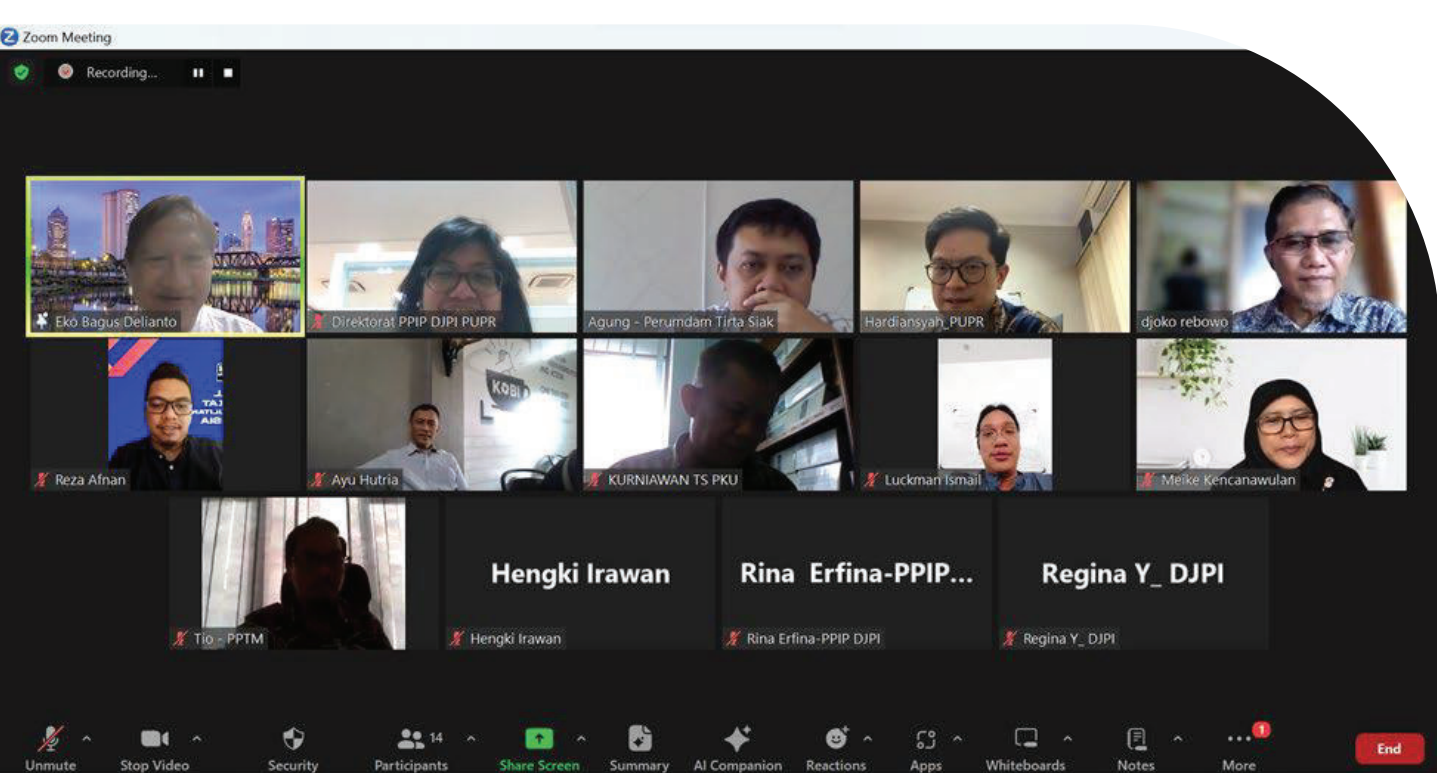
Untuk printer, dengan total 15 unit, terjadi penambahan yang signifikan pada tahun 2018, dengan 5 unit diperoleh di tahun tersebut. Ini mungkin menandakan adanya peningkatan kebutuhan untuk pencetakan dokumen atau penggantian unit yang sudah tidak efisien.

Pada perangkat scanner, jumlah totalnya adalah 2 unit. Pola perolehan ini mungkin menunjukkan bahwa kebutuhan akan scanner tidak sebesar perangkat lain, namun tetap ada kebutuhan untuk pembaruan atau penambahan unit untuk menunjang operasional.

Untuk kamera dan lensa, semua 4 unit diperoleh pada tahun 2020. Ini mungkin menunjukkan adanya proyek khusus atau inisiatif dokumentasi yang membutuhkan peralatan berkualitas tinggi di tahun tersebut. Melihat keseluruhan data, terlihat bahwa tahun-tahun seperti 2019 dan 2020 adalah periode di mana terjadi penambahan BMN yang cukup signifikan. Hal ini bisa jadi merupakan refleksi dari adanya rencana strategis tertentu di direktorat, atau sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan operasional.

Analisis data tahun perolehan ini penting untuk memahami siklus hidup aset dan merencanakan penggantian atau pembaruan perangkat. Hal ini membantu dalam merumuskan strategi anggaran yang efektif dan efisien untuk pemeliharaan dan pengadaan BMN. Dengan mempertimbangkan usia perangkat, Direktorat PPIP dapat menetapkan prioritas dalam alokasi dana, baik untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru, sehingga dapat memastikan bahwa peralatan yang digunakan selalu dalam kondisi optimal.

Pengelolaan BMN yang efektif tidak hanya mencakup pemeliharaan dan perawatan rutin, tetapi juga perencanaan strategis terkait pengadaan dan penggantian aset. Dengan memantau dan menganalisis pola perolehan BMN, Direktorat PPIP dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas operasional. Hal ini juga menunjukkan tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan dana negara, menggarisbawahi pentingnya manajemen aset yang proaktif dan terencana dengan baik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah melakukan pengelolaan BMN dengan cukup baik. Mayoritas peralatan berada dalam kondisi



Gambar III.14. Metode Rapat Daring dengan Memanfaatkan BMN Perangkat Kantor

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

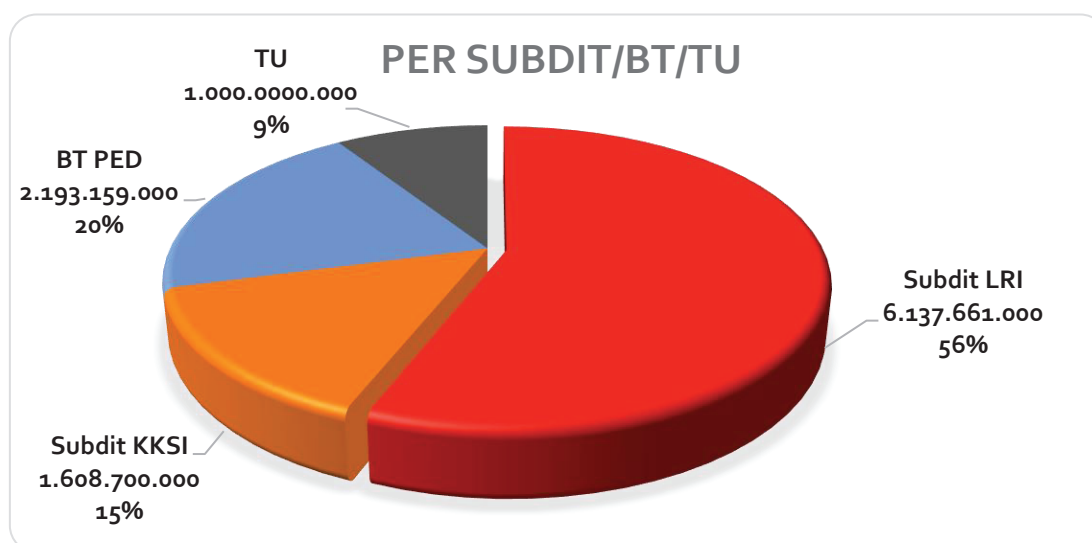
baik, menandakan adanya upaya pemeliharaan yang teratur dan penggunaan yang bertanggung jawab. Namun, terdapat juga peralatan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, yang memerlukan tindakan pemeliharaan atau penggantian. Hal ini penting untuk mencegah gangguan operasional dan memastikan bahwa seluruh aset dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Pengelolaan BMN ini tidak hanya soal menjaga keberlangsungan fungsi alat-alat tersebut, tetapi juga tentang menghargai dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara. Setiap unit yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik merepresentasikan potensi yang tidak termanfaatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi Direktorat PPIP untuk terus meningkatkan sistem pemeliharaan dan penggantian peralatan, sehingga semua aset dapat

dimanfaatkan seefisien mungkin, mendukung operasional yang lancar dan produktif. Ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset negara, yang merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

III.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dalam kerangka penyusunan anggaran dan alokasi dana, Direktorat PPIP mendapatkan alokasi pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.500.000.000. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kali pemotongan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI, seperti pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengadaan kendaraan dinas operasional DJPI, dan kegiatan Rapat Kerja. Akibatnya, dari total anggaran tersebut, hanya sebesar Rp10.939.520.000 yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPIP. Anggaran ini kemudian dialokasikan secara strategis kepada berbagai unit pelaksana dalam organisasi, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing unit dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat PPIP.



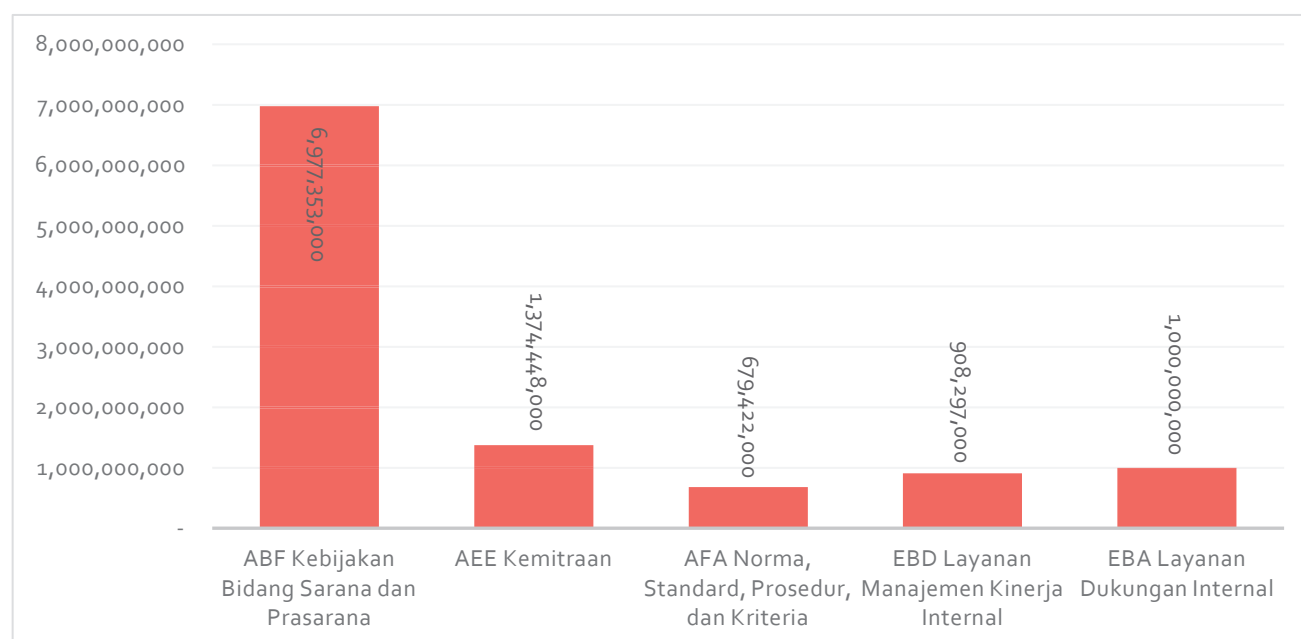
Gambar III.15. DIPA Direktorat PPIP TA 2024 Berdasarkan Unit Pelaksana

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi (LRI) menerima alokasi anggaran sebesar Rp6.137.661.000,00 (56%). Anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berfokus pada legalisasi dan pengesahan rencana investasi infrastruktur. Ini mencakup upaya-upaya seperti peninjauan ulang kebijakan investasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta proses legal formal terhadap berbagai proyek investasi. Dengan anggaran yang cukup, Subdit LRI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengesahan rencana investasi, yang merupakan langkah krusial dalam pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi (KKSII) diberikan alokasi anggaran sebesar Rp1.608.700.000,00 (15%). Anggaran ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam sektor investasi infrastruktur. Fokus utama Subdit KKSII adalah membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta memfasilitasi dialog dan kesepakatan investasi. Dengan dana ini, Subdit KKSII diharapkan dapat mengoptimalkan potensi investasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas serta keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat.

Bidang Tuas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan (BT PED) mendapatkan alokasi sebesar Rp2.193.159.000,00 (20%). Dana ini akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap berbagai proyek infrastruktur serta memberikan dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. BT PED memainkan peran penting dalam menjamin bahwa semua proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dengan alokasi anggaran ini, BT PED diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi, yang pada gilirannya akan memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur yang efektif dan efisien.

Subbagian Tata Usaha (TU) menerima alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (9%). Anggaran ini diperuntukkan untuk mendukung operasional keseluruhan Direktorat PPIP, termasuk manajemen administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan kebutuhan logistik. Peran Subbag TU sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional sehari-hari Direktorat PPIP. Dengan dana yang dialokasikan, Subbag TU diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administratif dan operasional, sehingga memungkinkan Direktorat PPIP fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur.



Gambar III.16. DIPA Direktorat PPIP TA 2023 Berdasarkan Rumpun Output

Sedangkan berdasarkan rumpun output, anggaran Direktorat PPIP terbagi ke dalam lima kategori. Kategori tersebut terdiri dari [ABF] Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, [AEE] Kemitraan, [AFA] NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, [EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal, dan [EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.977.353.000 untuk kebijakan bidang sarana dan prasarana, Direktorat PPIP menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dasar. Fokus dari alokasi ini adalah pada pengembangan kebijakan yang inovatif dan praktis, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan sosial, serta mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan, Direktorat PPIP mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.374.448.000 untuk kemitraan. Dana ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai entitas, termasuk pihak swasta, lembaga internasional, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pengembangan proyek infrastruktur, termasuk pemanfaatan sumber daya, pembiayaan, dan transfer pengetahuan.

Untuk mendukung pembiayaan infrastruktur permukiman, Direktorat PPIP mengalokasikan Rp679.422.000 untuk pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Fokus dari alokasi ini adalah untuk menetapkan standar yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini termasuk pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, serta strategi untuk memobilisasi sumber daya keuangan dari berbagai sektor.

Dengan alokasi sebesar Rp908.297.000 untuk layanan manajemen kinerja internal, Direktorat PPIP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas operasional internalnya. Hal ini mencakup pengembangan sistem evaluasi kinerja, peningkatan kapasitas SDM, dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.

Terakhir, dana sebesar Rp1.000.000.000 dialokasikan untuk layanan dukungan manajemen internal. Ini mencakup pengelolaan administratif, keuangan, SDM, dan aspek logistik yang mendukung operasional Direktorat PPIP. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menjamin kelancaran operasional harian.

III.4. Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Jumlah PSN pada Direktorat PPIP sebanyak 24 orang. Dari jumlah tersebut masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pegawai, sehingga pada tahun 2024 masih menggunakan PPPK, tenaga honorer dan Tenaga Pendukung Individual untuk memenuhi kekurangan pegawai pada Direktorat PPIP. Dengan adanya tambahan pegawai tersebut Direktorat PPIP dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, dari segi anggaran, pada tahun 2024 total anggaran pada Direktorat PPIP sebesar Rp10.939.520.000. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar 97,10% dengan capaian kinerja sebesar 101,68%. Sehingga dapat disimpulkan nilai efisiensi Direktorat PPIP sebesar 104,71%.



Gambar III.17. Peningkatan Kapasitas Kinerja Pegawai DJPI

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP pada Tahun Anggaran 2024. Akuntabilitas kinerja menjadi fokus utama dalam mengevaluasi sejauh mana Direktorat PPIP dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Dalam menghadapi dinamika pembangunan infrastruktur permukiman, akuntabilitas menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Bab ini tidak hanya memberikan gambaran holistik mengenai pencapaian kinerja, tetapi juga akan merinci capaian spesifik Direktorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tersebut.

IV.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk mengelola sistem yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan dengan regulasi yang berlaku. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, jujur, objektif, transparan, dan inovatif akan menjadi katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Hal ini membutuhkan pemuktakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan. Capaian kinerja Direktorat PPIP tahun 2024 diterjemahkan ke dalam perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja.

Tabel IV.1. Hasil Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%	101,68%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00%	25,42%

Capaian kinerja Direktorat PPIP diukur secara *cascading* menggunakan metode perhitungan yang terdapat di dalam Renstra DJPI tahun 2020 – 2024. Sesuai PK, capaian kinerja Direktorat PPIP adalah untuk Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, dengan target tahun 2024 sebesar 25%. Pencapaian keseluruhan Kinerja Direktorat PPIP dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat PPIP TA 2024 adalah sebagai berikut.

Direktorat PPIP telah melaksanakan paket-peketer kegiatan sepanjang tahun 2024 guna memenuhi target *output* yang telah direncanakan tersebut meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:
 - a) Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
 - b) Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman;
 - c) Penyusunan Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM.
- 2) Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman;
- 3) Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan, difasilitasi dengan mata anggaran.
 - a) Pelaksanaan Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum;
 - b) Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Air Minum;
 - c) Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Persampahan.
- 6) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, difasilitasi dengan mata anggaran:

- a) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I;
- b) Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong;
- c) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
- d) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman.

Untuk mendukung target tersebut, Direktorat PPIP juga dibekali dengan mata anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP.

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja atas *output* dari pelaksanaan paket kegiatan selama tahun 2024.

Tabel IV.2. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Output			
		Satuan	2024		
			Target	Realisasi	Deviasi
SASARAN PROGRAM: MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif					
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan					
Indikator Kegiatan:		%	25	25	-
Tingkat Pencapaian pelaksanaan Penyiapan pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	3	3	-
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output		
			2024		
			Target	Realisasi	Deviasi
2	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-
3	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-
1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-
4	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	2	2	-
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	1	1	-
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Kesepakatan	2	2	-
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	-
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	NSPK	1	1	-
6	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	4	4	-
1	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	4	4	-

Sumber: PK Direktorat PPIP TA 2020 – 2024; Data Direktorat PPIP

Berdasarkan tabel IV.2. di atas, capaian kinerja pada setiap jenis *output* beserta indikator *output* paket kegiatan di Direktorat PPIP telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Renstra.

Terdapat capaian melebihi dari yang ditargetkan pada indikator **Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman**. Pada PK, disebutkan bahwa target indikator tersebut adalah sebanyak 5 proyek, dan realisasi capaian adalah sebanyak 6 proyek sehingga terdapat deviasi positif sebesar 1 proyek. Target dan realisasi dua indikator tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah IV.3. dan IV.4.

Tabel IV.3. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”

No	Target Berdasarkan Renstra 2024	Penyesuaian Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Oktober 2024)	Realisasi
1	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula (Nilai Investasi= Rp3.670.000.000.000)	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula (Nilai Investasi= Rp3.670.000.000.000)	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula (Nilai Investasi= Rp3.670.000.000.000)
2	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi= Rp1.372.000.000.000)	SPAM Bitung (Nilai Investasi= Rp271.000.000.000)	SPAM Bitung (Nilai Investasi= Rp271.000.000.000)
3	SPAM Bitung (Nilai Investasi= Rp271.000.000.000)	SPAM Regional Lombok (Nilai Investasi= Rp611.396.976.750)	SPAM Regional Lombok (Nilai Investasi= Rp611.396.976.750)
4	SPAM Regional Bimantara (Nilai Investasi= Rp658.000.000.000)	SPAM-SPAL IKN (Nilai Investasi= Rp15.920.000.000.000)	SPAM-SPAL IKN (Nilai Investasi= Rp15.920.000.000.000)
5	-	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (Nilai Investasi= Rp12.700.000.000.000)	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II (Nilai Investasi= Rp12.700.000.000.000)
6	-	-	SPAM Regional Ayung I (Nilai Investasi= Rp1.372.000.000.000)
Total	4 Proyek Tahap Penyiapan Rp5.971.000.000.000	5 Proyek Tahap Penyiapan Rp33.172.396.976.750	6 Proyek Tahap Penyiapan Rp34.544.396.976.750

Pada Januari 2024, Direktorat PPIP menetapkan sejumlah target berdasarkan Renstra 2024 pada indikator Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman, mencakup Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula, SPAM Regional Ayung I, SPAM Bitung dan SPAM Regional Bimantara. Dalam perjalanannya, target

tersebut mengalami penyesuaian pada akhir tahun 2024 berdasarkan Renstra (rencana strategis) 2024 dengan perubahan menjadi Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regionnal Sindangheula, SPAM Bitung, SPAM Regional Lombok, SPAM-SPAL IKN dan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II. Selama berjalannya tahun anggaran terdapat potensi proyek yang dapat masuk ke dalam tahap penyiapan dan telah dilakukan beberapa kegiatan oleh Direktorat PPIP guna mendukung perkembangan proyek KPBU SPAM Regional Ayung I ke tahap berikutnya. Sehingga Realisasi untuk di tahun 2024 menjadi 6 Proyek Tahap Penyiapan dengan total Rp34.544.396.976.750.

Realisasi yang dicapai mencerminkan pencapaian yang positif, dengan capaian enam proyek tahap penyiapan. Perubahan dan tambahan tersebut merupakan upaya Direktorat PPIP dalam merespon terhadap segala perubahan dan kondisi lapangan yang sering tidak dapat diprediksi.

Tabel IV.4. Target dan Realisasi Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Target Renstra 2024	Penyesuaian Target	
		Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Oktober 2024)	Realisasi
1	SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II (Nilai Investasi= Rp9.740.000.000.000)	B2B SPAM Kertasari (Nilai Investasi= Rp1.047.000.000.000)	B2B SPAM Kertasari (Nilai Investasi= Rp1.047.000.000.000)
2	SPAM Regional Sinumbra (Nilai Investasi= Rp1.178.000.000.000)	SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 lpd (Nilai Investasi= Rp3.755.000.000.000)	SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd (Nilai Investasi= Rp3.755.000.000.000)
Total	2 Kesepakatan Rp10.918.000.000.000	2 Kesepakatan Rp2.225.000.000.000	2 Kesepakatan Rp4.802.000.000.000

Target Renstra 2020 – 2024 yang telah ditetapkan mencakup dua kesepakatan utama, yaitu SPAM Regional Ir. H. Djuanda / Jatiluhur II dengan nilai investasi sebesar Rp9.740.000.000.000 dan SPAM Regional Sinumbra senilai Rp1.178.000.000.000. Keseluruhan, dua kesepakatan ini mencapai total investasi sebesar Rp10.918.000.000.000. Dalam perjalanannya, target tersebut mengalami penyesuaian pada pertengahan tahun 2024 berdasarkan rencana kerja (renja) 2024 dengan perubahan menjadi B2B SPAM Kertasari senilai Rp1.047.000.000.000 dan SPAM Regional Sinumbra sebesar Rp1.178.000.000.000.

Perubahan target output tahun 2024 terjadi kembali pada Oktober 2024 atas perubahan pagu anggaran dan lampirannya, yaitu B2B SPAM Kertasari senilai Rp1.047.000.000.000 dan SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 lpd sebesar Rp3.755.000.000.000. Realisasi akhir tahun 2024, tercatat dua kesepakatan tersebut berhasil direalisasikan dengan total nilai investasi sebesar Rp4.802.000.000.000. Meskipun terjadi beberapa kali perubahan target output, realisasi target kesepakatan ini memberikan gambaran konkret mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat PPIP dalam mengimplementasikan program-program strategisnya.

Adapun penjelasan rencana proyek-proyek yang mengalami perubahan terhadap target Renstra di tahun 2024 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Tabel IV.5. Isu Proyek KPBU yang Mengalami Perubahan Terhadap Target Renstra Tahun 2024

No	Nama Proyek	Progres Tahapan Saat Ini	Keterangan
1	SPAM Bimatara	Penyiapan	Perubahan Skema Pembiayaan dari sebelumnya KPBU menjadi APBN
2	SPAM Regional Jatiluhur II / Ir. H. Djuanda	Penyiapan	Terdapat perubahan skema pembiayaan dan penyesuaian <i>timeline</i> proyek. Proyek sebelumnya merupakan target <i>output</i> untuk tahap transaksi berubah menjadi target <i>output</i> tahap penyiapan.
3	SPAM Karian Barat	Penyiapan	1. Proyek diubah menjadi Integrasi Regional SPAM Karian Barat dan SPAM Sindangheula. 2. Berubahnya proyek yang sebelumnya menjadi target tahap penyiapan pada tahun 2024.
4	SPAM Regional Sinumbra	Transaksi	1. <i>Offtaker</i> belum sepakat mengenai tarif, target penyerapan dan penentuan skema pembiayaan hilir. Untuk hal tersebut bukan menjadi lingkup pendampingan DJPI. 2. Calon Pemrakarsa Belum dapat menyelesaikan revisi FS pada tahun 2023. 3. Belum terdapat progres dalam penandatanganan nota kesepakatan antara PJPk dengan Pemda <i>Offtaker</i> .

Pemantauan terhadap proyek-proyek strategis dalam Target Renstra 2020 – 2024 pada tahun 2024 mengungkap serangkaian isu dan permasalahan yang menyebabkan ketidakrealisasian sejumlah proyek tersebut. Proyek SPAM Bimantara, sebagai contoh, terhambat oleh perubahan Skema Pembiayaan dari sebelumnya KPBU menjadi APBN. Sementara itu, SPAM Karian Barat mengalami perubahan lingkup proyek yang menggabungkan 2 SPAM, yaitu

SPAM Karian Barat dan SPAM Sindangheula. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelaksanaan proyek.

Lebih lanjut, penyesuaian target pada Januari 2024 menunjukkan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda mengalami perubahan skema pembiayaan proyek. Proyek

ini ditargetkan melaksanakan tahap transaksi pada tahun 2024 tidak dapat direalisasikan atas kendala tersebut. Sehingga, proyek SPAM Regional Jatiluhur II/Ir. H. Djuanda menjadi target *output* tahap penyiapan.

Proyek SPAM Regional Sinumbra menghadapi kendala ketidaksepakatan Pemerintah Daerah Sisi Hilir dengan angka tarif air curah, target penyerapan dan penentuan pembiayaan hilir. Kondisi ini menghambat progres dalam penandatanganan nota kesepakatan antara Penanggung



Gambar IV.1. Rapat Pembahasan Isu Strategis Penjaminan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan Pemerintah Daerah selaku *Offtaker*. Selain itu, penyesuaian Studi Kelayakan proyek SPAM Regional Sinumbra terhadap *Willingness to Pay* (WTP) *Offtakers* belum terselesaikan dan membutuhkan waktu lebih lama dari target *timeline* proyek. Keseluruhan, isu-isu kompleks ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur tersebut pada tahun 2024.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dit. PPIP tahun 2024 adalah sebesar 25,42% sebagaimana telah disebutkan dalam Tabel IV.1. Nilai tersebut dihitung dengan mempertimbangkan ketercapaian *output* dari masing-masing indikator target. Penghitungan nilai capaian kinerja lebih detail ditunjukkan pada tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6. Matriks Perhitungan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN															
Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif															
Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Realisasi	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi	Komponen Output	Bobot Komponen	Realisasi	Target Output	Realisasi Output	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan PIP	25,0%	25,42 %	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket PIP	50,0%	51,67 %	Perencanaan dan Penganggaran PIP	30,0%	30,0%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP	100%	100%	2	2	Rekomendasi Kebijakan
							Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	50,0%	50,0%	Jumlah Penyusunan Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	100%	100%	2	2	Rekomendasi Kebijakan
							Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan PIP	50,0%	50,0%	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	100%	133,33 %	1	1	Rekomendasi Kebijakan

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program (SP): Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Tahunan	Realisasi	Jenis Indikator	Bobot Indikator	Realisasi	Rincian Output	Bobot Output	Realisasi	Komponen Output	Bobot Komponen	Realisasi	Target Output	Realisasi Output	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							NSPK PIP	10,0%	30,0%	Jumlah Perumusan NSPK PIP	100%	100%	1	1	NSPK
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket PIP	50,0%	50,0%	Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan	50,0%	50,0%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi PIP	60,0%	60,0%	1	1	Dokumen
										Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP	40,0%	40,0%	2	2	Kesepakatan
							Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP	50,0%	50,0%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP	100%	100%	4	4	Dokumen

Berdasarkan Tabel IV.6. di atas, dapat dilihat bahwa Target capaian IKK Direktorat PPIP sebesar 25% merupakan pembobotan nilai dengan persentase tertentu untuk setiap Jenis Indikator; Rincian *Output*; dan Komponen *Output*. Berikut tahap-tahap perhitungan *cascading* kinerja Direktorat PPIP sebagaimana Tabel IV.7:

- 1) Kolom 13 (Realisasi) dan kolom 15 (Realisasi Output) menjadi dasar perhitungan. Dari data tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (kolom 12 dan kolom 14). Komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP ditargetkan menghasilkan 3 rekomendasi kebijakan. Target tersebut telah terpenuhi sehingga nilai realisasi yang diperoleh pada komponen output ini adalah 30% sesuai dengan bobot komponen.
- 2) Hasil realisasi komponen *output* kemudian dijumlah dan dikalikan dengan bobot rincian *output* (kolom 9). Dalam hal ini rincian output Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan PIP mendapatkan nilai 13,33% dari bobot sebesar 10% karena output proyek yang melebihi target (4 dari 3 proyek). Sedangkan pada rincian output Proyek KPBU Permukiman yang siap dikerjasamakan mendapatkan nilai realisasi sebesar 40% dari bobot 40%. Hal ini dikarenakan komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP hanya mencapai 2 kesepakatan dari 2 kesepakatan yang ditargetkan.
- 3) Pada kolom 5, terdapat 2 jenis indikator yang menjadi dasar penghitungan nilai IKK. Jenis indikator pertama, Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket PIP, mendapatkan nilai sebesar 51,67%. Sedangkan jenis indikator Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket PIP mendapatkan nilai 50%.
- 4) Berdasarkan perhitungan nomor 1 hingga nomor 3 di atas, maka diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 25,42% yang ditunjukkan pada kolom nomor 4.

IV.1.1. Capaian Kinerja Per Indikator Output

Berikut adalah uraian capaian kinerja, untuk setiap indikator di masing-masing *output* kegiatan, berdasarkan IKK Direktorat PPIP Tahun 2024.

1. **Komponen Output: Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran PIP**

Komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Target tersebut diupayakan melalui dua paket kegiatan. Paket kegiatan pertama, yang memiliki kode 4197.ABF.009.051.A, berjudul "Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki pagu

sebesar Rp 736.092.000. Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kerja yang terstruktur dan terperinci, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat tersebut. Pengampu paket kegiatan ini adalah Bidang Tugas Pemantauan, Evaluasi, dan Dukungan (BT PED) Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Sementara itu, paket kegiatan kedua, dengan kode 4197.ABF.009.051.B, berjudul "Penyusunan Profil *Pipeline* Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki pagu sebesar Rp 783.022.000. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan profil *pipeline* yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai proyek-proyek bidang infrastruktur permukiman. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi dengan jelas proyek-proyek strategis yang akan mendukung pembangunan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan. Sama seperti halnya paket kegiatan sebelumnya, pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Dit. PPIP berhasil mencapai targetnya pada komponen output ini dengan merealisasikan sebanyak 2 rekomendasi kebijakan dari total target yang juga sebanyak 2 rekomendasi kebijakan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan.

Tabel IV.7. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Kode/Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman <u>Kode: 4197.ABF.009.051.A</u> <u>Pagu: Rp736.092.000</u>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	BT PED
2	Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman <u>Kode: 4197.ABF.009.051.B</u> <u>Pagu: Rp783.022.000</u>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	BT PED

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan

Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi pelaksanaan. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

Tabel IV.8. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Rapat Pembahasan Progres Pemutakhiran Fitur Dashboard Profil Potensi Investasi dan Pemantauan Kinerja PDAM	28 Maret 2024	RR Dit. PPIP
2	Rapat Penyusunan Profil Risiko UPR T-2 Direktorat PPIP dan UPR T-1 DJPI	5 April 2024	RR Lt 9
3	Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	7 Mei 2024	RR Dit. PPIP
4	Pembahasan Draft Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur	7 Mei 2024	RR Dit. PPIP
5	Rapat Pemantauan Progres dan Anggaran Direktorat PPIP TA 2024	14 Mei 2024	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III PUPR
6	Rapat Pemantauan Progres dan Anggaran Direktorat PPIP TA 2024	21 Juni 2024	RR Dit. PPIP
7	Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25 Juni 2024	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah III Jakarta
8	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan untuk Rencana Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Juli 2024	RR Dit. PPIP
9	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja untuk Rencana Pembangunan Zona	1 Juli 2024	RR Dit. PPIP

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
	Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		
10	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Tatalaksana untuk Rencana Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	11 Juli 2024	RR Dit. PPIP
11	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Rencana Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	12 Juli 2024	RR Dit. PPIP
12	Rapat Pembahasan Konsep Surat Keputusan Agen Perubahan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	31 Juli 2024	RR Dit. PPIP
13	Rapat Pemantauan Capaian Kinerja dan Anggaran Direktorat PPIP Triwulan II	2 Agustus 2024	Grand Zuri BSD City by ZHM
14	Undangan Diskusi Skema Kerja Sama Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) pada Proyek SPAM	12 Agustus 2024	Grand Zuri BSD City by ZHM
15	Rapat Pembahasan Update Fitur Dashboard Profil Potensi Investasi dan Monitoring Kinerja PDAM	26 Agustus 2024	RR Dit. PPIP
16	Undangan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	29 Agustus 2024	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah III Jakarta
17	Rapat Konsolidasi Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Triwulan II TA 2024	30 Agustus 2023	Episode Gading Serpong
18	Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	28 Oktober 2024	RR Dit. PPIP

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
19	Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	28 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
20	Rapat Rencana Tindak Lanjut Triwulan IV dan Penyusunan Profil Risiko Tahun 2025 Direktorat PPIP	20 Desember 2024	RR Dit. PPIP

2. **Komponen Output: Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman**

Komponen output Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan. Target ini diwujudkan melalui paket kegiatan yang memiliki nama "Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.ABF.009.052.A dan pagu sebesar Rp858.561.000. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyusun identifikasi proyek KPBU dalam sektor infrastruktur permukiman. Subdit Legalisasi Rencana Investasi (LRI) bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 1 rekomendasi kebijakan, sesuai dengan yang ditargetkan. Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal, mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan. Proses identifikasi proyek KPBU ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai proyek-proyek strategis yang dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman secara berkelanjutan di Indonesia.



Gambar IV.2. Indonesia Water, Sanitation, Hygiene (WASH) and Water Resource Management (WRM) Investment Forum

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Tabel IV.9. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman”

No	Kode>Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman Kode: 4197.ABF.009.052.A Pagu: Rp858.561.000	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	Subdit LRI

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat

memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024.

Tabel IV.10. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Rapat Ekspose Report on Water Sanitation Hygiene (WASH) Blended Finance	23 Januari 2024	RR Dirjen PI
2	Undangan Diskusi terkait Potensi Pengembangan Infrastruktur Persampahan di Kota Denpasar	20 Februari 2024	Zoom Meeting
3	Undangan Diskusi Terkait Inisiasi Pengelolaan Persampahan dengan Teknologi Waste to Energi (WtE)	21 Februari 2024	RR 1, Lt.2, Wing 3
4	Diskusi Potensi Kerja Sama Infrastruktur Sektor Persampahan	5 Maret 2024	RR Dit. PPIP
5	Rapat Pembahasan Potensi Proyek KPBUI Pengelolaan Persampahan di Provinsi Banten	8 Maret 2024	RR 1, Lt.2, Wing 3
6	Interim Discussion of Feasibility Study for Semarang City Smart Water Management Project	21 Maret 2024	RR Dirjen. PI
7	Pemetaan Potensi Investasi Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan Wilayah Sungai	22 Maret 2024	RR Dit. PPIP
8	Rapat Pembahasan Potensi Pembiayaan Sisi Badan Usaha Sektor Air Minum melalui Water Access acceleration Fund (W2AF)	22 April 2024	Artotel Suites Mangkuluhur
9	Rapat Finalisasi Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Indonesia Water Fund Menuju Global Water Fund	29 April 2024	RR 1, Lt. 2, Wing 3
10	Pembahasan Tindak Lanjut Surat Minat PT Makmur Elok Graha dalam Pengelolaan Aset Waduk Sei Gong	8 Mei 2024	Zoom Meeting
11	Rapat Tindak Lanjut Minat Penngelolaan Aset Waduk Sei Gong	30 Mei 2024	RR Bendungan Sei Gong, Kepulauan Riau

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
12	Rapat Tindak Lanjut Minat PT Makmur Elok Graha dalam Pengelolaan Aset Waduk Sei Gong	13 Juni 2024	Zoom Meeting
13	Follow-Up Meeting on Support Project for Capacity Improvement, Establishment of Sustainable System on Maintenance of Reverse Osmosis (RO) Membrane Filtration System in Messa Island, Indonesia	28 Juni 2024	RR Dit. PPIP
14	Rapat Pemantauan Progres Proyek SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 Lpd	9 Agustus 2024	Ruang Pertemuan Perumda Tirta Wenning kota Bandung
15	Discussion on Preliminary Study of Project using Multi-Provincial PublicPrivate Partnership (PPP) Approach under Source-To-Tap Framework Feasibility	12 September 2024	RR Dit. PPIP
16	Undangan Indonesia Water, Sanitation, Hygiene (WASH) and Water Resource Management (WRM) Investment Forum	17 September 2024	Grand On Thamrin Ballroom, Pullman Jakarta
17	Site Visit and Discussion on Support Project for Capacity Improvement, Establishment of Sustainable System on Maintenance of Reverse Osmosis (RO) Membrane Filtration System in Messa Island, Indonesia	24 September 2024	Kab. Manggarai Barat
18	Rapat Pembahasan Progres Feasibility Study for Semarang City Smart Water Management Project	16 Oktober 2024	Perumda Air Minum Tirta Moedal Semarang
19	Discussion on Potential Cooperation in Waste Management Projects with KfW Development Bank	18 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
20	Undangan Focus Group Discussion (FGD) Developing Investment Framework for The Water Sector in Indonesia	26 November 2024	RR Dit. PPIP
21	Rapat Pembahasan Progres dan Tindak Lanjut Penyiapan Proyek KPBU Sektor Permukiman di Provinsi Bali	26 November 2024	RR Dit. PPIP

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
22	Sharing Session Implementasi Kebijakan ESG dalam Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	5 Desember 2024	RR Dit. PPIP

3. Komponen Output: Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman

Komponen output Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur



Gambar IV.3. Focus Group Discussion II Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBSP SPAM Regional Lombok

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

ini difokuskan pada penyediaan dukungan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Subdit LRI bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil memenuhi target dengan merealisasikan 1 rekomendasi kebijakan, sesuai target yang sebelumnya ditetapkan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan capaian mencapai 133,33%, yang melebihi batas atas nilai capaian kinerja yang dapat di klaim. Pencapaian target output proyek telah berhasil merealisasikan 4 target proyek dari sebelumnya 3 target proyek. Proses penyiapan dukungan ini memainkan peran krusial dalam memfasilitasi kerja sama investasi infrastruktur permukiman.

Permukiman tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan. Target ini diwujudkan melalui paket kegiatan yang diberi nama "Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.ABF.012.051.A dan pagu sebesar Rp 1.260.158.000. Kegiatan

Tabel IV.11. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kode: 4197.ABF.012.051.A Pagu: Rp1.260.158.000	Rekomendasi Kebijakan	1	1	133,33%	Subdit LRI

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

Tabel IV.12. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		Lokasi
1	Undangan Ekspos Rencana KPBU Unsolicited SPAM-SPAL KIKN dan SPAM Balikpapan	19	Januari 2024	RR Dirjen PI
2	Rapat Pembahasan Struktur Kerja Sama dan Bentuk Pengembalian Investasi pada Rencana KPBU Unsolicited SPAM-SPAL KIKN dan SPAM Balikpapan	31	Januari 2024	Zoom Meeting
3	Rapat Pembahasan Revisi Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	13	Februari 2024	Java Palace Hotel, Bekasi
4	Rapat Tindak Lanjut Kick Off Meeting terkait Permohonan Pendapat Hukum Pelaksanaann Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	15	Februari 2024	RR. Dit. PPIP
5	Rapat Konfirmasi Biaya Air Kerja Sama Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur	20	Februari 2024	Nuanza Hotel & Convention Kab. Bekasi

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
	II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi		
6	Rapat Koordinasi Awal Pendampingan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bitung	22 Februari 2024	Zoom Meeting
7	Rapat Lanjutan Penyiapan Proyek SPAM Regional Lombok	23 Februari 2024	Hotel THE 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa
8	Rapat Perhitungan Biaya Air Kerja Sama Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	26 Februari 2024	Kantor Pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Bekasi
9	Rapat Pembahasan Revisi Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II dengan Pemerintah Daerah kota Bekasi	27 Februari 2024	Hotel Horisonn Ultima, Bekasi
10	Undangan Ekspose Rencana KPBU Unsolicited SPAB Terintegrasi dengan SPAM Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota Samarinda	1 Maret 2024	Zoom Meeting
11	Rapat Pembahasan Transformasi Penyelenggaraan SPAM Regional Karian Barat dan Sindangheula	15 Maret 2024	RR 1, Lt.2, Wing 3
12	Rapat Pembahasan Kewajaran Nilai Investasi Proyek KPBU SPAM Regional Ir.H.Djuanda/Jatiluhur II	18 Maret 2024	RR Dit. PPIP
13	Rapat Tindak Lanjut Permohonan Pendapat Hukum Pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Regional Ir.H.Djuanda/Jatiluhur II	25 Maret 2024	Ra Suites Simatupang
14	Undangan Diskusi Kebutuhan Pemenuhan Air di Regional Provinsi Kalimantan Timur	25 Maret 2024	Ra Suites Simatupang
15	Rapat Persiapan Kick off Meeting Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung dan SPAM Regional Lombok	22 April 2024	RR Dit. PPIP
16	Rapat Pembahasan Assesment Studi Kelayakan Proyek KPBU SPAM Regional Ir.H.Djuanda/Jatiluhur II	25 April 2024	RR Dit. PPIP

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
17	Rapat Pembahasan Progres penyiapan Proyek KPBU Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan Sindangheula	29 April 2024	RR 1, Lt 2, Wing 3
18	Undangan Kick-Off Meeting Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM kota Bitung	2 Mei 2024	Hotel Ambhara, Jakarta
19	Undangan Kick-Off Meeting Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Lombok	3 Mei 2024	Hotel Ambhara, Jakarta
20	Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung	17 Mei 2024	RR 1, Lt. 2, Wing 3
21	Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung	17 Mei 2024	RR 1, Lt. 2, Wing 3
22	Rapat Tindak Lanjut Kick-Off Meeting Permohonan Pendapat Hukum Transformasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20 Juni 2024	Goodrich Suites, jakarta
23	Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU SPAM Regional Lombok	1 Agustus 2024	Grandkemang Hotel, Jakarta
24	Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU SPAM Kota Bitung	6 Agustus 2024	Favehotel Bitung
25	Rapat Koordinasi Pendampingan USAID IUWASH Tangguh Untuk Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	12 Agustus 2024	Grand Zuri BSD City by ZHM
26	Rapat Pendampingan USAID IUWASH Tangguh Untuk Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	21 Agustus 2024	The Premiere Hotel Pekanbaru
27	Rapat Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Lombok	13 September 2024	RR Lt 9
28	Rapat Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung	18 September 2024	RR Lt 9

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
29	Rapat Persiapan Focus Group Discussion II SPAM Regional Lombok dan SPAM Kota Bitung	24 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
30	Rapat Persiapan Focus Group Discussion SPAM Regional Lombok	30 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
31	Rapat Persiapan Focus Group Discussion SPAM Kota Bitung	31 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
32	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Proyek SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	1 November 2024	RR Dit. PPIP
33	Focus Group Discussion II Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU SPAM Regional Lombok	7 November 2024	Lombok Raya Hotel
34	Focus Group Discussion II Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU SPAM Kota Bitung	13 November 2024	Favehotel Bitung
35	Rapat Pembahasan Nota Kesepakatan Dukungan Penyelenggaraan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Balikpapan	15 November 2024	Zoom Meeting
36	Rapat Pembahasan Hasil FGD II Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Lombok	22 November 2024	Zoom Meeting
37	Rapat Pembahasan Draft Akhir Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Regional Lombok	28 November 2024	RR Dit. PPIP
38	Rapat Progres Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung	6 Desember 2024	RR Dit. PPIP
39	Rapat Pembahasan Draft Akhir Penyusunan Prastudi Kelayakan SPAM Kota Bitung	11 Desember 2024	RR Dit. PPISDA
40	Rapat Pembahasan Hasil Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Balikpapan	18 Desember 2024	Zoom Meeting

4. **Komponen Output: Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PIP**

Komponen output Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembiayaan

Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024 ditargetkan melalui dua paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit LRI. Paket kegiatan pertama, dengan nama "Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman," memiliki kode 4197.AFA.003.051.A dan pagu sebesar Rp679.422.000. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 1 NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), mencapai capaian sebesar 100%.



Gambar IV.4. Ekspose Aplikasi E-Lahan KSCS dan Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian Serpong

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Tabel IV.13. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman <u>Kode: 4197.AFA.003.051.A</u> <u>Pagu: Rp679.422.000</u>	NSPK	1	1	100%	Subdit LRI

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Perumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap

dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024.

Tabel IV.14. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Rapat Finalisasi Aplikasi Pengadaan Lahan KSCS dan Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian-Serpong	12 Januari 2024	RR Dit. PPIP
2	Rapat Persiapan Ekspose Aplikasi Monitoring Hulu- Hilir SPAM Regional KarianSerpong dan Pengadaan Lahan KSCS	28 Februari 2024	Zoom Meeting
3	Ekspose Aplikasi E-Lahan KSCS dan Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian Serpong	4 Maret 2024	RR Dirjen PI
4	Undangan Diskusi Persiapan Reviu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	6 Maret 2024	RR Dit. PPIP
5	Hari ke-1 Pemutakhiran Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	26 Maret 2024	Grandkemang, Jakarta
6	Permohonan Pengisian Data Hilir SPAM Regional SPAM Karian-Serpong untuk Sistem Informasi Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian-Serpong	23 April 2024	RR Dit.PPIP
7	Rapat Pembahasan Aplikasi Monitoring Hulu-Hilir SPAM Regional Karian-Serpong dan Pengadaan Lahan KSCS	29 April 2024	RR Dirjen PI
8	Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Peraturan Direksi tentang Kerjasama (Business to Business) pada BUMD Sektor Air Minum	16 Mei 2024	Zoom Meeting
9	Sharing Session Pengembangan Kerja Sama Business to Business (B2B) Penurunan Non-Revenue Water (NRW) dengan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)	3 Juni 2024	Nuanza Hotel & Convention Cikarang

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
10	Rapat Konsinyasi Pedoman Penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Air Minum dan SOP Direktorat PPIP	9 Juli 2024	Bapekom III PUPR Jakarta
11	Rapat Kordinasi Model Dokumen Pearaturan Direksi untuk Pelaksanan Kerjasama dengan Mitra dalam Penyelengaran SPAM	15 Juli 2024	RR Dit. PPIP
12	Rapat Lanjutan Penyusunan Model Dokumen Peraturan Direksi untuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Mitra dalam Penyelenggaraan SPAM	15 Agustus 2024	Grandkemang, Jakarta
13	Rapat Pembahasan Draft Surat Edaran tentang Tata Kelola Perencanaan Program Infrastruktur PUPR	24 September 2024	RR Dit. PPIP

5. ***Komponen Output: Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi PIP***

Komponen output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024 ditargetkan melalui paket kegiatan yang diberi nama "Pelaksanaan Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum" dengan kode 4197.AEE.003.051.B. Paket kegiatan ini memiliki pagu sebesar Rp433.500.000 dan bertujuan untuk



Gambar IV.5. Focus Group Discussion Konsep Panel Badan Usaha Sektor Air Minum Pengadaan Lahan E-Lahan KSCS

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

mempercepat proses pengadaan badan usaha pelaksana sektor air minum melalui konsep panel badan usaha dan rancangan dokumen prakualifikasi. Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi (KCSI) bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, paket kegiatan ini berhasil mencapai target dengan merealisasikan 1 dokumen, sesuai dengan yang ditargetkan. Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, dengan capaian mencapai 100%. Proses pelaksanaan dukungan dan penyiapan transaksi pembiayaan ini membuktikan kontribusi Subdit KKS dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman melalui kerja sama investasi yang terstruktur.

Tabel IV.15. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum <u>Kode: 4197.AEE.003.051.A</u> <u>Pagu: Rp433.500.000</u>	Dokumen	1	1	100%	Subdit KKS

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023.

Tabel IV.16. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Rapat Koordinasi Awal Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum	20 Maret 2024	RR Direktorat PPIP
2	Rapat Pembahasan Konsep Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	2 April 2024	RR 1 DJPI
3	Rapat Koordinasi Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum	15 Mei 2024	Hotel Grandkemang Jakarta
4	Rapat Pembahasan Aspek Teknis dalam rangka Klasterisasi Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	12 Juni 2024	RR Direktorat PPIP

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
5	Rapat Pembahasan Lanjutan Konsep dan Ketentuan Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	30 Juli 2024	RR Direktorat PPIP
6	Rapat Persiapan Audiensi Konsep Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	14 Agustus 2024	RR Direktorat PPIP
7	Rapat Lanjutan Persiapan Audiensi Konsep Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	22 Agustus 2024	RR Direktorat PPIP
8	Rapat Koordinasi Penyusunan Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	26 Agustus 2024	Sotis Kemang Hotel Jakarta
9	Rapat Pembahasan Penyiapan Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	25 Oktober 2024	RR Direktorat PPIP
10	Rapat Pembahasan Rancangan SK Panitia Pengadaan Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	6 Desember 2024	RR Direktorat PPIP
11	Rapat Pembahasan Rancangan Dokumen Prakuilifikasi Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	18 Desember 2024	RR Direktorat PPIP
12	<i>Focus Group Discussion</i> Konsep Panel Badan Usaha Sektor Air Minum	23 Desember 2024	Hotel Grandkemang Jakarta

6. **Komponen Output: Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi PIP**

Komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024 diwujudkan melalui dua paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit KKSII. Paket kegiatan pertama, dengan nama "Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Air Minum" dan kode 4197.AEE.003.052.A, memiliki pagu sebesar Rp459.402.000. Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi PJPB yang dalam hal ini Pemerintah Daerah melaksanakan tahap transaksi KPBU sektor air minum dan pembiayaan lainnya diluar skema KPBU dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subdit Koordinasi Kerja Sama Investasi (KKSII) bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan ini. Paket kegiatan ini berhasil mencapai target 100% dengan merealisasikan 1 dokumen, sesuai dengan yang ditargetkan.

Sementara itu, paket kegiatan kedua, yang bernama "Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Persampahan" dengan kode 4197.AEE.003.052.B dan pagu sebesar Rp446.350.000, juga dilaksanakan oleh Subdit KCSI. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah pada tahap transaksi proyek KPBU di sektor infrastruktur persampahan. Capaian dari paket kegiatan ini mencapai 100%, dengan merealisasikan 1 kesepakatan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel IV.17. Capaian Kinerja Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Air Minum <u>Kode: 4197.AEE.003.052.A</u> <u>Pagu: Rp459.402.000</u>	Kesepakatan	1	0	0%	Subdit KCSI
2	Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Persampahan <u>Kode: 4197.AEE.003.052.B</u> <u>Pagu: Rp446.350.000</u>	Kesepakatan	1	1	100%	Subdit KCSI

Tahun ini, target yang ditetapkan adalah menghasilkan dua rekomendasi kebijakan untuk Business To Business (B2B) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kertasari dan SPAM Bandung Terintegrasi 3.500 lpd. Berdasarkan realisasi yang dicapai, Direktorat PPIP berhasil mengeluarkan dua rekomendasi kebijakan, sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Realisasi ini merupakan langkah maju yang signifikan, menunjukkan komitmen dan usaha Direktorat PPIP dalam mengatasi tantangan di sektor air minum dan persampahan.

Realisasi output oleh Direktorat PPIP tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan. Lokus paket telah dua kali mengalami penyesuaian atas pertimbangan perubahan pagu anggaran tahun 2024. Direktorat PPIP menunjukkan bahwa meskipun ada kendala, tim masih mampu mencapai hasil yang signifikan dan membawa perubahan positif di sektor air minum. Keberhasilan ini juga menegaskan komitmen Direktorat PPIP untuk terus berupaya memenuhi kebutuhan air minum yang berkualitas bagi masyarakat.

Realisasi kerja sama B2B SPAM tidak hanya menjadi bukti nyata dari upaya Direktorat PPIP, tetapi juga menandakan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Konsep B2B dalam sektor air minum perlu dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas kepada para stakeholder. Pengembangan ini bukan hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan air minum, tetapi juga membuka peluang kerjasama dan investasi baru yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam merespons tantangan dan kesempatan ini, Direktorat PPIP harus terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan air minum yang berkelanjutan. Komitmen untuk mengatasi hambatan, menjalin kerjasama strategis, dan menerapkan solusi yang inovatif akan menjadi kunci keberhasilan Direktorat PPIP dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.

Selanjutnya dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024.

Tabel IV.18. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Capacity Building Pengadaan Badan Usaha SPAM Kertasari melalui Mekanisme B to B	26 Januari 2024	Harris Hotel Bandung
2	Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU TPPAS Legok Nangka	13 Maret 2024	RR Direktorat PPIP
3	Rapat Pembahasan Mekanisme Perubahan Nomenklatur Satker VGF Sektor Permukiman	28 Maret 2024	RR Direktorat PPIP
4	Rapat Pembahasan Mekanisme Persetujuan VGF pada Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka	4 April 2024	RR Direktorat PPIP
5	Rapat Pembahasan Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka	18 April 2024	Ra Suites Jakarta
6	Survey dan Identifikasi Lahan SPAM Regional Sinumbra	25 – 27 Juni 2024	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
7	Rapat Pembahasan Rancangan PKS Proyek SPAM B to B Kertasari Kabupaten Bandung	4 Juli 2024	Kantor Perumdam Tirta Raharja, Kota Cimahi
8	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan PT. Air Bandung Timur	18 Juli 2024	RR Dirjen PI
9	Rapat dan Survey Pemantauan Progres Proyek SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 lpd	8 – 10 Agustus 2024	Kantor Perumdam Tirta Wening, Kota Bandung
10	Rapat Pembahasan Progres Proyek KPBU TPPAS Regional Legok Nangka	28 Agustus 2024	Goodrich Jakarta
11	Rapat Pembahasan Restrukturisasi PKS Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung	25 November 2025	RR Direktorat PPIP

7. **Komponen Output: Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PIP**

Komponen output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024 berhasil mencapai target dengan merealisasikan 4 dokumen, mencapai capaian sebesar 100%.

Paket Kegiatan 1, dengan nama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I" dan kode 4197.EBD.953.055.A, memiliki pagu sebesar Rp216.041.000. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi, isu dan permasalahan, serta pengolahan data dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek KPBU bidang permukiman Wilayah I. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Paket Kegiatan 2, yang bernama "Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Proyek KPBUSPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong" dengan kode 4197.EBD.953.055.B dan pagu sebesar Rp209.550.000, bertujuan untuk memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kerja sama investasi di sektor infrastruktur permukiman mengidentifikasi dan bottleneck isu/permasalahan dalam pelaksanaan kerjasama investasi pembiayaan Proyek KPBUSPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Subdit KCSI bertindak sebagai pengampu kegiatan ini.



Gambar IV.6. Kunjungan Lapangan Proyek KPBUSPAM Kota Pekanbaru

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Paket Kegiatan 3, dengan nama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II" dan kode 4197.EBD.953.055.C, memiliki pagu sebesar Rp229.637.000. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh data dan informasi, isu dan permasalahan, serta pengolahan data dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek KPBUSPAM bidang permukiman Wilayah II. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini adalah BT PED.

Paket Kegiatan 4, yang bernama "Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman" dengan kode 4197.EBD.953.055.D dan pagu sebesar Rp153.403.000, bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dukungan VGF di sektor infrastruktur permukiman. Dengan target 1 dokumen, paket kegiatan ini berhasil direalisasikan sebanyak 1 dokumen, mencapai capaian 100%. Pengampu kegiatan ini juga adalah BT PED.

Tabel IV.19. Capaian Kinerja Komponen Output "Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman"

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan	Dokumen	1	1	100%	BT PED

No	Nama Paket Kegiatan/ Pagu	Output				Pengampu Kegiatan
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
	Infrastruktur Permukiman Wilayah I <u>Kode: 4197.EBD.953.055.A</u> <u>Pagu: Rp216.041.000</u>					
2	Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong <u>Kode: 4197.EBD.953.055.B</u> <u>Pagu: Rp209.550.000</u>	Dokumen	1	1	100%	Subdit KCSI
3	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II <u>Kode: 4197.EBD.953.055.D</u> <u>Pagu: Rp229.637.000</u>	Dokumen	1	1	100%	BT PED
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman <u>Kode: 4197.EBD.953.055.D</u> <u>Pagu: Rp153.403.000</u>	Dokumen	1	1	100%	TU

Dalam tabel berikut, disajikan daftar pelaksanaan kegiatan utama terkait dengan komponen output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. Tabel ini mencakup informasi penting seperti nama kegiatan, tanggal pelaksanaan, dan lokasi. Tabel hanya menampilkan kegiatan utama, namun tetap dapat memberikan gambaran rinci terkait implementasi pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2024.

Tabel IV.20. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Komponen Output “Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman”

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
1	Rapat Pembahasan Progres Pemenuhan Sambungan Rumah pada Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru	22 Januari 2024	IPA Tampan, Pekanbaru
2	Pembahasan Potensi KBK SPAM Pekanbaru	2 Februari 2024	RR Dit. PPIP
3	Presentasi Laporan Akhir Rencana Aksi Perumdam Tirta Siak Pekanbaru dalam rangka percepatan penambahan pelanggan baru di Zona II	21 Maret 2024	IPA Tampan, Pekanbaru
4	Pembahasan Action Plan Marketing KPBU SPAM Pekanbaru oleh Water.org	4 April 2024	Zoom Meeting
5	Pelaksanaan Tinjauan Lapangan dan Pembahasan Berita Acara Tim Internal Peneliti Usulan Pemanfaatan BMN Melalui Mekanisme Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pada SNVT PJPA Sumatera III	30 April 2024	IPA Tampan, Pekanbaru
6	Rapat Pemutakhiran Data dan Informasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	22 Mei 2024	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta
7	Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Pelaksanaan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru	13 Juni 2024	Aviary Bintaro
8	Rapat Pemantauan Progres Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong dan Proyek Karian Serpong Conveyance System (KSCS)	28 Juni 2024	Bapekom BPSDM Wilayah III Jakarta
9	Rapat Koordinasi Pendampingan USAID IUWASH Tangguh Untuk Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	12 Agustus 2024	Grand Zuri BSD City by ZHM
10	Rapat Pendampingan USAID IUWASH Tangguh Untuk Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	21 Agustus 2024	The Premiere Hotel Pekanbaru
11	Kunjungan Lapangan ke Lokasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru	22 Agustus 2024	Lokasi Proyek KPBU SPAM Pekanbaru

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi
12	Rapat Pendampingan Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) Tangguh kepada Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota	16 Oktober 2024	Zoom Meeting
13	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	31 Oktober 2024	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta
14	Undangan Rapat Verifikasi Dokumen Administrasi Pencairan Dukungan Kelayakan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru Tahap III	28 Oktober 2024	RR Dit. PPIP
15	Undangan Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Perumda Air Minum (Perumdam) Tirta Siak Kota Pekanbaru	31 Oktober 2024	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta
16	Rapat Progres Pengembangan Sistem Satu Data Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	18 November 2024	RR Dit. PPIP
17	Rapat Penyusunan Bahan Tindak Lanjut Pembahasan Karian Serpong Conveyance System (KSCS) dan Proyek KPBU SPAM Regional Karian-Serpong	20 November 2024	RR Dit. PPIP

IV.2. Perbandingan Kinerja

Pada bab ini akan dibahas perspektif analitis yang mendalam tentang pencapaian dan tantangan Direktorat PPIP. Dengan membandingkan data tahunan, maka akan dapat mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan Direktorat PPIP dari tahun ke tahun, menyoroti area-area peningkatan serta aspek-aspek yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sejalan dengan itu, perbandingan kinerja Direktorat PPIP terhadap target-target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi salah satu kunci dalam mengukur sejauh mana sinergi dan kontribusi Direktorat PPIP dalam mencapai tujuan nasional. Sementara itu, perbandingan dengan instansi sejenis, meskipun terbatas oleh keunikan fungsi dan peran masing-masing entitas, tetap memberikan wawasan berharga tentang posisi Direktorat PPIP dalam konteks lebih luas di antara lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang serupa.

IV.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dalam menganalisis capaian kinerja Direktorat PPIP selama tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya perkembangan yang signifikan meskipun terdapat beberapa hambatan. Sasaran kegiatan Direktorat PPIP yang berfokus pada "Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan" telah menghasilkan perubahan yang menunjukkan upaya konstan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Tabel IV.21. Perbandingan Capaian *Output* Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2023 dan 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	24,80%	25,42%

Dalam tahun 2023, Direktorat PPIP mencatat capaian kinerja sebesar 24,80% pada tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur permukiman. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 25,42%. Peningkatan ini tergolong kecil, namun tetap menandakan adanya perbaikan dan usaha berkelanjutan dalam mengelola dan mempersiapkan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Dalam tahun 2023, Direktorat PPIP mencatat capaian kinerja sebesar 24,80% pada tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur permukiman. Sedangkan pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 25,42%. Peningkatan ini tergolong besar, menandakan adanya perbaikan dan usaha berkelanjutan dalam mengelola dan mempersiapkan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pada tahun 2023, terjadi deviasi negatif pada output "Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan" dengan target 2 kesepakatan namun hanya berhasil merealisasikan 1 kesepakatan. Pada tahun 2024 targetnya adalah 2 kesepakatan dan tercapai 2 kesepakatan yang berhasil direalisasikan. Ini menunjukkan bahwa telah ditingkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerjasama pada proyek KPBU Permukiman.

Sebaliknya, pada tahun 2024 terjadi deviasi positif pada output "Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman". Target awalnya adalah menghasilkan 3 output proyek penyiapan, namun hasil yang dicapai adalah 4 output proyek penyiapan. Ini merupakan pencapaian positif dan menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil

melampaui ekspektasi dalam aspek ini. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas dalam proses perumusan kebijakan dan kerja sama yang efektif dalam pembiayaan infrastruktur permukiman. Secara keseluruhan, walaupun terdapat beberapa hambatan, Direktorat PPIP menunjukkan kemajuan yang positif dalam usahanya meningkatkan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur permukiman. Capaian ini tidak hanya menggambarkan upaya yang konstan dalam menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga kemampuan adaptasi dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pencapaian di tahun 2024, khususnya terkait dengan peningkatan jumlah output proyek penyiapan, menandakan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam pembiayaan infrastruktur permukiman. Hal ini juga mengindikasikan potensi yang besar untuk pertumbuhan dan peningkatan lebih lanjut di masa mendatang. Direktorat PPIP diharapkan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar serta kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memajukan infrastruktur permukiman di Indonesia.

IV.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target RPJMN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sektor infrastruktur permukiman memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dua proyek prioritas strategis, yang mencakup peningkatan akses air minum perpipaan dan sanitasi layak, menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pembangunan ini.

Tabel IV.22. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020 – 2024 Sektor Infrastruktur Permukiman

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
38	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	Rp 157 - APBN: Rp 118,8 » DAK: Rp 71,8 » Hibah: Rp 14,4 - APBD: Rp 22,93 - KPBU: Rp 15,3	a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ BUMD/Swasta)
39	Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	Rp 177,5 - APBN: Rp 94,8 » DAK: Rp 12 - APBD: Rp 14,7 - Masyarakat: Rp 64,3 - Swasta: Rp 3,6	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

Proyek pertama, yang tercatat sebagai nomor 38 dalam RPJMN, adalah pengembangan akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah. Tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan ketersediaan air minum layak, dengan target mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya berarti penyediaan air bersih yang lebih luas, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan indikasi pendanaan yang mencapai Rp 15,3 triliun melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), proyek ini merupakan investasi signifikan yang diharapkan dapat menghasilkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Proyek kedua, nomor 39, menargetkan peningkatan akses sanitasi (air limbah) yang layak dan aman untuk 90% rumah tangga di Indonesia. Proyek ini memiliki manfaat yang sama signifikannya, yakni meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Meskipun tidak ada indikasi pendanaan KPBU yang spesifik, proyek ini tetap merupakan elemen penting dalam usaha peningkatan standar hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, proyek ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi risiko kesehatan yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Kedua proyek ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan infrastruktur permukiman di Indonesia. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan, proyek-proyek ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi untuk semua.

Pendanaan yang besar untuk proyek akses air minum perpipaan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan infrastruktur penting ini. Melalui skema KPBU, pemerintah mengundang partisipasi sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur ini, yang tidak hanya menciptakan peluang investasi tetapi juga meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaannya. Sementara itu, proyek sanitasi layak, meskipun tanpa indikasi pendanaan KPBU yang spesifik, tetap menjadi prioritas yang penting, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.



Gambar IV.7. Pembahasan Penyempurnaan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Direktorat PPIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Kedua proyek ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, termasuk dalam hal koordinasi antar lembaga, penyesuaian dengan kondisi lokal, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Oleh karena itu, sukses pelaksanaan proyek ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada manajemen proyek yang efektif, kerja sama antara pemerintah dan swasta, serta dukungan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur permukiman yang inklusif dan berkelanjutan, kedua

proyek prioritas strategis ini memegang peran kunci. Mereka tidak hanya berkontribusi pada peningkatan standar hidup, tetapi juga membantu Indonesia dalam mencapai target pembangunan nasional dan internasional. Dengan fokus yang kuat pada peningkatan akses air minum dan sanitasi, proyek-proyek ini menandai langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pencapaian realisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam tahap investasi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Melalui serangkaian proyek yang dilaksanakan, total investasi yang telah direalisasikan mencapai angka yang mengesankan, yakni Rp46.039.737.499.380, melebihi target indikasi investasi KPBU berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 15.300.000.000.000.

Tabel IV.23. Realisasi Proyek KPBU Tahap Transaksi Sektor Infrastruktur Permukiman Direktorat PPIP Periode 2020 – 2024

Direktorat PPH Periode 2019 - 2024		
No	Nama Proyek	Nilai Investasi
Tahun 2020		
1	SPAM Regional Jatiluhur I	Rp 4.607.737.499.380
2	SPAM Karian Serpong	
3	SPAM Kota Pekanbaru	
Tahun 2021		
1	TPPAS Legok Nangka	Rp 4.000.000.000.000

No		Nama Proyek	Nilai Investasi
Tahun 2022			
1	B2B SPAM Sisi Hilir DKI Jakarta		Rp30.690.000.000.000
2	B2B SPAM Rajeg – Kabupaten Tangerang		
Tahun 2023			
1	B2B SPAM Sisi Hilir Kota Tangerang		Rp 1.940.000.000.000
Tahun 2024			
1	B2B SPAM Kertasari		Rp 1.047.000.000.000
2	SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 lpd		Rp 3.755.000.000.000
TOTAL			Rp46.039.737.499.380

Pada tahun 2020, tahap investasi KPBU mencakup proyek SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Karian Serpong, dan SPAM Kota Pekanbaru dengan total investasi mencapai Rp4.607.737.499.380. Ketiga proyek ini fokus pada penyediaan air bersih dan merupakan langkah penting dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Ketersediaan air bersih yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Tahun 2021 menandai realisasi KPBU pada proyek TPPAS Legok Nangka dengan total investasi mencapai Rp4.000.000.000.000. Proyek ini merupakan inisiatif penting dalam pengelolaan sampah dan sanitasi, memperkuat infrastruktur pengelolaan limbah yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2022, KPBU menyasar proyek B2B SPAM Sisi Hilir DKI Jakarta dan B2B SPAM Rajeg-Kabupaten Tangerang dengan total investasi mencapai Rp30.690.000.000.000. Kedua proyek ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan akses air bersih di area perkotaan yang padat penduduk, mengatasi tantangan distribusi air di wilayah-wilayah strategis.

Kemudian, pada tahun 2023, realisasi KPBU tahap investasi mencakup B2B SPAM Sisi Hilir Kota Tangerang dengan total investasi sebesar Rp1.940.000.000.000. Proyek ini melanjutkan upaya pemerintah dalam memperluas jaringan penyediaan air bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah perkotaan.

Di akhir periode Renstra pada tahun 2024, Proyek B2B SPAM Kertasari dan SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3.500 lpd menjadi capaian proyek yang masuk Tahap Transaksi Sektor Infrastruktur Permukiman. Kedua proyek air minum ini menjadi komitmen Direktorat PPIP dalam memperluas jangkauan layanan di wilayah Jawa Barat.

Tabel IV.24. Indikator dan Target Kegiatan Prioritas (KP) RPJMN 2020 – 2024 Sektor Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
PN5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar			
B. KP2 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman			
1	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota		743.700 SR
2	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala regional		72.000 SR
3	Jumlah sambungan rumah SPALD-T yang terlayani skala permukiman		2.232.120 SR
4	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT		5.039.057 Rumah Tangga
5	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill		19.428.776 Rumah Tangga
6	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R		1.580.796 Rumah Tangga
7	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST		1.585.405 Rumah Tangga
8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja		308 Kab/Kota
9	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik		308 Kab/Kota
10	Peningkatan Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan		10.000.000 SR
11	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi		50.502.020 Rumah Tangga
12	Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan)		10.892.869 SR
13	Persentase PDAM dengan kinerja sehat		100 %
14	Persentase angka BABS di tempat terbuka		0 %

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

Secara keseluruhan, investasi KPBU yang telah dilakukan dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan dedikasi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi ini tidak hanya mendemonstrasikan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi proyek-proyek besar, tetapi juga menunjukkan efektivitas kerjasama antara sektor publik dan swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa KPBU merupakan instrumen penting dalam pembiayaan infrastruktur, memungkinkan pembangunan berskala besar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Total investasi dengan mekanisme KPBU adalah sebesar Rp46.039.737.499.380.

Nilai tersebut hampir tiga kali lipat dari indikasi awal yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 sebesar Rp15.300.000.000.000.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan capaian positif dalam pembangunan infrastruktur di sektor pekerjaan umum dan perumahan, meskipun menghadapi tantangan pendanaan yang signifikan. Dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp623 triliun, pemerintah berhasil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis. Lebih dari itu, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), total realisasi proyek infrastruktur telah mencapai Rp434,7 triliun, memberikan kontribusi yang substansial terhadap upaya pembangunan nasional.

Proyek-proyek KPBU ini mencakup berbagai tahapan yang mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pada tahap transaksi, dua proyek berhasil dilaksanakan dengan nilai mencapai Rp4,11 triliun, sementara tiga proyek lainnya telah memasuki tahap konstruksi dengan nilai total Rp3,04 triliun. Capaian ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mendorong realisasi proyek-proyek penting meski dalam keterbatasan anggaran.

Keberhasilan ini menjadi indikasi kuat bahwa pendekatan inovatif seperti KPBU dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan pendanaan infrastruktur yang besar. Kontribusi dari proyek-proyek ini tidak hanya membantu mengurangi funding gap, tetapi juga mempercepat penyediaan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keberlanjutan komitmen ini, pemerintah optimistis dapat melanjutkan tren positif dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Pencapaian ini menandakan langkah maju Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui proyek-proyek KPBU, Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan terus bergerak maju, Indonesia semakin dekat dengan visi menjadi negara dengan infrastruktur yang berkembang dan masyarakat yang sejahtera.

IV.2.3. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan Tahun Lalu

Penyerapan anggaran Direktorat PPIP tahun 2024 sebesar Rp10.621.960.953 (97,10%) dari total pagu sejumlah Rp10.939.520.000. Untuk tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp12.669.080.000 (98,98%) dari total pagu anggaran sebesar Rp12.800.000.000. Dengan melihat perbandingan tersebut, persentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Secara lengkap perbandingan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.25. Perbandingan Realisasi Anggaran Dit. PPIP

TA	Pagu	Realisasi	Persentase	Deviasi
2023	Rp12.800.000.000	Rp12.669.080.000	98,98%	-1,02%
2024	Rp10.939.520.000	Rp10.621.960.953	97,10%	-2,90%

Adapun pada tahun 2024 realisasi lebih rendah dikarenakan adanya kebijakan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga (*self blocking*) sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024. Untuk Direktorat PPIP besaran *self blocking* adalah Rp310.902.000 atau 2,84% dari pagu anggaran, karena sebesar nilai tersebut tidak dapat digunakan, maka anggaran yang tidak terserap adalah Rp6.657.687 atau 0,06% dari pagu anggaran.

IV.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Instansi Sejenis

Perbandingan kinerja antara Direktorat PPIP dengan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terdapat tantangan dalam melakukan perbandingan yang sifatnya *apple-to-apple*. Instansi-instansi ini, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memainkan peran penting dalam proses KPBU, namun dengan fokus dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Kementerian Perhubungan misalnya, memiliki peran strategis dalam peningkatan inovasi pembiayaan infrastruktur transportasi, yang terdiri dari transportasi darat dan perkotaan, laut dan penunjang, serta udara dan perkeretaapian. Namun target kinerja belum secara langsung menyatakan objek proyek KPBU, baik dilihat dari jumlah proyek pada tahapan KPBU, nilai investasi atau tolak ukur lainnya. Sementara itu, Direktorat PPIP, yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur permukiman, memiliki target kinerja yang lebih terkait langsung dengan realisasi proyek KPBU.

Pada level koordinasi dan evaluasi, Direktorat PPIP telah melakukan koordinasi dengan Direktorat PSSPP-DJPI untuk membahas evaluasi kinerja terutama terkait perbandingan kinerja ini. Dalam konteks lebih luas, perbandingan kinerja antara Direktorat PPIP dengan instansi lain dalam proses KPBU harus melihat pada kontribusi masing-masing instansi terhadap pencapaian tujuan keseluruhan pembangunan infrastruktur nasional. Meskipun setiap instansi memiliki fokus dan target kinerja yang berbeda, kontribusi mereka bersifat komplementer dan saling mendukung.

Tabel IV.26. Target Kinerja Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik / Meningkatkan Inovasi dalam Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Tingkat Penerapan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	Persen	77
		1. Tingkat Penerapan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan	%	75
		2. Tingkat Penerapan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang	%	76
		3. Tingkat Penerapan Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian	%	80

Sumber: Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Kementerian Perhubungan Tahun 2025

IV.3. Realisasi Anggaran

Analisis kinerja anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Kementerian PUPR sepanjang tahun 2024 menunjukkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan dalam sektor pembangunan infrastruktur. Dengan pagu anggaran total Rp10.939 juta, Direktorat PPIP memegang tanggung jawab signifikan dalam memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I, Direktorat PPIP memulai tahun dengan anggaran rencana sebesar Rp706,06 juta, hampir mencapai target dengan realisasi sebesar Rp706,04 juta. Ini menunjukkan kesesuaian perencanaan awal dengan kondisi lapangan, dimana hanya terjadi deviasi negatif relatif sangat kecil sebesar Rp34.500. Hal ini menandakan pengawasan anggaran yang baik dan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan proyek.

Memasuki Triwulan II, terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran menjadi Rp3.435 juta dari rencana Rp3.534,48 juta, dengan deviasi negatif 0,91% atau sebesar Rp99,48 juta. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Namun, tantangan mulai muncul di Triwulan III, di mana terjadi penyimpangan yang lebih besar. Dari rencana anggaran Rp7.100,48 juta, realisasi hanya mencapai Rp6.984,59 juta, menyebabkan deviasi negatif 1,06% atau sebesar Rp115,89 juta. Penyimpangan ini disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah terjadinya kemunduran pelaksanaan beberapa kegiatan, terjadinya keterlambatan proses pencairan anggaran, dan penyesuaian kegiatan.



Gambar IV.8. Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP Triwulan II TA 2024

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Memasuki Triwulan IV, Direktorat PPIP berhasil menstabilkan manajemen anggarannya, dengan realisasi anggaran yang tepat sesuai dengan rencana, yaitu Rp10.621,96 juta, dan tidak ada deviasi. Ini menunjukkan upaya keras dalam penyesuaian strategi dan manajemen proyek untuk mengatasi tantangan yang muncul di triwulan sebelumnya. Kesesuaian ini juga menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah memahami dan menyesuaikan diri dengan dinamika proyek dan kondisi lapangan.

Secara lebih rinci, pada bagian pertama, untuk Sasaran Kegiatan (SK) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mengikuti pola yang serupa. Diawali dengan deviasi negatif kecil di tiga triwulan pertama, kemudian akhirnya mencapai target di Triwulan IV tanpa deviasi.

Sementara itu, SK Dukungan Manajemen Internal, menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Di Triwulan I realisasi anggaran hampir tidak terjadi deviasi. Namun, di Triwulan II dan III, terjadi deviasi negatif sebesar Rp6,8 juta dan Rp2,1 juta, pada di Triwulan IV realisasi kembali sesuai dengan rencana, menunjukkan kemampuan Direktorat PPIP dalam mengelola sumber daya internalnya secara efisien.

Dari analisis ini, beberapa hal penting dapat disimpulkan. Pertama, Direktorat PPIP memiliki kapasitas dalam merencanakan dan menyesuaikan anggaran dengan efektif, terutama di awal dan akhir tahun. Kedua, Direktorat PPIP menghadapi tantangan signifikan di Triwulan III, yang mencerminkan variabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman yang kompleks. Ketiga, Direktorat PPIP menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat, dengan koreksi jalur dan pemulihan di Triwulan IV setelah mengalami deviasi yang cukup besar. Secara keseluruhan, laporan *e-monitoring* ini menggambarkan perjalanan Direktorat PPIP dalam menavigasi kompleksitas pengelolaan anggaran pembiayaan infrastruktur. Meskipun menghadapi tantangan, Direktorat PPIP menunjukkan ketahanan dan fleksibilitas, dua

kualitas penting dalam pengelolaan proyek dan keuangan di sektor publik. Komitmen terhadap pencapaian target anggaran yang efisien dan efektif tidak hanya penting untuk kesuksesan pelaksanaan pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di tingkat nasional.



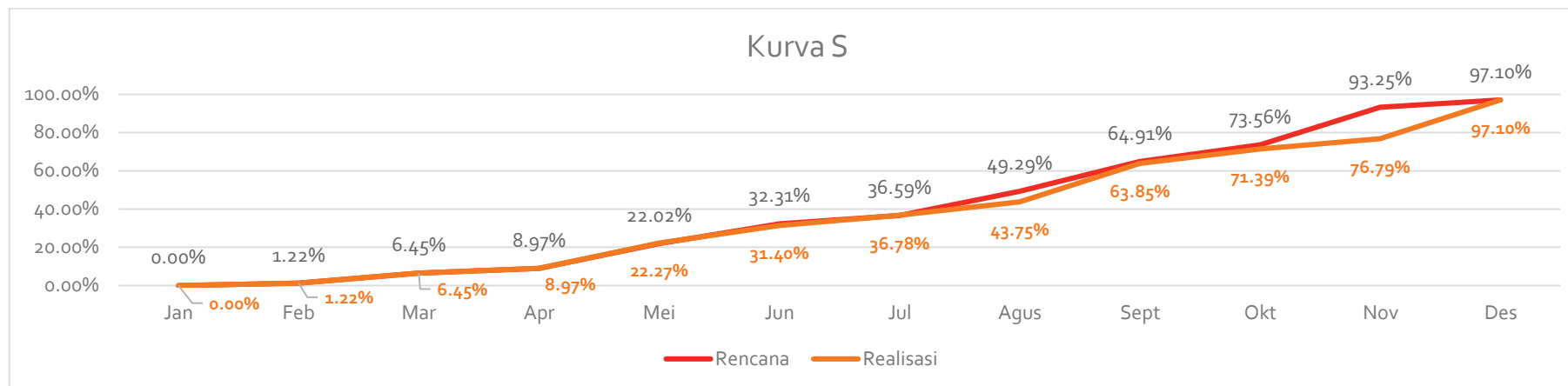
Gambar IV.9. Rapat Pemantauan Progres Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Direktorat PPIP Triwulan II TA 2024

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Tabel IV.27. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2024 Per Kuartal

NO	KODE MAK	KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET OUTPUT	PAGU (Rp Juta)	TRIWULAN I (Rp Juta)			TRIWULAN II (Rp Juta)			TRIWULAN III (Rp Juta)			TRIWULAN IV (Rp Juta)		
					RENCANA	AKTUAL	DEVIASI	RENCANA	AKTUAL	DEVIASI	RENCANA	AKTUAL	DEVIASI	RENCANA	AKTUAL	DEVIASI
DIT. PPIP				10.940	706	706	-0,00	3.534	3.435	-0,91	7.100	6.985	-1,06	10.622	10.622	-
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN			25%	9.940	568	568	-0,00	3.137	3.044	-0,93	6.421	6.308	-1,14	9.624	9.624	-
1	4197.ABF	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	6 Rekomendasi Kebijakan	6.977	269	269	-0,00	2.001	1.947	-0,78	4.334	4.254	-1,14	6.833	6.833	-
	4197.ABF.009	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	3 Rekomendasi Kebijakan	2.378	123	123	0,00	531	490	-1,74	1.479	1.451	-1,18	2.293	2.293	-
	4197.ABF.011	PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	2 Rekomendasi Kebijakan	3.340	-	-	-	1.069	1.069	-0,00	2.004	2.004	-0,00	3.340	3.340	-
	4197.ABF.012	DUKUNGAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	1 Rekomendasi Kebijakan	1.260	147	147	-0,00	401	388	-1,02	851	799	-4,10	1.200	1.200	-
2	4197.AEE	KEMITRAAN	2 Kesepakatan	1.374	176	176	0,00	585	552	-2,34	1.034	1.010	-1,76	1.339	1.339	-
	4197.AEE.003	PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG SIAP DIKERJASAMAKAN	2 Kesepakatan	1.374	176	176	0,00	585	552	-2,34	1.034	1.010	-1,76	1.339	1.339	-
3	4197.AFA	NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA	1 NSPK	679	20	20	-0,00	308	303	-0,61	535	533	-0,20	649	649	-
	4197.AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK	679	20	20	-0,00	308	303	-0,61	535	533	-0,20	649	649	-
4	4197.EBD	LAYANAN MANAJEMEN INTERNAL	4 Laporan	908	103	103	0,00	244	242	-0,24	519	511	-0,92	803	803	-
	4197.EBD.953	LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	4 Laporan	908	103	103	0,00	244	242	-0,24	519	511	-0,92	803	803	-
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			1 Layanan	1.000	138	138	-0,00	397	391	-0,69	679	677	-0,22	998	998	-
5	4194.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	1 Layanan	1.000	138	138	-0,00	397	391	-0,69	679	677	-0,22	998	998	-
	4194.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	1.000	138	138	-0,00	397	391	-0,69	679	677	-0,22	998	998	-

Sumber: Data e-monitoring per 31 Desember 2024

**Gambar IV.10. Kurva S Direktorat PPIP TA 2024**

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

**Tabel IV.28. Perbandingan Target/Rencana (R) dan Aktual/Realisasi (A)
Capaian Anggaran Direktorat PPIP TA 2024 Per Bulan Per Unit**

Subdit/BT/TU	PAGU (Rp Juta)		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Sub Direktorat LRI	6.137,66	R	0,00	0,48	229,47	357,09	1.305,19	1.983,79	2.197,16	2.710,02	4.015,18	4.399,41	6.013,84	6.035,57
		A	0,00	0,46	229,42	357,15	1.327,67	1.963,36	2.261,71	2.457,33	3.934,00	4.254,94	4.394,07	6.035,57
Sub Direktorat KKI	1.608,70	R	0,00	0,00	217,03	255,16	475,04	657,40	771,33	1.048,82	1.199,10	1.366,70	1.486,92	1.545,62
		A	0,00	0,00	217,05	255,18	477,12	624,69	744,80	865,66	1.171,20	1.284,89	1.369,15	1.545,62
BT PED	2.193,16	R	0,00	66,91	121,36	147,86	346,55	495,90	594,51	1.018,01	1.207,20	1.491,90	1.809,28	2.042,78
		A	0,00	66,90	121,37	147,79	348,63	456,42	585,84	876,63	1.202,55	1.471,13	1.753,98	2.042,78
Sub Bagian TU	1.000,00	R	0,00	66,50	138,20	221,00	282,60	397,40	440,30	615,30	679,00	789,40	891,20	997,99
		A	0,00	66,45	138,21	220,98	282,59	390,53	431,02	585,95	676,85	798,98	883,41	997,99
TOTAL	10.939,52	R	0,00	133,89	706,06	981,11	2.409,37	3.534,49	4.003,30	5.392,15	7.100,48	8.047,41	10.201,24	10.621,96
		A	0,00	133,81	706,04	981,10	2.436,01	3.435,00	4.023,36	4.785,57	6.984,60	7.809,94	8.400,62	10.621,96
Deviasi (Rp Juta)			0,00	-0,08	-0,02	-0,01	26,64	-99,48		-606,57	-115,89	-237,47	-1.800,62	0,00

Sumber: Rencana Operasional Kerja Direktorat PPIP, e-monitoring PUPR

IV.4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

IV.4.1. Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah entitas tertinggi yang bertanggung jawab mengevaluasi implementasi SAKIP di Kementerian PUPR. Khusus untuk unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja, Itjen akan mendelegasikan tugas tersebut kepada ASN pada unit organisasi internal terkait, dengan syarat telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAKIP atau telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Untuk evaluasi implementasi SAKIP TA 2023, Tim Penyelenggara SAKIP Direktorat

Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan bertindak sebagai evaluator SAKIP yang diselenggarakan oleh Direktorat PPIP (evaluatan). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA 2023 yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, tujuan evaluasi implementasi SAKIP Direktorat



Gambar IV.11. Rapat Pembahasan Teknis Input Data Kinerja Organisasi TA 2023 pada Aplikasi e-SAKIP

Sumber: Dokumentasi Direktorat PSSPP

PPIP adalah untuk: (1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; (2) Menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; (4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran V Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018, reviu laporan kinerja merupakan bagian dari evaluasi SAKIP, bertujuan untuk membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Hal-hal yang turut menjadi ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi: (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

IV.4.2. Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi SAKIP

Evaluasi implementasi SAKIP terhadap beberapa komponen masing-masing memiliki bobot penilaian. Tabel di bawah ini menguraikan komponen-komponen tersebut menurut Permen PANRB Nomor 88 tahun 2021 dan berlaku untuk penilaian pada tahun 2023. Berdasarkan penilaian evaluator, implementasi SAKIP Direktorat PPIP Tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 84,00% (predikat A - memuaskan). Nilai tersebut meningkat 3,04% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi SAKIP pada tahun sebelumnya dengan nilai 80,96%. Tabel penilaian evaluasi SAKIP Direktorat PPIP tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV.29. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,60%
2	Pengukuran Kinerja	30%	23,10%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,30%
4	Evaluasi Internal	25%	21,00%
TOTAL		100%	84,00%

Tabel IV.30. Komponen dan Bobot Penilaian Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60%
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,00%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,60%
4	Evaluasi Internal	25%	19,75%
TOTAL		100%	80,96%

Pada tahun 2020, Direktorat PPIP memperoleh total penilaian SAKIP sebesar 77,43%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,82%, Pengukuran Kinerja 19,87%, Pelaporan Kinerja 11,84%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja memainkan peran penting dalam menyusun landasan kinerja organisasi. Sedangkan Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat melakukan introspeksi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, terlihat adanya peningkatan total penilaian SAKIP menjadi 79,58%. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai 26,04%, Pengukuran Kinerja 19,02%, Pelaporan Kinerja 13,62%, Evaluasi Internal 8,13%, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi 12,78%. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Direktorat PPIP dalam memperbaiki kualitas kinerjanya dan terus mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur permukiman.

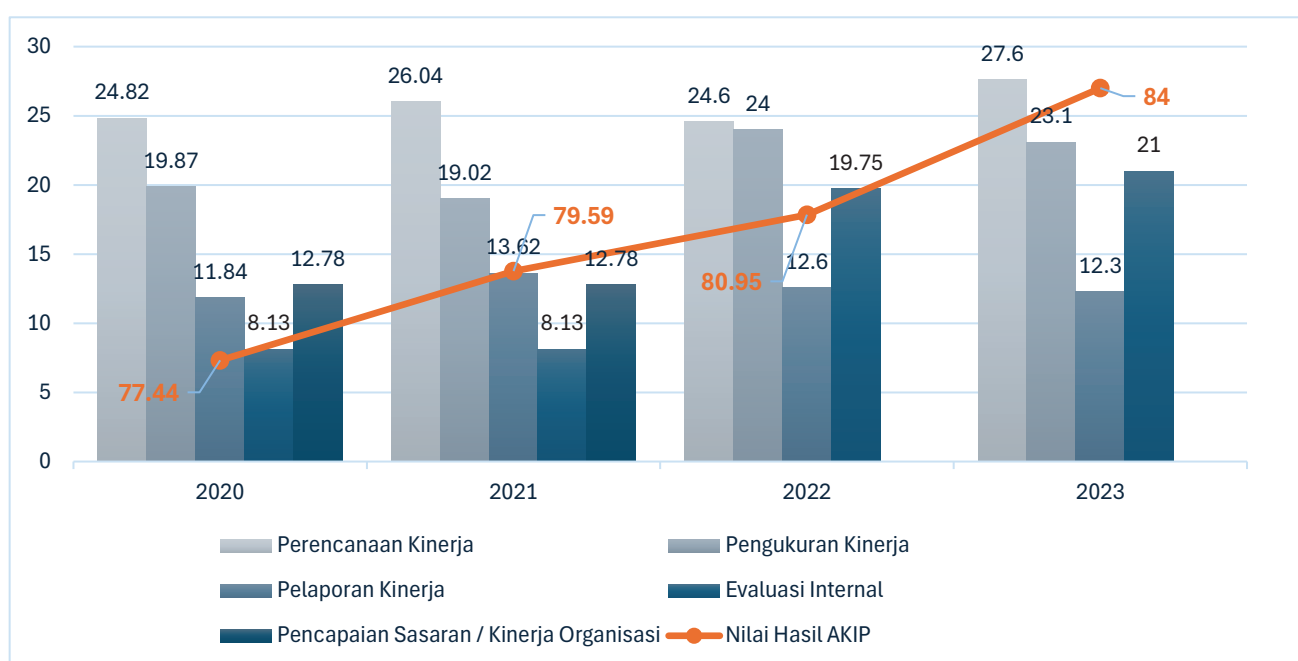
Tahun 2022 mencatat total penilaian SAKIP sebesar 80,96%, menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja mencapai nilai 24,6%, Pengukuran Kinerja 24,00%, Pelaporan Kinerja 12,6%, dan Evaluasi Internal 19,75%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP semakin matang dalam melaksanakan evaluasi internal dan mencapai target kinerjanya.

Selama ketiga tahun tersebut, Direktorat PPIP terus berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dengan fokus pada semua aspek yang dinilai dalam SAKIP. Peningkatan yang konsisten pada setiap komponen menunjukkan keseriusan organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Tantangan dan evaluasi internal juga menjadi kunci dalam proses peningkatan kinerja ini.

Pada tahun 2023, Direktorat PPIP mencatat peningkatan total penilaian SAKIP menjadi 84%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pengelolaan infrastruktur permukiman. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil memperkuat proses perencanaan dan pengukuran kinerja, yang merupakan landasan penting dalam mencapai target organisasi. Evaluasi internal yang lebih

matang juga berkontribusi signifikan dalam memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang meningkat menunjukkan bahwa Direktorat PPIP semakin efektif dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan infrastruktur permukiman.

Melalui perolehan nilai total SAKIP yang positif, Direktorat PPIP membuktikan dedikasinya dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur permukiman. Periode evaluasi ini memberikan dasar yang kuat untuk terus mengoptimalkan kinerja organisasi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.



**Gambar IV.12. Penilaian Implementasi SAKIP di Direktorat PPIP
Periode Tahun 2020 – 2023**

Berdasarkan evaluasi tersebut pula terdapat beberapa catatan rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut terdapat pada seluruh empat komponen penilaian, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, termasuk pencapaian hasil dengan ukuran kinerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Pencapaian ini menunjukkan bahwa Direktorat PPIP telah berhasil menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Direktorat PPIP dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan standar perencanaan kinerja yang

telah dicapai. Hal ini akan memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa masalah dalam komponen ini, termasuk keterlambatan dalam mengunggah laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-SAKIP. Rekomendasinya adalah meningkatkan disiplin dalam mengunggah dokumen laporan tepat waktu.

Meskipun dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar, terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Laporan monitoring kinerja bulanan telah diunggah di e-SAKIP, namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan selambat-lambatnya lima hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Rekomendasinya adalah menyusun dan memublikasikan laporan monitoring bulanan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. Selain itu, laporan kinerja telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas. Rekomendasinya adalah menuliskan tanggal legalitas pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga memberikan dampak nyata dalam efektivitas dan efisiensi kinerja. Namun, rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi AKIP 2022 berdasarkan LHE Dit. PPIP TA 2022 belum optimal. Dit. PPIP belum disiplin dalam mengunggah laporan monitoring bulanan sesuai batas waktu pada e-SAKIP PUPR. Keterlambatan ini terjadi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Rekomendasinya adalah memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal pada tahun berikutnya, dengan bukti dukung yang dapat disampaikan.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menekankan pentingnya peningkatan disiplin, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang lebih analitis dan komparatif dalam pelaksanaan tugas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, serta memastikan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan..

Secara keseluruhan, evaluasi ini menekankan pentingnya peningkatan disiplin, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang lebih analitis dan komparatif dalam pelaksanaan tugas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi kinerja, serta memastikan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel IV.31. Rekomendasi Evaluator atas SAKIP Direktorat PPIP TA 2023

No.	Komponen/ Sub Komponen	Permasalahan/Rekomendasi
1. Perencanaan Kinerja		
-	-	-
2. Pengukuran Kinerja		
b.	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	<u>Permasalahan:</u> Terjadi keterlambatan dalam melakukan <i>upload</i> laporan <i>monitoring</i> kinerja bulanan ke dalam e-sakip <u>Rekomendasi:</u> Lebih disiplin dalam meng<i>upload</i> dokumen laporan <i>monitoring</i> kinerja bulanan ke dalam e-sakip.
3. Pelaporan Kinerja		
a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	<u>Permasalahan:</u> Laporan monev kinerja bulanan telah di<i>upload</i> di e-sakip namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. <u>Rekomendasi:</u> Menyusun dan memublikasikan laporan monev bulanan tepat waktu sesuai Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR.
b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	<u>Permasalahan:</u> Laporan kinerja telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas. <u>Rekomendasi:</u> Menuliskan tanggal legalitas pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi	<u>Permasalahan:</u>

No.	Komponen/ Sub Komponen	Permasalahan/Rekomendasi
	Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	Rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi AKIP 2022 berdasarkan LHE Dit. PPIP TA 2022 telah dilakukan, namun belum optimal. Dit. PPIP belum disiplin dalam Laporan monev bulanan belum diunggah sesuai batas waktu pada e-sakip PUPR. - Keterlambatan Tahun 2022: Sepanjang Tahun 2022 - Keterlambatan Tahun 2023: Sepanjang 2023 dan pelaksanaan <i>upload</i> pada e-sakip <u>Rekomendasi:</u> Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal (bukti dukung dapat disampaikan).

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPIP TA 2023

IV.4.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

Direktorat PPIP telah berhasil mencapai target perencanaan kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024, yaitu sebesar 25%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari serangkaian upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Pertama, Direktorat PPIP meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menentukan target tahunan pada awal tahun. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis dan achievable, sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada. Koordinasi ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, harapan, dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Kedua, Direktorat PPIP melakukan penajaman perencanaan kinerja dengan menyesuaikan rencana berdasarkan perubahan arah kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Presiden RI dan Menteri PUPR. Sebagai contoh, terjadi perubahan dalam kebijakan pelaksanaan proyek KPBU di Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak lagi dijalankan oleh Kementerian PUPR. Perubahan ini berdampak langsung pada alokasi anggaran dan target kinerja yang harus disesuaikan kembali dalam perubahan PK.

Langkah ini menunjukkan fleksibilitas dalam perencanaan dan responsivitas terhadap dinamika kebijakan nasional yang berubah-ubah.

Ketiga, Direktorat PPIP melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pencapaian target kinerja. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi hambatan dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Peningkatan koordinasi dan penyesuaian strategi yang telah dilakukan terbukti efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini merupakan langkah maju yang penting. Dengan perencanaan yang lebih adaptif, koordinasi yang intensif, dan evaluasi yang terus-menerus, Direktorat PPIP telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pencapaian targetnya. Langkah-langkah yang diambil ini merupakan fondasi yang solid untuk perbaikan berkelanjutan dan pencapaian hasil yang lebih efektif di masa depan.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP TA 2023 terkait dengan Pengukuran Kinerja, Direktorat PPIP telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses serta hasil kerjanya. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kinerja yang lebih efektif dan efisien.



Gambar IV.13. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran DJPI Triwulan I TA 2024

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Terkait dengan permasalahan keterlambatan dalam mengupload laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip, Direktorat PPIP telah meningkatkan disiplin dalam penyusunan laporan. Pada tahun 2023, telah dilakukan usaha yang lebih terstruktur dan disiplin dalam menyusun dan mengirim laporan kinerja bulanan. Setiap unit kerja diinstruksikan untuk mematuhi batas waktu pengumpulan laporan yang telah ditetapkan. Meskipun ada perbaikan yang signifikan, masih terdapat beberapa periode

di mana terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyusunan laporan.



Gambar IV.14. Rapat Kajian Kegiatan DJPI TA 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI TA 2023

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

kinerja, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif dan efisien, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi dengan lebih efektif.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di Direktorat PPIP. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan. Dengan meningkatkan disiplin dalam penyusunan dan pengumpulan laporan, serta menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang berbasis pada

3. Pelaporan Kinerja

Direktorat PPIP telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah laporan monev kinerja bulanan yang telah diunggah di e-sakip tidak memenuhi kriteria penyusunan dan penyampaian selambat-lambatnya lima hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir. Sebagai tindak lanjut, Direktorat PPIP telah berupaya disiplin dalam mengunggah laporan monev bulanan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. Untuk laporan bulan Mei 2024, laporan tersebut telah diunggah pada tanggal 6 Juni 2024, sesuai dengan batas waktu lima hari kerja yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2024.

Selain itu, Direktorat PPIP juga menghadapi permasalahan terkait laporan kinerja yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas. Untuk mengatasi hal ini, pada penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 dan seterusnya, Direktorat PPIP akan mencantumkan tanggal pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa laporan kinerja memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja, serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya.

Dengan upaya-upaya ini, Direktorat PPIP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan serta publikasi laporan kinerja, sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu kepada semua pihak yang berkepentingan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi terkait dengan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, berbagai langkah strategis dan signifikan telah diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengadaptasi proses internal, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan implementasi SAKIP.

Berdasarkan rekomendasi untuk mengoptimalkan tindak lanjut evaluasi SAKIP, langkah konkret telah diambil. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi Tahun Anggaran 2022 telah dibahas secara intensif melalui rapat khusus, yang melibatkan para pihak terkait yang kompeten. Pendekatan ini menunjukkan komitmen serius dalam menangani masalah secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap aspek evaluasi ditangani secara efektif.

Rekomendasi yang telah dibahas tersebut bukan hanya berhenti pada tahap diskusi, tetapi juga telah dijalankan dan dilaporkan dalam laporan kinerja. Langkah ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengimplementasikan rekomendasi, serta memberikan landasan bagi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pelaporan ini juga memungkinkan pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil.

Secara keseluruhan, upaya-upaya ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menanggapi rekomendasi evaluasi. Penggunaan teknologi informasi, rapat khusus untuk membahas rekomendasi, implementasi rekomendasi tersebut, dan adopsi SAKIP digital adalah langkah-langkah konkret yang telah diambil. Mereka tidak hanya menunjukkan progres dalam menangani masalah spesifik yang diidentifikasi, tetapi juga komitmen organisasi dalam meningkatkan standar dan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara keseluruhan. Ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa organisasi tidak hanya responsif terhadap umpan balik, tetapi juga proaktif dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

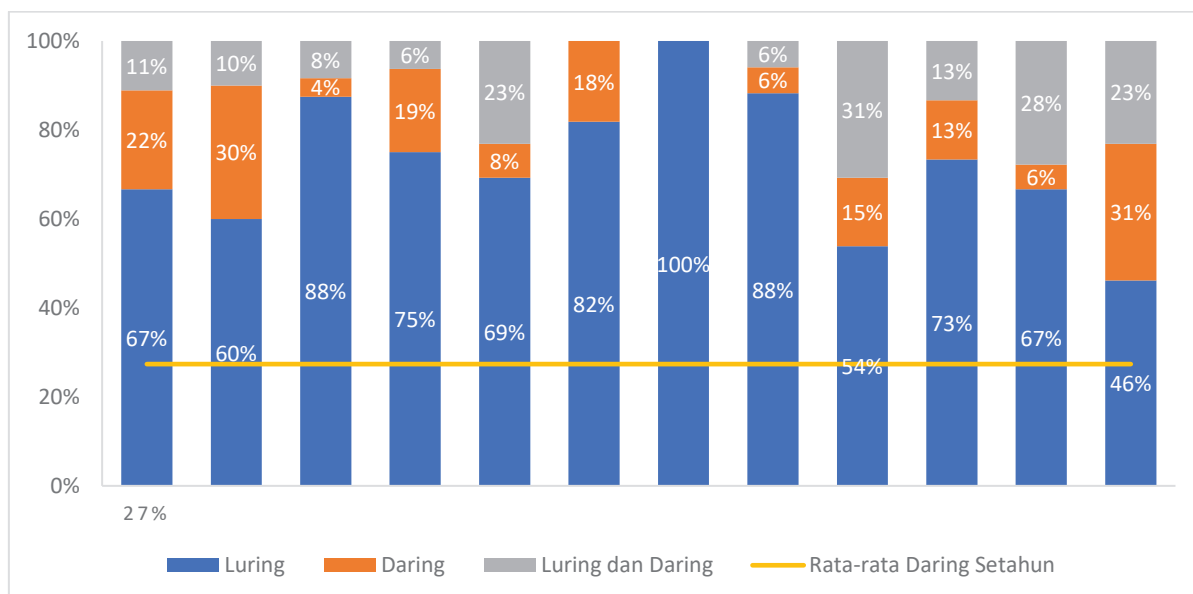
IV.5. Analisis Efisiensi

Subbab ini mengeksplorasi mendalam tentang efisiensi dalam dua aspek krusial: efisiensi metode kegiatan dan efisiensi anggaran. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sumber daya dan waktu digunakan secara optimal dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di direktorat. Dengan meneliti efisiensi metode kegiatan, subbab ini akan mengupas bagaimana salah satunya mengenai manajemen waktu dan pemanfaatan teknologi konferensi di Direktorat PPIP. Sementara itu, dalam membahas efisiensi anggaran, fokusnya adalah pada penggunaan sumber daya keuangan. Subbab ini akan mengeksplorasi bagaimana alokasi dan penggunaan anggaran mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan.

IV.5.1. Efisiensi Metode Kegiatan

Subbab ini berfokus pada analisis efisiensi dalam pemilihan metode pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPIP, khususnya dalam konteks rapat yang dilaksanakan secara daring dan luring. Kedua metode ini, dengan keunikannya masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan. Rapat daring, yang dilakukan melalui *platform* digital, menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan dengan mengurangi kebutuhan perjalanan dan memungkinkan partisipasi dari lokasi manapun. Namun, kekurangannya termasuk potensi gangguan teknis dan tantangan dalam membangun koneksi interpersonal yang lebih dalam. Di sisi lain, rapat luring memfasilitasi interaksi tatap muka yang lebih efektif untuk diskusi kompleks dan membangun hubungan, tetapi dapat menimbulkan keterbatasan dalam hal waktu dan biaya perjalanan. Memahami dinamika antara kedua metode ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Selanjutnya, subbab ini menyajikan analisis mendalam tentang proporsi pelaksanaan rapat di Direktorat PPIP berdasarkan metode pelaksanaan, yaitu daring dan luring serta dibandingkan dengan metode sepanjang tahun. Data yang terkumpul menunjukkan dinamika dalam pilihan metode rapat, yang berubah-ubah sepanjang tahun dan memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dan kondisi eksternal mempengaruhi keputusan dalam penyelenggaraan rapat.



Gambar IV.15. Distribusi Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2024 Berdasarkan Metode Pelaksanaan

Tabel IV.32. Distribusi Kegiatan Direktorat PPIP Tahun 2024 Berdasarkan Lokasi Penyelenggaraan

Lokasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Dalam Kantor	13	7	18	10	4	5	10	5	8	10	15	8	113
Balai / lainnya	1	2	2	0	5	1	1	3	2	3	0	0	20
Hotel	0	5	3	3	3	3	1	8	1	0	2	1	30
Total	14	14	23	13	12	9	12	16	11	13	17	9	163

Sepanjang tahun 2024, terlihat bahwa rapat luring mendominasi metode pelaksanaan kegiatan Direktorat PPIP, sementara untuk rapat daring rata-rata dalam setahun sebesar 28%. Ini mungkin menunjukkan preferensi untuk interaksi langsung, yang mungkin penting untuk menetapkan arah dan tujuan tahunan.

Dalam mendukung efisiensi kegiatan, rapat secara luring juga difasilitasi melalui daring, artinya jumlah peserta rapat dapat dikondisikan agar tidak terlalu banyak. Selain itu walaupun didominasi kegiatan secara luring, bila disandingkan dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan, maka 69% dilakukan di dalam kantor, baik menggunakan ruang rapat Direktorat PPIP, pun ruang rapat Uker atau Unor lain di Kementerian PUPR.

Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan antara rapat daring dan luring di Direktorat PPIP tidak bersifat statis, melainkan beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi berbagai situasi, sekaligus pemanfaatan teknologi untuk memastikan kelancaran dan efektivitas komunikasi internal.

IV.5.2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran kegiatan dilakukan terhadap kegiatan yang belum optimum dan dialihkan pada kegiatan yang lebih membutuhkan. Pada tahun 2024, dilakukan beberapa kali perubahan anggaran baik antar paket kegiatan maupun di dalam satu paket kegiatan. Perubahan tersebut menggunakan mekanisme revisi POK maupun revisi DIPA yang melibatkan Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pada tahun ini, perubahan anggaran lintas paket kegiatan juga berkonsekuensi terhadap penghapusan paket kegiatan dan pembuatan paket kegiatan baru. Paket kegiatan Dukungan Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan SPAM Regional Lombok dan Dukungan Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan SPAM Bitung yang sedari awal tahun sudah dianggarkan pada akhirnya dihapus untuk mengakomodir kebutuhan tambahan lingkup pekerjaan dan konsultan ekspert dilakukan revisi anggaran ke paket kegiatan Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Sedangkan paket kegiatan Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sebelumnya sudah dianggarkan harus dihapus disebabkan timeline tahap transaksi yang bergeser mundur ketahun berikutnya, anggaran untuk paket kegiatan tersebut dialihkan untuk paket kegiatan baru yaitu Pelaksanaan Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air minum.



Gambar IV.16. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Semester I DJPI

Sumber: Dokumentasi Direktorat PPIP

Tabel IV.33. Perubahan Anggaran Berdasarkan Pagu Definitif dan Pagu per Bulan Desember 2024

KODE	KEGIATAN/AKUN	PAGU DEFINITIF	DESEMBER 2024
DIREKTORAT PPIP		12.500.000.000	10.939.520.000
4197.ABF.009.051.A	Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	850.000.000	736.092.000

KODE	KEGIATAN/AKUN	PAGU DEFINITIF	DESEMBER 2024
4197.ABF.009.051.B	Penyusunan Profil Pipeline Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	700.000.000	783.022.000
4197.ABF.009.052.A	Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman	700.000.000	858.561.000
4197.ABF.011.051.A	Penyusunan Pra Studi Kelayakan SPAM Regional Lombok	1.800.000.000	1.595.956.000
4197.ABF.011.051.B	Dukungan Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan SPAM Regional Lombok	200.000.000	-
4197.ABF.011.052.A	Penyusunan Pra Studi Kelayakan SPAM Kota Bitung	2.000.000.000	1.743.564.000
4197.ABF.011.052.B	Dukungan Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan SPAM Kota Bitung	250.000.000	-
4197.ABF.012.051.A	Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	800.600.000	1.260.158.000
4197.AEE.003.051.A	Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.339.400.000	-
4197.AEE.003.051.B	Pelaksanaan Penyiapan Panel Badan Usaha KPBU Sektor Air Minum	-	442.198.000
4197.AEE.003.052.A	Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur Permukiman Sektor Air Minum	700.000.000	466.900.000
4197.AEE.003.052.B	Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur	500.000.000	465.350.000

KODE	KEGIATAN/AKUN	PAGU DEFINITIF	DESEMBER 2024
	Permukiman Sektor Persampahan		
4197.AFA.003.051.A	Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	700.000.000	679.422.000
4197.EBD.953.055.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah I	240.000.000	228.357.000
4197.EBD.953.055.B	Supervisi Pelaksanaan Kerjasama Investasi Pembiayaan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian Serpong	240.000.000	234.252.000
4197.EBD.953.055.C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Wilayah II	240.000.000	234.221.000
4197.EBD.953.055.D	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dukungan VGF Infrastruktur Permukiman	240.000.000	211.467.000
4194.EBA.994.002.O	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIP	1.000.000.000	1.000.000.000

IV.5.3. Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja diukur dari kemampuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sementara efisiensi kinerja diukur melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Selama tahun anggaran terdapat beberapa proyek dan Direktorat PPIP telah melakukan berbagai

upaya guna mendukung perkembangan proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) ke tahap berikutnya.

Salah satu proyek yang menonjol adalah KPBU SPAM Regional Ayung I. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Efektivitas kinerja Direktorat PPIP tercermin dari beberapa pencapaian penting selama tahun anggaran. Kinerja yang efisien juga terlihat dari penggunaan sumber daya yang optimal oleh Direktorat PPIP. Meninjau potensi proyek dan kinerja Direktorat PPIP selama tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa organisasi ini mampu beradaptasi dengan baik dan berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan kesiapan yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya.

Penyesuaian pagu anggaran dilakukan dengan memindahkan dana dari beberapa kegiatan lain yang belum mencapai optimalitas ke kegiatan yang lebih membutuhkan sumber daya tambahan. Awalnya, pagu untuk Kegiatan Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman adalah Rp800.600.000. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan anggaran semakin meningkat karena potensi capaian dan lingkup pekerjaan yang lebih besar. Oleh karena itu, terjadi penyesuaian pagu menjadi Rp1.260.158.000. Penyesuaian pagu ini memberikan dampak positif dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Direktorat PPIP, khususnya dalam pengelolaan dan penyiapan proyek KPBU SPAM Regional Ayung I.

Dengan peningkatan pagu Kegiatan Dukungan Penyiapan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dari Rp800.600.000 menjadi Rp1.260.158.000, kinerja Direktorat PPIP dalam menyiapkan proyek KPBU SPAM Regional Ayung I menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari Direktorat PPIP dalam mendukung peningkatan akses air bersih bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan rangkuman dari laporan ini dari bab pertama hingga bab ke-empat. Penutup ini bertujuan untuk merefleksikan kembali tujuan awal dan sejauh mana laporan ini berhasil menjawabnya, menyajikan evaluasi atas keseluruhan isu dan topik yang dibahas. Dengan menyediakan refleksi terhadap temuan utama dan rekomendasi yang disarankan, bab penutup berfungsi sebagai penuturan akhir yang efektif dalam memberikan pandangan jelas tentang langkah selanjutnya atau tindakan yang disarankan.

V.1. Kesimpulan/Permasalahan

Laporan Kinerja Direktorat PPIP Tahun 2024 ini dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi Eselon II sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menyusun Laporan Kinerja ini, transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPIP diharapkan dapat lebih terukur dari tahun-tahun sebelumnya sehingga mempermudah perbaikan-perbaikan atas permasalahan yang terjadi dan juga percepatan-percepatan yang harus dilakukan terkait pencapaian kinerja, baik *output* kegiatan maupun penyerapan anggaran.

Jumlah total paket kegiatan Direktorat PPIP adalah sebanyak 15 paket kegiatan yang terdiri dari 13 paket swakelola dan 2 paket kontraktual. Tingkat realisasi anggaran yang berhasil dicapai per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan data e-SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp10.621.960.313 (97.10% dari total pagu). Besaran anggaran tidak terserap adalah sebesar Rp317.559.687 (2.90%).

Tingkat pencapaian kinerja Direktorat PPIP tahun ini adalah sebesar 25,42% dari target kinerja sebesar 25,00% (deviasi positif 0,42%). Terdapat output yang terealisasi melebihi dari target, yaitu Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: realisasi 6 proyek dari target 5 proyek. Untuk output Proyek KPBU Permukiman yang Siap

Dikerjasamakan dapat memenuhi 2 kesepakatan dari 2 yang ditargetkan. Perbandingan antara capaian kinerja terhadap target PK tahun 2023 diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Kegiatan / Output		Target Output	Target Proyek	Realisasi Output	Realisasi Proyek	Deviasi
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%		25,42%		+0,42%
Output	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3 Rekomendasi Kebijakan	-	3	-	-
	Prastudi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2 Rekomendasi Kebijakan	5 Proyek	2	6	+1 Proyek
	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan		1		
	Proyek KPBU Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan	2 Proyek	2	2	-
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1 NSPK	-	1	-	-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	-	4	-	-

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, berbagai kendala muncul dan mempengaruhi jalannya proyek. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya timeline dari target yang telah ditentukan bersama;
2. Perlunya penguatan kelembagaan KPBU melalui peraturan-peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam proses penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan KPBU;
4. Sulitnya mendapatkan data progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPB Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurang memadainya hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dirumuskan;
5. Terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran mengikuti kondisi di lapangan dan para pihak lain yang terlibat;
6. Jumlah SDM dan BMN yang tersedia masih kurang memadai untuk mendukung beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;

Pada sisi lain, terdapat potensi skema pembiayaan lain yang dapat dikembangkan. Saat ini yang cukup menjanjikan adalah *Business to Business* (B2B) dalam upaya meningkatkan

cakupan layanan dan menurunkan *Non-Revenue Water* (NRW) PDAM. Skema tersebut cenderung lebih cepat dalam tahap persiapan dan transaksi mencapai kesepakatan. Sehingga dapat berpeluang menjadi pendorong dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah dijanjikan serta mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih nasional.

V.2. Rekomendasi/Tindak Lanjut

Guna menunjang kinerja yang lebih optimal, Direktorat PPIP sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi pada unit kerja eselon II di DJPI perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Perlunya penyepakatan bersama antar pemangku kepentingan terhadap target jadwal dan output bersama, serta konsekuensinya baik dari capaian positif maupun negatif;
2. Penguatan kelembagaan KPBU melalui penyesuaian dan pengembangan peraturan yang efektif, dapat mengakomodasi percepatan proses tahapan KPBU, dan dapat meningkatkan minat pasar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
3. Penguatan pendampingan dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terkait KPBU;
4. Peningkatan koordinasi dan pertukaran data terkait progres, isu, dan tindak lanjut proyek KPBU PJPB Pemerintah Daerah.
5. Pengusulan SDM dan BMN baru untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja dan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%	
ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3	Rekomendasi Kebijakan
ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

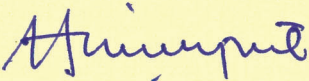
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

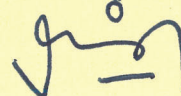
Rp12.500.000.000,00

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**


HERRY TRISAPUTRA ZUNA

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**


MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%	
ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3	Rekomendasi Kebijakan
ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

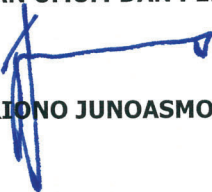
Rp11.739.520.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBK Sektor Permukiman Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula	Rp3.670.000.000.000,00
	SPAM Bitung	Rp271.000.000.000,00
	SPAM Regional Lombok	Rp611.396.976.750,00
	SPAM-SPAL IKN	Rp15.920.000.000.000,00
	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Rp12.700.000.000.000,00
Transaksi	B to B SPAM Kertasari	Rp1.047.000.000.000,00
	SPAM Regional Sinumbra	Rp948.867.000.000,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Meike Kencanawulan Martawidjaja**

Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**

Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		25%	
ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3	Rekomendasi Kebijakan
ABF.011	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2	Rekomendasi Kebijakan
ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan
AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

ANGGARAN

Rp10.939.520.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



TRIONO JUNOASMONO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA

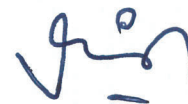
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Permukiman Tahun 2024

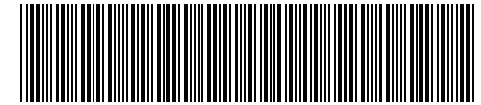
Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Integrasi SPAM Regional Karian Barat dan SPAM Regional Sindangheula	Rp3.670.000.000.000,00
	SPAM Bitung	Rp271.000.000.000,00
	SPAM Regional Lombok	Rp611.396.976.750,00
	SPAM-SPAL IKN	Rp15.920.000.000.000,00
	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Rp12.700.000.000.000,00
Transaksi	B to B SPAM Kertasari	Rp1.047.000.000.000,00
	SPAM Terintegrasi Kota Bandung 3500 Lpd	Rp3.755.000.000.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**



MEIKE KENCANAWULAN MARTAWIDJAJA



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2023**

Revisi ke 03

Tanggal : 06 April 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(16)	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker	:	(631003)	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sebesar	:	Rp.	203.035.796.000 (DUA RATUS TIGA MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	164.919.391.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	38.116.405.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	38.116.405.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V	(139) Rp.	164.919.391.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	38.116.405.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

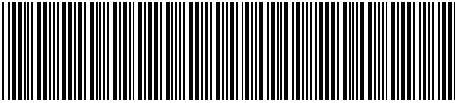
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:0054-4505-8997-5648

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	173.803.763.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	173.803.763.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.033.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.033.000

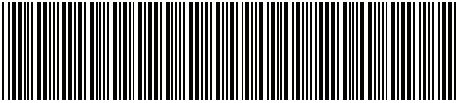
LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.033.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.033.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	173.803.763.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	78.945.585.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	20.081.976.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	74.776.202.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



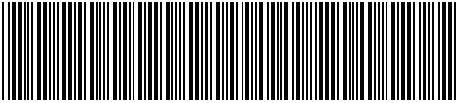
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.232.033.000	
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.232.033.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.822.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		5.00	Rekomendasi Kebijakan	7.822.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.190.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		3.00	NSPK	2.190.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi		1,00	kegiatan	3.000.033.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)		1.00	kegiatan	3.000.033.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	9.500.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)		1.00	layanan	4.500.000.000
			02	QAH.002 Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (PN)		1.00	layanan	5.000.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				173.803.763.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				78.945.585.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	73.181.169.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN		1.00	Layanan	600.000.000
		02	EBA.957	Layanan Hukum		1.00	Layanan	887.830.000
		03	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		1.00	Layanan	1.510.000.000
		04	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1.00	Layanan	800.000.000
		05	EBA.962	Layanan Umum		1.00	Layanan	900.000.000
		06	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1.00	Layanan	402.170.000
		07	EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	68.081.169.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		4,00	Unit, m2, Paket	2.574.416.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		2.00	Unit	550.000.000
		02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2.00	Unit	2.024.416.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	600.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		260.00	Orang	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		8,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.590.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		3.00	Dokumen	1.370.000.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.00	Dokumen	720.000.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		2.00	Dokumen	500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



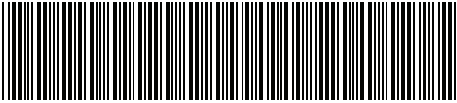
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan				20.081.976.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.111.976.000
Rincian Output	:	01	ABF.002	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		10.00	Rekomendasi Kebijakan	14.861.976.000
			02	ABF.003	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.000.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		4.00	Layanan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.970.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.00	Dokumen	720.000.000
			02	EBD.965	Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.250.000.000
Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				74.776.202.000	
	:	1. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	52.856.559.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.450.000.000
			02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000.000
			03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.640.000.000
			04	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
			05	ABF.005	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA

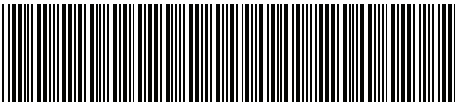


DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
		dan Jembatan		1.00	Rekomendasi Kebijakan
06	ABF.007	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		4.00	Rekomendasi Kebijakan 32.399.202.000
07	ABF.008	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.500.000.000
08	ABF.009	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		3.00	Rekomendasi Kebijakan 2.050.000.000
09	ABF.010	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		1.00	Rekomendasi Kebijakan 800.000.000
10	ABF.012	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman		5.00	Rekomendasi Kebijakan 3.300.000.000
11	ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan		1.00	Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000
12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan		1.00	Rekomendasi Kebijakan 2.467.357.000
13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan		2.00	Rekomendasi Kebijakan 1.750.000.000
Klasifikasi Rincian Output 9 : 4197.AEE Kemitraan				13,00	Kesepakatan 14.759.643.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	5.00	Kesepakatan 3.599.643.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan 3.250.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan 2.910.000.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan 5.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 10 : 4197.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar 3.100.000.000
Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK 800.000.000
	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	NSPK 1.800.000.000
	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK 500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0054-4505-8997-5648

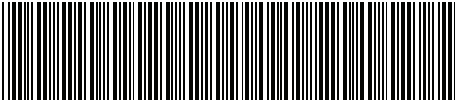
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.060.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.00	Dokumen	4.060.000.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023



DS:0054-4505-8997-5648

I B. SUMBER DANA

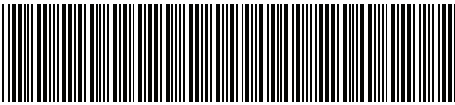
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	203.035.796.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	2.610.713	Rp.	38.116.405.000
1. Rupiah Murni	Rp.	164.919.391.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	38.116.405.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	ASIAN DEVELOPMENT B 3455-INO 1F1NDHGA	USD USD IDR	2.575,43 38.116.405,00	2	38.116.405			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



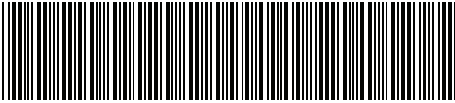
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	39.621.169	160.840.211	2.574.416	-	-	203.035.796	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.033	-	-	-	29.232.033		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
01	RM	-	7.822.000	-	-	-	7.822.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
01	RM	-	2.190.000	-	-	-	2.190.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.033	-	-	-	3.000.033		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



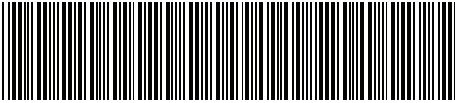
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	3.000.033	-	-	-	3.000.033	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	01 . 54	
01 RM		-	9.500.000	-	-	-	9.500.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	39.621.169	131.608.178	2.574.416	-	-	173.803.763		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	39.621.169	36.750.000	2.574.416	-	-	78.945.585		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	39.621.169	33.560.000	-	-	-	73.181.169	01 . 54	
01 RM		39.621.169	33.560.000	-	-	-	73.181.169	139@	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	01 . 54	
01 RM		-	-	2.574.416	-	-	2.574.416	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



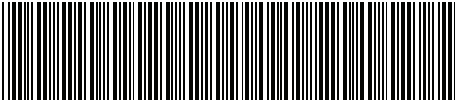
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	600.000	-	-	-	600.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	01 . 54	
01 RM		-	2.590.000	-	-	-	2.590.000	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	20.081.976	-	-	-	20.081.976		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	16.111.976	-	-	-	16.111.976	01 . 54	
01 RM		-	6.894.773	-	-	-	6.894.773	139	
02 PLN		-	9.217.203	-	-	-	9.217.203	140	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 54	
01 RM		-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



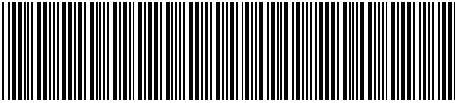
DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	01 . 54	PL 1F1NDHGA
01 RM		-	1.970.000	-	-	-	1.970.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	74.776.202	-	-	-	74.776.202		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	52.856.559	-	-	-	52.856.559	01 . 54	
01 RM		-	23.957.357	-	-	-	23.957.357	139	
02 PLN		-	28.899.202	-	-	-	28.899.202	140	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	01 . 54	
01 RM		-	14.759.643	-	-	-	14.759.643	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.100.000	-	-	-	3.100.000	01 . 54	
01 RM		-	3.100.000	-	-	-	3.100.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	01 . 54	
01 RM		-	4.060.000	-	-	-	4.060.000	139	
JUMLAH		39.621.169	160.840.211	2.574.416	-	-	203.035.796		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:0054-4505-8997-5648

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

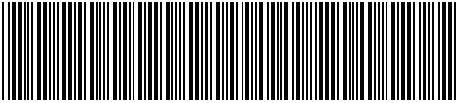
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	129.946	1.354.800	3.034.840	32.233.900	5.005.956	4.473.804	4.048.475	4.777.828	6.084.275	5.267.651	4.488.051	3.876.676	74.776.202

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV A. B L O K I R



DS:0054-4505-8997-5648

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

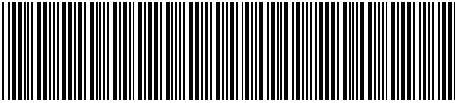
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.000.000		
	51 BELANJA PEGAWAI Rp. 6.000.000		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000.000		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2023
IV B. C A T A T A N



DS:0054-4505-8997-5648

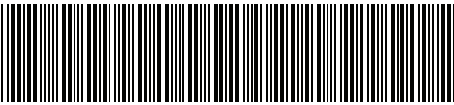
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 04
Tanggal : 04 Juni 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

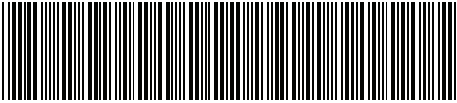
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:3001-0600-3155-7949

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04	EKONOMI	Rp.	131.526.779.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.526.779.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.232.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.232.000.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

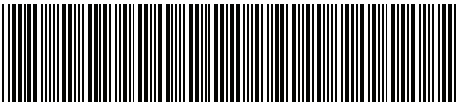
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.232.000.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.232.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.526.779.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	71.970.590.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	47.856.189.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



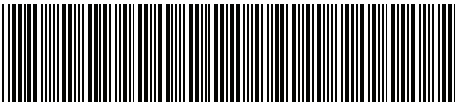
DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.232.000.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.232.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.720.000.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.720.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
		02	PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

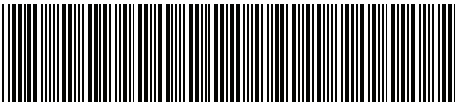


DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.526.779.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			71.970.590.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	66.937.990.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	540.000.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	709.400.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.568.000.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	570.000.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	62.920.590.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

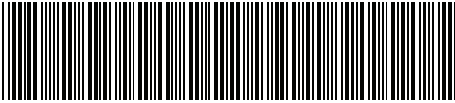


DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	500.000.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	610.000.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	610.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.422.600.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.182.600.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	660.000.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	580.000.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.879.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

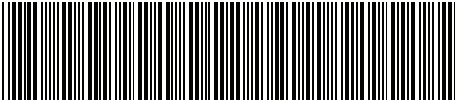


DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			47.856.189.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	26.784.622.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	922.400.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.791.789.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.800.000.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3001-0600-3155-7949

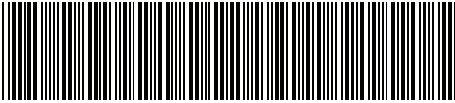
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	12.416.809.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.423.720.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.562.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.679.000.000
Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.479.000.000
	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:3001-0600-3155-7949

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (16)Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Provinsi : (01)DKI JAKARTA

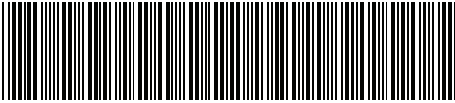
Kode>Nama Satker : (631003)PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	160.758.779.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



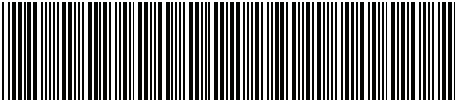
DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	34.260.590	124.588.189	1.910.000	-	-	160.758.779	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.232.000	-	-	-	29.232.000		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
01	RM	-	6.720.000	-	-	-	6.720.000		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01 RM		-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139@	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	34.260.590	95.356.189	1.910.000	-	-	131.526.779		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	34.260.590	35.800.000	1.910.000	-	-	71.970.590		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	34.260.590	32.677.400	-	-	-	66.937.990	01 . 54	
01 RM		34.260.590	32.677.400	-	-	-	66.937.990	139	

DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	90.000	1.910.000	-	-	2.000.000	01 . 54	
01	RM	-	90.000	1.910.000	-	-	2.000.000	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	610.000	-	-	-	610.000	01 . 54	
01	RM	-	610.000	-	-	-	610.000	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.422.600	-	-	-	2.422.600	01 . 54	
01	RM	-	2.422.600	-	-	-	2.422.600	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.700.000	-	-	-	11.700.000		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	01 . 54	
01	RM	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	139	

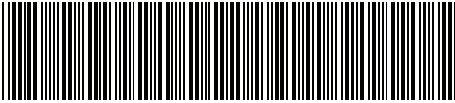
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	01 . 54	
01 RM		-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
01 RM		-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	47.856.189	-	-	-	47.856.189		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	26.784.622	-	-	-	26.784.622	01 . 54	
01 RM		-	26.784.622	-	-	-	26.784.622	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.416.809	-	-	-	12.416.809	01 . 54	
01 RM		-	12.416.809	-	-	-	12.416.809	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.679.000	-	-	-	2.679.000	01 . 54	
	01 RM	-	2.679.000	-	-	-	2.679.000	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	01 . 54	
	01 RM	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	139	
JUMLAH		34.260.590	124.588.189	1.910.000	-	-	160.758.779		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:3001-0600-3155-7949

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

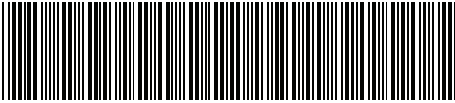
DS:3001-0600-3155-7949

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	10.957	771.355	2.384.298	1.304.523	3.790.199	4.409.700	4.189.100	6.352.545	6.559.117	5.112.644	5.257.356	7.714.395	47.856.189

ttd.
 Mohammad Zainal Fatah
 NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:3001-0600-3155-7949

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

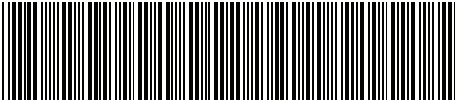
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.000.000		
	52 Belanja Barang Rp. 4.000.000		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000.000		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N



DS:3001-0600-3155-7949

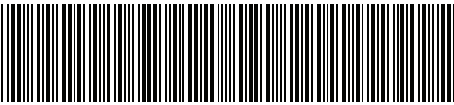
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 05
Tanggal : 16 Juli 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 160.758.779.000 (SERATUS ENAM PULUH MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 160.758.779.000

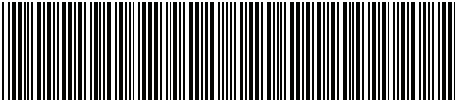
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:4089-7103-4505-5819

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

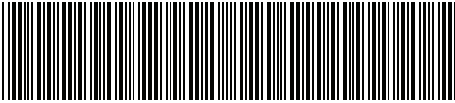
04	EKONOMI	Rp.	131.668.425.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	131.668.425.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	29.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	29.090.354.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

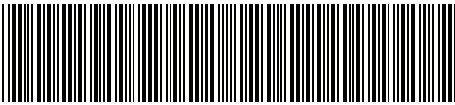


DS:4089-7103-4505-5819

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	29.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	29.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	131.668.425.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	72.991.513.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.700.000.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.976.912.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



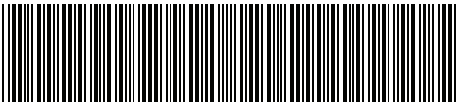
DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				29.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				29.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
		02	PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

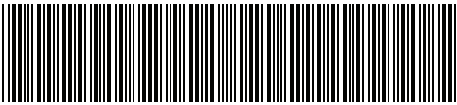


DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	6	:	4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga	100,00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Rincian Output		:	01	QFC.001 Mikro Kredit Perumahan (PN)	100.00	Rumah Tangga	4.000.000.000
Program		:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen			131.668.425.000
Kegiatan		:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.991.513.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
			6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
			7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP			
			8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	68.132.970.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
			02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	547.813.000
			03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.334.800.000
			04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
			05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
			06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
			07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	64.292.303.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

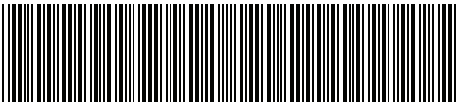


DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	2.000.000.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.00	Unit	591.680.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.700.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.751.000.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.501.000.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.879.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

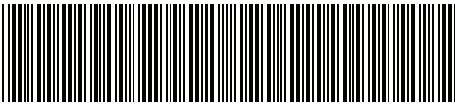


DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000
Kegiatan		:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.976.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.554.555.000
Rincian Output		:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.168.153.000
		:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.146.000.000
		:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana				Rekomendasi Kebijakan, Kajian		
	12	ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
	13	ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	4197.AEE	Kemitraan	12,00	Kesepakatan	12.467.809.000
Rincian Output	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.423.720.000
	02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.613.000.000
	03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.431.089.000
	04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.978.790.000
Rincian Output	01	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.778.790.000
	02	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
	03	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.975.758.000
Rincian Output	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.975.758.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I B. SUMBER DANA



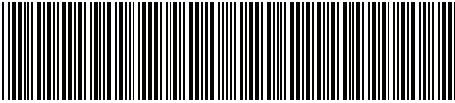
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	160.758.779.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	160.758.779.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	35.632.303	123.126.476	2.000.000	-	-	160.758.779	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	29.090.354	-	-	-	29.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	29.090.354	-	-	-	29.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		

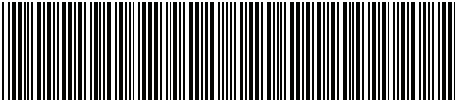
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4976.QAH	RM	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM 4976.QFC	RM	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
	Subsidi kepada Keluarga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	01 . 54	
01 RM 033.16.WA	RM	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	139@	
	Program Dukungan Manajemen	35.632.303	94.036.122	2.000.000	-	-	131.668.425		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	35.632.303	35.359.210	2.000.000	-	-	72.991.513		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	35.632.303	32.500.667	-	-	-	68.132.970	01 . 54	
01 RM		35.632.303	32.500.667	-	-	-	68.132.970	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

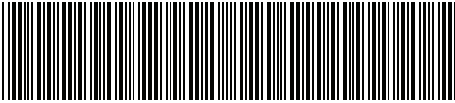


DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	01 . 54	
	01 RM	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	139	
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	679.411	-	-	-	679.411	01 . 54	
	01 RM	-	679.411	-	-	-	679.411	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	01 . 54	
	01 RM	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	139	
4195 Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		-	11.700.000	-	-	-	11.700.000		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	01 . 54	
	01 RM	-	7.751.000	-	-	-	7.751.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

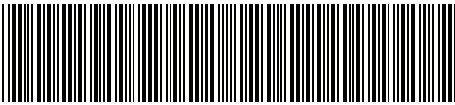


DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	01 . 54	
01 RM		-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	139	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
01 RM		-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	46.976.912	-	-	-	46.976.912		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	25.554.555	-	-	-	25.554.555	01 . 54	
01 RM		-	25.554.555	-	-	-	25.554.555	139	
4197.AEE	Kemitraan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	12.467.809	-	-	-	12.467.809	01 . 54	
01 RM		-	12.467.809	-	-	-	12.467.809	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.978.790	-	-	-	2.978.790	01 . 54	
	01 RM	-	2.978.790	-	-	-	2.978.790	139	
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	01 . 54	
	01 RM	-	5.975.758	-	-	-	5.975.758	139	
JUMLAH		35.632.303	123.126.476	2.000.000	-	-	160.758.779		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:4089-7103-4505-5819

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

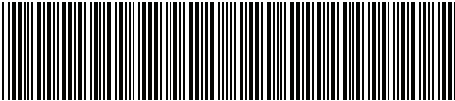
DS:4089-7103-4505-5819

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.396.124	5.866.401	5.669.106	6.656.066	7.237.314	46.976.912

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

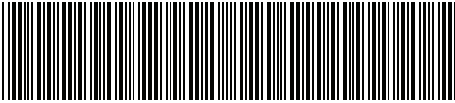
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.000.000		
	52 Belanja Barang Rp. 4.000.000		
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		
4976.QFC	Subsidi kepada Keluarga		
	526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000.000		
	Automatic Adjustment		
	Disposisi: Automatic Adjustment		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N



DS:4089-7103-4505-5819

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

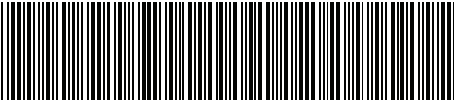
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1479-7849-2623-3142

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 07
Tanggal : 22 Agustus 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

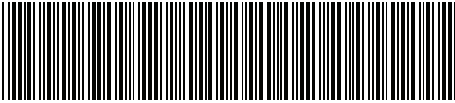
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1479-7849-2623-3142

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

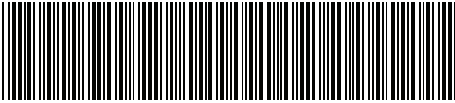
04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

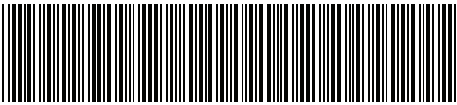


DS:1479-7849-2623-3142

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	89.164.426.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.400.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	46.376.912.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



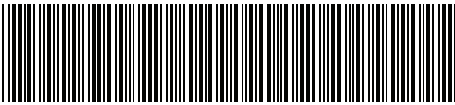
DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.090.354.000	
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				25.090.354.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi		3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)		2.00	kegiatan	3.000.000.000
		02	PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)		1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya		2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)		1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)		1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				146.941.448.000	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

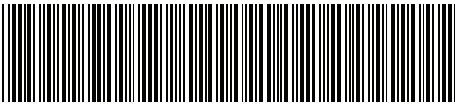


DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			89.164.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.405.993.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	589.113.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.293.500.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	641.320.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.000.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	2.899.890.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	1.491.570.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	260,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	679.411.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	260.00	Orang	679.411.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.400.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.451.110.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.201.110.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.879.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.879.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.070.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.350.000.000

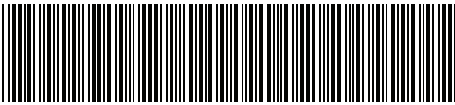
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			46.376.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output 8	:	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.991.487.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.051.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.520.537.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.200.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1479-7849-2623-3142

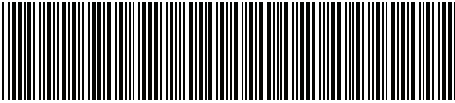
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	11.054.168.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	3.023.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.613.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.417.448.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.378.790.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	400.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.778.790.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	700.000.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.952.467.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.952.467.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1479-7849-2623-3142

I B. SUMBER DANA

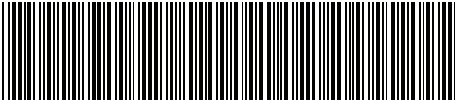
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



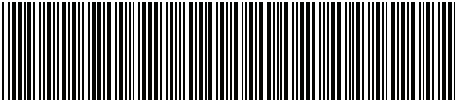
DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	01 . 54	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



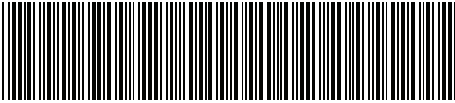
DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	93.136.232	2.899.890	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	35.359.210	2.899.890	-	-	89.164.426		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.500.667	-	-	-	83.405.993	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.500.667	-	-	-	83.405.993	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	01 . 54	
01 RM		-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

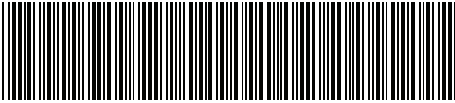


DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	679.411	-	-	-	679.411	01 . 54	
01 RM		-	679.411	-	-	-	679.411	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	01 . 54	
01 RM		-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.400.110	-	-	-	11.400.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.451.110	-	-	-	7.451.110	01 . 54	
01 RM		-	7.451.110	-	-	-	7.451.110	139	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	01 . 54	
01 RM		-	1.879.000	-	-	-	1.879.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

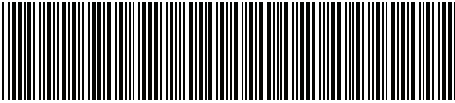


DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	46.376.912	-	-	-	46.376.912		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	25.991.487	-	-	-	25.991.487	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	25.991.487	-	-	-	25.991.487	139	
4197.AEE	Kemitraan	-	11.054.168	-	-	-	11.054.168	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	11.054.168	-	-	-	11.054.168	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	3.378.790	-	-	-	3.378.790	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	3.378.790	-	-	-	3.378.790	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.952.467	-	-	-	5.952.467	01 . 54	
01 RM		-	5.952.467	-	-	-	5.952.467	139	
JUMLAH		50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

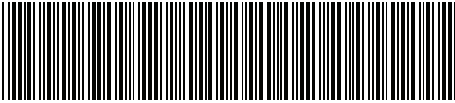
DS:1479-7849-2623-3142

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.492.449	6.263.469	7.106.568	46.376.912

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:1479-7849-2623-3142

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

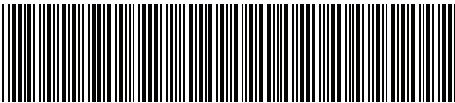
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 899.890		
	53 Belanja Modal Rp. 899.890		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 899.890		
	alokasi harus dilengkapi dokumen data dukung terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N



DS:1479-7849-2623-3142

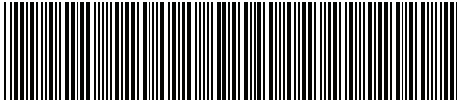
Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 899.890		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00 Rp. 899.890		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 08
Tanggal : 30 September 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

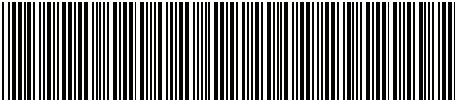
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

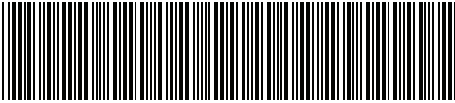
04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

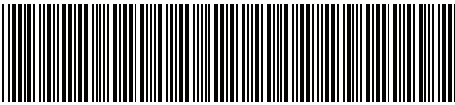


DS:1034-5930-5521-8455

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.104.426.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	45.656.912.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



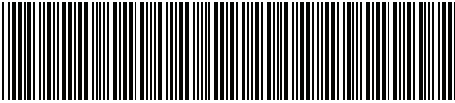
DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
		02	PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				146.941.448.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

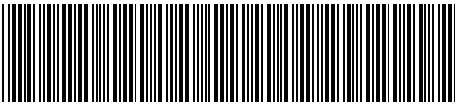


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.104.426.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.355.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	686.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	627.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.254.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	600.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5,00	Unit, m2, Paket	2.899.890.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	3.00	Unit	1.491.570.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.408.320.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

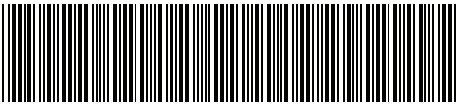


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	422.00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.179.132.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.033.207.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.300.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

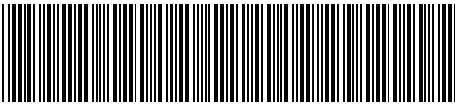


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			45.656.912.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
	:	2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
	:	3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
	:	4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.768.235.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
	:	02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
	:	03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.126.280.000
	:	04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
	:	05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
	:	06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
	:	07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
	:	08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.407.285.000
	:	09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
	:	10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.230.548.000
	:	11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
	:	12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
	:	13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1034-5930-5521-8455

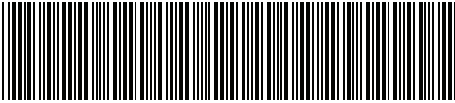
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.899.297.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.899.297.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:1034-5930-5521-8455

I B. SUMBER DANA

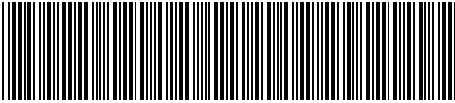
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

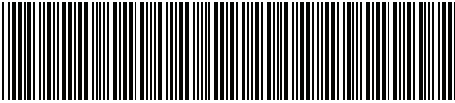


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

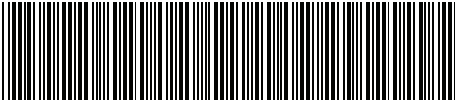


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139	
4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM		-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139	
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	93.136.232	2.899.890	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.299.210	2.899.890	-	-	90.104.426		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.450.379	-	-	-	83.355.705	01 . 54	
01 RM		50.905.326	32.450.379	-	-	-	83.355.705	139	
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	01 . 54	
01 RM		-	-	2.899.890	-	-	2.899.890	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

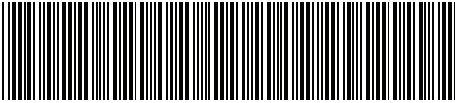


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
01 RM		-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	01 . 54	
01 RM		-	2.179.132	-	-	-	2.179.132	139	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
01 RM		-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
01 RM		-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

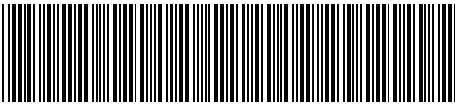


DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	45.656.912	-	-	-	45.656.912		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	25.768.235	-	-	-	25.768.235	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	25.768.235	-	-	-	25.768.235	139	
4197.AEE	Kemitraan	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	139	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	5.899.297	-	-	-	5.899.297	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	5.899.297	-	-	-	5.899.297	139	
JUMLAH		50.905.326	118.226.586	2.899.890	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:1034-5930-5521-8455

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

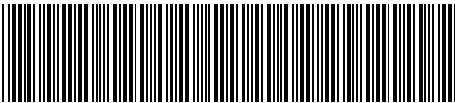
DS:1034-5930-5521-8455

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.534	3.871.099	4.191.219	3.597.308	5.446.124	5.916.401	5.492.449	6.107.141	6.542.896	45.656.912

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

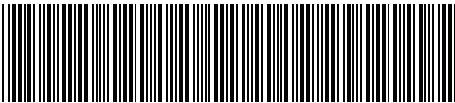
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 899.890		
	53 Belanja Modal Rp. 899.890		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		
	Catatan Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 899.890		
	alokasi harus dilengkapi dokumen data dukung terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N



DS:1034-5930-5521-8455

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

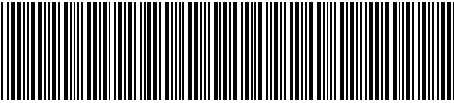
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 899.890		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00 Rp. 899.890		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:6508-1504-9206-4768

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 12
Tanggal : 21 November 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- Sebesar : Rp. 172.031.802.000 (SERATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR TIGA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 172.031.802.000

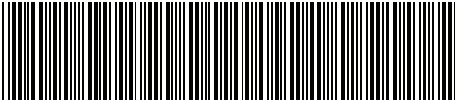
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:6508-1504-9206-4768

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

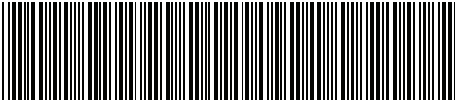
04	EKONOMI	Rp.	146.941.448.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	Rp.	146.941.448.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	25.090.354.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	25.090.354.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024

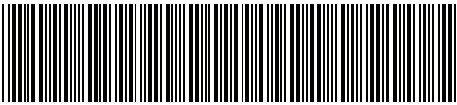


DS:6508-1504-9206-4768

Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	25.090.354.000
IA.4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp.	25.090.354.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	146.941.448.000
WA.4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	90.844.706.000
WA.4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Rp.	11.180.110.000
WA.4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp.	44.916.632.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



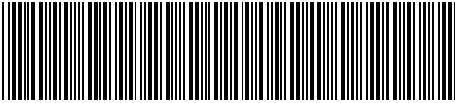
DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				25.090.354.000
Kegiatan	:	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan				25.090.354.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.512.000.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.00	Rekomendasi Kebijakan	5.512.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.578.354.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30.00	Dokumen	6.578.354.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4976.PEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	5.000.000.000
Rincian Output	:	01	PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan (PN)	2.00	kegiatan	3.000.000.000
		02	PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan (PN)	1.00	kegiatan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4976.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	7.000.000.000
Rincian Output	:	01	QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (PN)	1.00	layanan	4.500.000.000
		02	QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan (PN)	1.00	layanan	2.500.000.000
Program	:	033.16.WA	Program Dukungan Manajemen				146.941.448.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

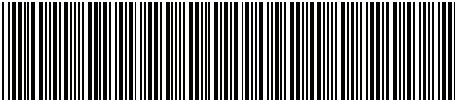


DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			90.844.706.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		2. 02	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		3. 03	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		4. 04	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		5. 05	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
		6. 06	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik			
		7. 07	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP			
		8. 08	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	83.741.705.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	726.734.000
		02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	685.347.000
		03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	1.359.590.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	591.032.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	783.000.000
		06	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	30.676.000
		07	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	79.565.326.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	3.166.799.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	1.794.848.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	1.371.951.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

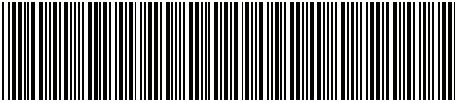


DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	3	:	4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	422,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.669.699.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	422.00	Orang	1.669.699.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.266.503.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.00	Dokumen	1.120.578.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	618.425.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3.00	Dokumen	527.500.000
Kegiatan		:	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan			11.180.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.336.110.000
Rincian Output		:	01	ABF.002 Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	6.086.110.000
		:	02	ABF.003 Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.824.000.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	4.00	Layanan	1.824.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.020.000.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	720.000.000
		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	3.00	Dokumen	1.300.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA

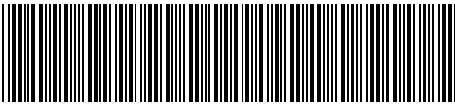


DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Kegiatan	:	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			44.916.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan			
		2. 02	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			
		3. 03	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman			
		4. 04	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	4197.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	25.343.935.000
Rincian Output	:	01	ABF.001 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		02	ABF.002 Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.490.000.000
		03	ABF.003 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2.00	Rekomendasi Kebijakan	2.701.980.000
		04	ABF.004 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	Rekomendasi Kebijakan	600.000.000
		05	ABF.005 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.041.785.000
		06	ABF.007 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	3.479.351.000
		07	ABF.008 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.413.466.000
		08	ABF.009 Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	3.00	Rekomendasi Kebijakan	2.377.675.000
		09	ABF.011 Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.339.520.000
		10	ABF.012 Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.260.158.000
		11	ABF.013 Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	900.000.000
		12	ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000.000
		13	ABF.016 Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.540.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6508-1504-9206-4768

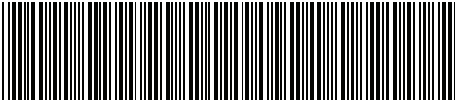
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4197.AEE	Kemitraan	10,00	Kesepakatan	10.801.168.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.923.720.000
		02	AEE.002	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	2.553.000.000
		03	AEE.003	Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang Siap Dikerjasamakan	2.00	Kesepakatan	1.374.448.000
		04	AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4.00	Kesepakatan	3.950.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.188.212.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.00	NSPK	300.000.000
		02	AFA.002	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.00	NSPK	1.758.790.000
		03	AFA.003	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	1.00	NSPK	679.422.000
		04	AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1.00	NSPK	450.000.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	26,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.583.317.000
Rincian Output	:	01	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.00	Dokumen	5.583.317.000

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024



DS:6508-1504-9206-4768

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (033)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Unit Organisasi : (16)Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Provinsi : (01)DKI JAKARTA

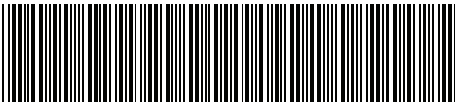
Kode>Nama Satker : (631003)PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	172.031.802.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	172.031.802.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802	01 . 54	
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	-	25.090.354	-	-	-	25.090.354		
4976.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
01	RM	-	5.512.000	-	-	-	5.512.000		
4976.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
4976.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
01	RM	-	6.578.354	-	-	-	6.578.354		
4976.PEA	Koordinasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		

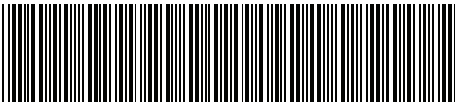
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 4976.QAH	RM	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	139@	01 . 54
	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	01 . 54	
01 RM 033.16.WA	RM	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000	139@	
	Program Dukungan Manajemen	50.905.326	92.869.323	3.166.799	-	-	146.941.448		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50.905.326	36.772.581	3.166.799	-	-	90.844.706		
4194.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	01 . 54	
01 RM 4194.EBB	RM	50.905.326	32.836.379	-	-	-	83.741.705	139@	01 . 54
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	01 . 54	
01 RM	RM	-	-	3.166.799	-	-	3.166.799	139	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

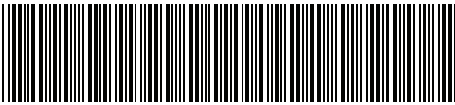


DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4194.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.669.699	-	-	-	1.669.699	139@	
4194.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	2.266.503	-	-	-	2.266.503	139@	
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	-	11.180.110	-	-	-	11.180.110		
4195.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	7.336.110	-	-	-	7.336.110	139@	
4195.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
01	RM	-	1.824.000	-	-	-	1.824.000	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	2.020.000	-	-	-	2.020.000	139@	
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	-	44.916.632	-	-	-	44.916.632		
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	25.343.935	-	-	-	25.343.935	139@	
4197.AEE	Kemitraan	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	10.801.168	-	-	-	10.801.168	139@	
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	01 . 54	
	(01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)								
	01 RM	-	3.188.212	-	-	-	3.188.212	139@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (16) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4197.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	01 . 54	
01 RM		-	5.583.317	-	-	-	5.583.317	139@	
JUMLAH		50.905.326	117.959.677	3.166.799	-	-	172.031.802		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DS:6508-1504-9206-4768

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

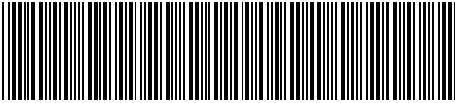
DS:6508-1504-9206-4768

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.328	769.683	2.405.729	1.304.404	3.871.089	4.125.281	2.468.042	5.110.368	6.731.407	5.324.176	7.129.820	5.664.303	44.916.632

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

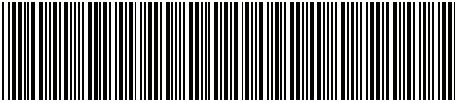
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003 033.16.IA 4976 4976.ABF 4976.AFA	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	4976.EBD 4976.PEA 4976.QAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.800 Kebijakan S-1023/MK.02/2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.736.299		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	52 Belanja Barang Rp. 2.736.299		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.600 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.188		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Koordinasi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.299 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 175.409 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4976.AFA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.700	4976.QAH	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Pelayanan Publik Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.696		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
4976.AFA	Kebijakan S-1023/MK.02/2024	4976.QAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 116.186 Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.000		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
4976.AFA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4976.QAH	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		

DS:6508-1504-9206-4768

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
033.16.WA 4194 4194.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4194.EBC	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.520		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Layanan Manajemen SDM Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.866		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.127		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.085
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
033.16.WA 4194 4194.EBA	Program Dukungan Manajemen	4194.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.152		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		4195
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		4195.ABF
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.631		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.902
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.448	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan S-1023/MK.02/2024	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.592		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



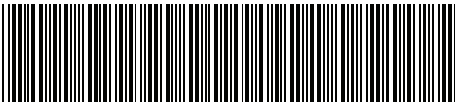
DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4195.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.300 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.913 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.323 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.987 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
4195.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 271.234 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.572 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	4197.AEE	Kemitraan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.262 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.650 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.432 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.776 Kebijakan S-1023/MK.02/2024	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.038	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV A. B L O K I R



DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

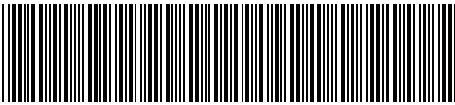
Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4197.AFA	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.274
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan S-1023/MK.02/2024
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.917		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.595		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
4197.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.343		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.652		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.584		
	Kebijakan S-1023/MK.02/2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2024
IV B. C A T A T A N



DS:6508-1504-9206-4768

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [16] Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [631003] PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
631003	PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen		
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
4194.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 899.890		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon 1 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai sebanyak 1 Unit seharga Rp899.890.000,00 Rp. 899.890		

Jakarta, 24 November 2023
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264348

Jakarta, 20 Mei 2024

Nomor : UM 0201-RP/124-1
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Tahun
Anggaran 2023

Yth.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, berdasarkan laporan tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 60/KPTS/Dp/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023;
2. Surat Tugas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Nomor: 185/SPT/Pp/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penugasan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

B. Tujuan Evaluasi

1. Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat implementasi AKIP;
4. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
5. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP; dan
6. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang

memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

D. Uraian Hasil Evaluasi

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, maka implementasi atas AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 dapat dikategorikan **A** dalam pengertian bahwa **Memuaskan**, dengan pencapaian nilai **84,00%** dengan rincian per komponen:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022 (%)	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023 (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,96	84,00

Hasil implementasi AKIP pada tahun anggaran 2023 meningkat 3,04% apabila dibandingkan dengan hasil implementasi AKIP tahun anggaran 2022.

2. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman disebabkan masih adanya kelemahan dalam komponen/subkomponen AKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
1.	Perencanaan Kinerja	
	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	
2.	Pengukuran Kinerja	
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang	Terjadi keterlambatan dalam melakukan <i>upload</i> laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam <i>e-sakip</i>
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	
3.	Pelaporan Kinerja	
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Laporan monev kinerja bulanan telah diupload di <i>e-sakip</i> namun tidak memenuhi kriteria disusun dan disampaikan selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Laporan kinerja telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun belum disertai tanggal legalitas
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	
	c. Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisien Kinerja.	Rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi AKIP 2022 berdasarkan LHE Dit. PPIP TA 2022 telah dilakukan, namun belum optimal. Dit. PPIP belum disiplin dalam mengunggah dokumen laporan

No	Komponen/Sub komponen	Permasalahan
		monitoring kinerja bulanan ke dalam lama <i>e-sakip</i> PUPR. - Keterlambatan Tahun 2022: Sepanjang Tahun 2022 - Keterlambatan Tahun 2023: Sepanjang Tahun 2023 dan pelaksanaan <i>upload</i> pada <i>e-sakip</i>

E. Rekomendasi

No	Komponen	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja	
2.	Pengukuran Kinerja	Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam <i>e-sakip</i>
3.	Pelaporan Kinerja	- Menyusun dan memublikasikan laporan monev bulanan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR - Menuliskan tanggal legalitas pada laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal (<i>link</i> bukti dukung dapat disampaikan)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT